



Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



04 0 700
Direktorat
dayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

370.332

PAS

a

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



TANGGAL	No. INDUK
5 MAR 1984	863

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1980 / 1981

Tim Penulis :

1. Drs. Pasifikus Ahok
2. Slamet Ismail, SH
3. Wijoso Tjitrodarjono, SH
4. Drs. Soedarto
5. Uray Syamsuri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
1980 / 1981

Tim Penyunting :

- 1. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja**
- 2. Sutrisno Kutoyo**

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Pola Pemukiman Pedesaan Kalimantan Barat th. 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula tiap naskah ini di daerah yang terdiri dari :
dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Drs. Djenen MSc.
Drs. P. Wayong, Dra. Mc. Suprapti.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.—

Jakarta, 27 Desember 1982.



KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Pola Pemukiman Pedesaan Kalimantan Barat th. 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi dari pada tahap pencatatan yang dapat dilaksanakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leksas/LPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula tiap naskah ini di daerah yang terdiri dari :

dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Drs. Djenen MSc. Drs. P. Wayong, Dra. Mc. Supardi.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 27 Desember 1982.



P R A K A T A

Sesuai dengan surat Pemimpin Proyek IDKD Pusat tanggal 27 Desember 1982, nomor 280/IDKD/1982, ditetapkan penerbitan 2 (dua) judul naskah kebudayaan daerah Kalimantan Barat, yaitu :

1. Sejarah Pendidikan Kalimantan Barat, dan
2. Pola Pemukiman Kalimantan Barat.

Kedua naskah tersebut adalah hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat tahun Anggaran 1980/1981, yang pelaksanaan penerbitannya baru dilakukan pada tahun anggaran 1982/1983.

Keberhasilan penyusunan naskah ini, adalah berkat usaha dan kerja keras dari Tim Penulis naskah tersebut, disamping pula karena adanya bantuan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh :

- Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- Universitas Tanjungpura beserta Lembaga Penelitiannya.
- Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
- Pemerintah Daerah Tingkat II se Kalimantan Barat.
- Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Atas kesungguhan, bantuan, dan kemudahan, yang telah diberikan itu, kami haturkan penghargaan dan banyak-banyak terima kasih.

Akhirnya, kami berharap semoga dengan terbitnya naskah ini dapat memperkaya dan menambah khasanah kebudayaan Indonesia pada umumnya dan daerah Kalimantan Barat pada khususnya.

Pontianak, Pebruari 1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat

Pemimpin,



Drs. BASITH BURAIDAH
NIP. 130516048.

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Daerah Kalimantan Barat sebagaimana daerah Indonesia lainnya, memiliki pula kebudayaan asli yang khas, baik yang bersifat kebudayaan material maupun yang bersifat kebudayaan spiritual. Namun pada kenyataannya, hal-hal mengenai kebudayaan tersebut kadang-kadang sulit diperoleh karena jarangnyanya informasi yang telah didokumentasikan ataupun dipublikasikan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka usahanya untuk menerbitkan dan menyebarkan penjelasan tentang kebudayaan daerah Kalimantan Barat, khususnya mengenai :

1. Sejarah Pendidikan Kalimantan Barat, dan
2. Pola Pemukiman Kalimantan Barat,

sebagai hasil sasaran dari Proyek IDKD untuk anggaran 1980/1981, adalah merupakan langkah yang positif dalam menggugah kesadaran akan pentingnya usaha-usaha penggalan, peyelamatan, pemeliharaan serta pengembangan warisan budaya bangsa, khususnya di daerah Kalimantan Barat.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik di Pusat maupun di Daerah terutama kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDKD Pusat, Team Evaluasi, Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura dan para Ketua Aspek beserta anggota-anggotanya yang dengan jerih payah telah dapat mewujudkan naskah tersebut.

Pontianak, 10 Pebruari 1983

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Kalimantan Barat,



DRS. TASNIM DAHLAN
NIP. 130073903.

KATA PENGANTAR

Naskah Sejarah Pendidikan di Daerah Kalimantan Barat ini merupakan laporan hasil penelitian lapangan sebagai pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1980/1981 yang disusun sedapat mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Terms of Reference dari Proyek Pusat. Meskipun demikian kami sesuaikan pula dengan data dan keadaan apa adanya di Daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan Proyek ini Tim Daerah mengalami kesulitan-kesulitan antara lain adalah :

1. Belum adanya buku-buku yang telah diterbitkan dan kurangnya sumber-sumber berupa naskah atau dokumen tentang data Sejarah Pendidikan di Daerah Kalimantan Barat secara menyeluruh sebagai bahan penulisan/laporan Sejarah Pendidikan ini. Data yang diperoleh hanya dikumpulkan dari buku-buku yang merupakan data yang terpisah-pisah, sehingga untuk mengumpulkan data ini menjadi satu bahan laporan yang utuh dan terintegrasi cukup memakan waktu yang lama. Boleh dikatakan penulisan Sejarah Pendidikan di Kalimantan Barat ini sebelumnya belum pernah diadakan dan baru kali inilah penelitian dan penulisan semacam ini diadakan. Dapat dibayangkan bagaimana kesulitan-kesulitan tersebut dialami oleh Tim Daerah dalam mengumpulkan data tersebut. Ditambah lagi data yang dikumpulkan terpecah-pecah ke daerah-daerah yang cukup jauh dari kota Pontianak.
2. Tokoh-tokoh yang mengalami sendiri peristiwa itu atau yang tahu akan peristiwa-peristiwa pendidikan masa lampau yang dapat dianggap sebagai sumber cukup banyak tetapi mereka sudah banyak yang tua, sehingga ada peristiwa yang mereka ingat dan dapat diuraikan tetapi tidak ingat akan tahunnya. Ada juga diantaranya yang lupa akan peristiwa-peristiwa atau keadaan pendidikan yang pernah mereka alami dan bahkan mereka agak ragu-ragu memberikan penjelasan sehingga bagi Tim cukup sulit untuk mengrekonstruksikannya. Apalagi jika tidak ada buku yang memuat tahun dan data sebagai pembanding.
Dengan demikian laporan ini merupakan hasil yang cukup maksimal dari usaha Tim Daerah.

3. Waktu yang disediakan tidak cukup banyak sedangkan bahan yang akan dicari, dikumpulkan dan yang akan dikerjakan cukup banyak dan rumit terutama Aspek Sejarah Pendidikan di Daerah ini.
4. Banyaknya kesibukan-kesibukan dalam menjalankan tugas pokok sebagai Dosen atau Pegawai Negeri yang harus diselesaikan dan yang tidak dapat ditunda.

Dengan selesainya laporan ini maka pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatNya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan semestinya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, baik kepada para responden atau informan maupun kepada pihak-pihak yang telah memberikan atau meminjamkan dokumen-dokumen, naskah-naskah, buku-buku dan surat kabar dan pihak yang membantu dalam menyelesaikan laporan ini baik berupa pengetikan, pengesheetan dan penyusunan kami ucapkan terima kasih.

Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat kami mengucapkan terima kasih atas izin dan fasilitas yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat meneliti ke daerah-daerah di Kalimantan Barat.

Demikian juga kepada Bapak Rektor Universitas Tanjungpura Ir. Soepartono Siswopranoto yang telah mengizinkan kami mengambil bagian dalam proyek ini dan kepada Pemimpin Proyek yang ada di Daerah Kalimantan Barat, Saudara Drs. P.F. Soedjimin serta teman-teman peserta yang telah mendorong sehingga selesainya laporan ini kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Baik membalas budi baik Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara yang telah membantu tadi.

Akhirnya kami mengharapkan segala kritik dan saran-saran yang membangun demi lebih baiknya laporan ini karena laporan ini masih jauh dari sempurna. Atas semuanya itu kami sampaikan terima kasih.

Pontianak, Pertengahan Mei 1981

Tim Daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Dari Pusat	i
Kata Pengantar Pimpinan Proyek	ii
Kata Pengantar Kanwil P dan K Prop. Kalbar.	iii
Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Umum	1 - 7
B. Khusus	8 - 32
BAB II. PENDIDIKAN TRADISIONAL	
A. Pengaruh Agama Hindu dan Budha ...	34 - 36
B. Pengaruh Agama Islam	36 - 40
BAB III. PENDIDIKAN BARAT	
A. Pengaruh Portugis	41 - 43
B. Pendidikan Zaman VOC	43
c. Pendidikan Zaman Hindia Belanda (Sebelum Abad Ke - 20)	43 - 45
BAB IV. PENDIDIKAN PADA ABAD KE – 20	
A. Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda	46 - 52
B. Pendidikan Pergerakan Nasional	52 - 56
BAB V. PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA	
A. Pendidikan Zaman Jepang	57 - 59
B. Pendidikan Zaman Kemerdekaan	59 - 61
1. Pendidikan yang diselenggarakan Swasta	61 - 76
2. Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah...	76 - 85
PENUTUP	
Daftar Responden Atau Informan	85 - 88
Daftar Bacaan	89 - 91
Peta Daerah Kalimantan Barat.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1980/1981 meliputi lima aspek.

- Sejarah Daerah, berupa penulisan tematis “Sejarah Pendidikan”.
- Adat Istiadat Daerah, berupa penulisan tematis “Sistem Kesatuan Hidup Setempat”.
- Ceritera Rakyat Daerah, berupa penulisan tematis “Tokoh Mitologis dan Legendaris” yang mengandung nilai sesuai dengan nilai Pancasila.
- Geografi Budaya Daerah, berupa penulisan tematis “Pola Pemukiman”.
- Permainan Rakyat Daerah, yang bersifat kompetitif, rekreatif, edukatif dan religius.

Kegiatan dalam Aspek Sejarah Daerah berupa inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Pendidikan di Daerah Inventarisasi Sejarah Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari usaha penelitian, karena penelitian merupakan hal yang pokok dari inventarisasi Sejarah Pendidikan.

Setiap penelitian mempunyai komponen-komponennya.

Komponen-komponen penelitian ini ialah :

- A. Masalah Penelitian
- B. Tujuan Penelitian
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian.
 - 1. Personalia Tim Daerah
 - 2. Prosedur Penelitian
 - 3. Metoda Penelitian
 - 4. Aspek Penelitian

Keempat komponen ini telah dirumuskan oleh Tim Pusat Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, yang menangani Proyek ini. Rumusan-rumusan tersebut menjadi pegangan pokok dari inventarisasi ini. Selain daripada itu peneliti dapat pula mengemukakan hal-hal yang dianggap khusus bagi daerah yang bersangkutan selama ia tercakup dalam pengertian-pengertian sebagaimana disebutkan di atas.

1. *Masalah Penelitian*

a. *Masalah Umum*

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjaln di dalam bahan kesejarahan, folklore (nilai budaya), adat istiadat (sistem budaya), geografi budaya (lingkungan budaya) baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.

b. *Masalah Khusus*

1) *Sejarah Pendidikan di Daerah.*

Bahwa Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebudayaan, dihubungkan dengan pembangunan nasional, memegang peranan penting, sehingga pengungkapan akan sejarah pendidikan di daerah sangat diperlukan. Terutama pengetahuan tentang perkembangan pendidikan masa lampau yang hingga dewasa ini belum disusun secara lengkap, termasuk pemikiran tentang pendidikan belum didokumentasikan secara semestinya.

2) Masih banyak peninggalan serta warisan budaya yang belum terjamah oleh usaha inventarisasi dan dokumntasi terutama Sejarah Pendidikan di Daerah.

3) Hampir tidak adanya bahan-bahan tertulis, baik berupa hasil penelitian, catatan-catatan maupun bukti-bukti sejarah pendidikan tertulis di daerah ini yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau landasan penulisan sejarah pendidikan yang baik.

4) Banyak tokoh yang bisa merupakan saksi mata atau saksi sejarah dari zamannya telah meninggal dunia karena usianya sudah lanjut. Tokoh-tokoh yang masih hidup pada umumnya hanya mengetahui garis besarnya saja, mereka sudah lupa karena peristiwa itu telah lama terjadi dan karena usia mereka yang lanjut sehingga mereka tidak bisa mengingat hal-hal yang mendetail dan tahun didirikan sekolah-sekolah di daerah ini. Mereka tidak meninggalkan catatan-catatan atau bahan-bahan yang dapat diwariskan kepada keturunannya sehingga banyak kesulitan yang timbul akibat sumber-sumber bahannya yang tidak ada, untuk menyusun suatu rangkaian sejarah yang lengkap dan outentik.

Demikian pula kesadaran di kalangan masyarakat untuk menuliskan atau mencatat berbagai hal yang mempunyai arti penting, kemudian menyimpan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, masih amat tipis.

2. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Mengumpulkan data menyusun buku Sejarah Daerah tentang “Sejarah Pendidikan di Daerah” secara sistematis, terutama dimaksudkan : “melengkapi pengetahuan tentang sejarah pendidikan, mendokumentasikan pemikiran pendidikan, serta mencatat tokoh-tokoh pendidikan” di Daerah ini, untuk disajikan sebagai salah satu komponen dan penyusunan Sejarah Pendidikan Nasional.

Penyajian yang baik tentang sejarah pendidikan daerah akan dapat dipergunakan sebagai :

- 1) Bahan dokumentasi, terutama untuk Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional).
- 2) Bahan untuk lebih merangsang dan mendorong apresiasi terhadap budaya bangsa, khususnya tumbuhnya apresiasi dari generasi muda kita, terhadap warisan budaya bangsanya.
- 3) Bahan untuk studi lanjutan sehingga memperkaya budaya bangsa.
- 4) Bahan pembantu untuk perumusan kebijaksanaan, baik di dalam lingkungan Pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) maupun instansi-instansi serta lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang memerlukannya.
- 5) Mengumpulkan dan menyusun bahan Sejarah Pendidikan di daerah untuk menyusun atau melengkapi Sejarah Pendidikan Nasional.

Saling mengenal dan menghormati perbedaan serta mengetahui persamaan yang ada di antara mereka akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati dan sangat membantu proses pembinaan kesatuan bangsa.

Khususnya untuk membina saling pengertian dan saling menghormati satu sama lain di antara golongan-golongan yang terdapat di Kalimantan Barat. Fakta sejarah membuktikan bahwa tidak satupun golongan yang absen dalam memajukan bangsa dengan mendirikan pendidikan di daerah ini.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah seharusnya merupakan penelitian yang

tuntas. Akan tetapi mengingat adanya sejumlah keterbatasan baik yang berupa terbatasnya waktu kerja, kesulitan-kesulitan yang sudah diperhitungkan maupun yang timbul secara mendadak, beban tugas pokok yang di pikul oleh tenaga-tenaga yang diminta atau menyediakan diri untuk membantu pelaksanaan proyek ini, memaksa kami mengambil kebijakan untuk menuliskan garis-garis besar dari pada materi yang diteliti, yang sangat luas dan banyak seginya itu, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini sejauh yang bisa didapat, akan dapat dipergunakan sebagai bahan studi lanjutan ataupun dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan penelitian lanjutan dan lebih komprehensif dan lebih cermat sifatnya.

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah merupakan pengertian yang luas sehingga dalam rangka kegiatan proyek setiap tahunnya memerlukan suatu pemilihan yang selektif dan memfokus pada suatu obyek yang terbatas. Salah satu obyek yang terbatas tersebut adalah : Sejarah Pendidikan di Daerah yang mengungkapkan tentang Sejarah Pendidikan Tradisional, Pendidikan Barat, Pendidikan pada abad ke-20, Pendidikan Jaman Jepang, Pendidikan Jaman Kemerdekaan serta pengaruh-pengaruh sosial budayanya. Namun dalam Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Pendidikan di Daerah Kalimantan Barat, kami hanya dapat mengungkapkan secara garis besar tentang Pendidikan pada abad ke-20 termasuk di dalamnya Pendidikan Barat dan Pendidikan Tradisional (Pendidikan Islam) yang didirikan pada masa itu, Pendidikan Jaman Jepang dan Indonesia Merdeka, sedangkan Pendidikan yang dipengaruhi Agama Hindu dan Budha terpaksa tidak kami singgung karena sampai sekarang kami belum menemui datanya. Pendidikan Barat secara formal baru ada di Daerah Kalimantan Barat menjelang akhir abad ke-19 dan mulai banyak didirikan pada permulaan abad ke-20. Demikian juga pendidikan Islam secara formal baru muncul pada abad ke-20 sedangkan sebelumnya hanya ada berupa pendidikan non-formal yang terdapat di dalam kraton-kraton pada kerajaan-kerajaan yang terdapat di daerah ini.

4. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian

Sesuai dengan Pola kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan atau Term of Reference (TOR) Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah dan Surat Keputusan Pemimpin Proyek IDKD Kalimantan Barat nomor 505/IDKD/VII/1980 tanggal 1 Juli 1980, maka organisasi penelitian disusun sebagai berikut :

- a. Tim Pusat dan Tim Ahli dari Pusat Penelitian Sejarah Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) berkedudukan di Jakarta.

- b. Tim Daerah, yang terdiri dari penanggungjawab dan tenaga-tenaga peneliti berkedudukan di Pontianak, Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- a. Tim Pusat dan Tim Ahli bertugas :
 - 1) Menyiapkan Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan atau *Terms of Reference* (TOR) sebagai pedoman inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Pendidikan di Daerah.
 - 2) Tim Pusat dan Tim Ahli dari Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) merupakan instansi yang bertanggung jawab pada perencanaan, pengarah-an/Penataran, penilaian, penyempurnaan hasil akhir sampai menyunting dan menerbitkan.
- b. Tim Daerah bertugas melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Pendidikan di Daerah. Tim Daerah mengadakan perekaman, pengolahan dan penyusunan data sampai wujud naskah draft I, serta melengkapi bahan/data yang diperlukan untuk penyempurnaannya. Sebelumnya Tim Daerah mendapat pengarah-an/penjelasan dari Tim Pusat yang datang ke Daerah.

1. Personalia Tim Daerah

Personalialia Tim Daerah terdiri dari Ketua Tim merangkap anggota dan anggota-anggota inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Pendidikan di Daerah Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a) Ketua Tim merangkap anggota : Drs. Pasifikus Ahok (37 tahun).

Pendidikan :

- Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, lulus tahun 1969.
- Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak merangkap Kepala Bagian Pengajaran Universitas Tanjungpura Pontianak.

- b) Anggota-anggota Tim :

- 1) Wijoso Tjitrodarjono, SH (50 tahun).

- Pendidikan : Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, lulus tahun 1968.

- Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum, UNTAN, merangkap Ketua Jurusan Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum, UNTAN, dan merangkap sebagai Direktur Pengabdian Masyarakat UNTAN Pontianak.
- 2) Slamet Ismail, SH (38 tahun).
- Pendidikan : Sarjana Hukum, Jurusan Pidana, Fakultas Hukum, UNTAN, lulus tahun 1971.
 - Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum, UNTAN, merangkap Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, UNTAN, di Pontianak.
- 3) Drs. Soedarto (47 tahun).
- Pendidikan : Sarjana Pendidikan, Jurusan sejarah Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, lulus tahun 1979.
 - Jabatan : Pengawas Pendidikan Menengah Umum merangkap Kepala Sub Bagian Pengumpulan/Pengolahan data, Bagian Perencanaan, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
- 4) Uray Syamsuri (27 tahun).
- Pendidikan : SMEA Negeri II Pontianak, lulus tahun 1972.
 - Jabatan/Pekerjaan : Staf Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen P dan K, Propinsi Kalimantan Barat.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dimaksudkan disini adalah langkah-langkah prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tim Daerah atau tim peneliti memperoleh petunjuk tentang pelaksanaan penelitian dari Tim Pusat dan Tim Ahli yang disertai dengan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Penelitian (Term of Reference).

- b. Berdasarkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Penelitian maka Tim Daerah mengadakan penelitian.
- c. Tim Daerah atau Tim Peneliti membagi tugas tentang bagian mana yang diteliti dan ditulis oleh masing-masing anggota Tim. Dengan adanya pembagian tugas maka masing-masing anggota Tim Daerah meneliti dan menulis bagian yang dibebankan kepadanya.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian Sejarah Pendidikan di Daerah Kalimantan Barat ini dipergunakan metode historis yakni penelitian mengenai sejumlah dokumen dan fakta-fakta masa lampau sebagai usaha untuk menggambarkan gejala yang terjadi pada masa lampau sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas menurut jangka waktu tertentu di masa lampau, atau berusaha untuk dapat memahami keadaan sekarang berdasarkan data masa lampau dan kemungkinan pula dapat dipergunakan untuk meramalkan keadaan masa yang akan datang.¹⁾

Alat pengumpul data/fakta yang dipergunakan adalah :

- a. Wawancara atau interview dengan orang yang mengalami peristiwa itu sendiri atau melihat peristiwa itu sendiri atau yang mendengar atau tahu tentang peristiwa itu atau dengan orang yang hidup pada masa itu dengan maksud menggali fakta-fakta tentang masa lampau.
- b. Pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen, catatan-catatan dan naskah-naskah tertulis tentang masa lampau yang relevan dengan sejarah pendidikan di Daerah Kalimantan Barat.
- c. Penelitian tentang buku-buku yang relevan dengan Sejarah Pendidikan di Daerah.

4. Aspek Penelitian

Sistem penulisan, ilustrasi, bahasa serta penyusunan bibliografi serta lampiran-lampiran sesuai dengan Term of Reference dan petunjuk-petunjuk serta saran-saran yang diberikan oleh Tim Pusat yang disampaikan pada waktu pengarahan ketua/para anggota Tim Daerah yang dilaksanakan di Daerah masing-masing. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1980/1981.

1) Drs. Hadari Nawawi, *Analisa Data Dalam Eksperimen Bidang Sosial*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1977, hal. 6.

B. KHUSUS

1. Latar Belakang Budaya Masyarakat

- a. Latar Belakang Budaya Yang Pernah Hidup di Daerah, Ditinjau Dari Arus/Aliran Budaya, Agama/Kepercayaan.

Seperti di Daerah lain sebelum pengaruh Hinduisme datang di daerah ini kebudayaan dan kepercayaan masih asli. Hal ini dapat dibandingkan dengan kerajaan yang tertua di Kalimantan yang terdapat di Kalimantan Timur yang bernama kerajaan Kutai Tua. Disana didapatkan bahwa raja yang pertama bernama Kundungga, yang menurut perkiraan merupakan nama asli Indonesia belum dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepercayaan Hindu. Anakmya yang bernama Aqwawarman dan cucunya Mulawarman sudah dipengaruhi oleh Hinduisme dengan merencanakan mereka.

Di Daerah Kalimantan Barat kapan pengaruh Hinduisme datang belum dapat ditentukan, karena belum ada penyelidikan pada batu-batu atau prasasti-prasasti tertulis dan benda-benda peninggalan Hinduisme yang terdapat di daerah ini. Namun jelas bahwa kepercayaan yang ada sebelum Hinduisme datang adalah animisme dan dinamisme dan menghormati nenek moyang. Hal ini terbukti sampai sekarang di daerah atau kampung yang belum beragama, adat mereka apa yang dinamai *ponto'* atau *pantak*, yaitu patung dari nenek moyang yang terbuat dari kayu yang tiap tahun mereka hormati dan beri makan.

Mereka menganggap bahwa roh nenek moyang mereka melindungi kampung dan kehidupan mereka. Akan tetapi apabila ada di antara penduduk kampung yang melanggar hukum adat, orang tersebut harus dihukum dengan membayar denda-denda berupa benda pusaka. Kalau mereka yang melanggar hukum adat tidak dihukum maka roh nenek moyang akan marah dan mendatangkan melapetaka bagi seluruh penduduk kampung. Karena itu hukum adat disini masih kuat.

Disamping itu mereka juga percaya pada sesuatu benda tertentu yang mereka anggap mempunyai kekuatan gaib, baik pada benda hidup maupun pada benda-benda alam yang mati seperti batu, gunung, patung dan sebagainya, dan juga kepada benda-benda yang mereka buat sendiri seperti tombak, keris, parang dan sebagainya.

Kepercayaan demikian disebut animisme. Mereka juga percaya bahwa dalam beberapa benda tertentu yang hidup dan yang mati karena keadaannya yang luar biasa (karena kebagusannya atau kejelekannya) dianggap suci dan oleh karena itu memancarkan pengaruh baik atau jelek terhadap manusia dan keadaan sekitarnya. Jadi ada manusia, binatang, tanaman, benda-benda alam yang mati dan sebagainya yang dianggap mempunyai pengaruh tersebut karena keadaannya dan ada pula yang tidak. Pengaruh (kekuatan) gaib tersebut disebut *mana*.

Benda atau orang yang memiliki "mana" yang demikian itu disebut suci. Kepercayaan yang demikian itulah yang disebut dinamisme.

Sehubungan dengan itu pada masyarakat pedalaman yaitu suku bangsa Daya terdapat suatu kebiasaan atau suatu adat memotong kepala orang meskipun sesama suku bangsanya. Anak suku bangsa yang satu bermusuhan dengan anak suku bangsa yang lain. Ada juga gabungan beberapa anak suku bermusuhan dengan gabungan beberapa anak suku yang lain. Serang menyerang biasanya terjadi dan apabila membunuh lawan maka kepalanya dipotong dibawa pulang kerumah dan disimpan sampai turun-temurun. Biasanya satu tahun sekali diberi makan dengan upacara yang cukup besar. Perbuatan atau kebiasaan memotong kepala untuk dibawa pulang tersebut disebut ngayau atau mengayau. Kebiasaan tersebut didasarkan atas kepercayaan mereka bahwa memotong kepala musuh tersebut mempunyai kesaktian. Makin banyak kepala yang dipotong dan dibawa pulang oleh seseorang makin sakti orang tersebut menurut anggapan mereka. Bahkan pada beberapa anak suku terdapat adat kebiasaan yang ditaati dengan kuat bahwa apabila seorang perjaka yang akan meminang seorang gadis pasti akan ditolak apabila perjaka tersebut belum pernah memotong leher musuh. Jadi apabila seorang perjaka yang mau melamar seorang gadis ia harus sudah pernah memotong leher musuh dan membawa kepala tersebut pulang ke kampung halamannya. Tetapi adat kebiasaan ini sudah mulai hilang sejak agama Kristen Katolik dan agama Kresten Protestan mulai diterima oleh suku bangsa Dayak ini.

Namun sampai sekarang belum diketahui kapan adat kebiasaan mengayau ini dimulai. Apakah mulai ada sebelum pengaruh kebudayaan Hindu datang atau sesudahnya atau mulai ada pada masa yang kemudian dan itu ataukah merupakan kebudayaan asli, belum ada penelitian tentang hal ini.

Suku bangsa Daya baru mengalami pendidikan formal sejak agama Katolik masuk ke Kalimantan Barat yaitu pada akhir abad ke 19 pada tahun 1894 dengan didirikan sebuah sekolah desa oleh missi katolik di Sejiram, Kapuas Hulu.²⁾ Tetapi sekolah serupa itu sangat sedikit bagi mereka. Baru setelah proklamasi kemerdekaan R.I. mereka mulai sadar akan perlunya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Kebudayaan yang mula-mula mempengaruhi masyarakat daerah Kalimantan Barat adalah kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu ini datang dari pulau Jawa pada masa kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Jawa.

2) -----, *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Kursus Kader Katolik Sekretariat Nasional KM/CIC, Djakarta, 1971, hal. 108.

Pengaruh kebudayaan Hindu itu datang ke daerah Kalimantan Barat kira-kira pada masa kerajaan Majapahit yang diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, karena dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca yang ditulis pada masa itu nama Tanjungpura tertulis dalam buku tersebut **bersama-sama** dengan nama daerah yang lain. Ada dugaan bahwa kerajaan Tanjungpura termasuk daerah taklukan Majapahit. Oleh karena kerajaan Tanjungpura terletak di pantai laut maka dapat dicapai oleh angkatan laut Majapahit.³⁾

Tetapi menurut cerita rakyat di daerah bekas kerajaan Tanjungpura bahwa pengaruh kebudayaan Hindu datang di Kalimantan Barat umumnya dan di kerajaan Tanjungpura khususnya mulai pada masa pemerintahan raja Brawijaya dari Jawa Timur. Selanjutnya diceritakan bahwa putera raja Brawijaya kawin dengan puteri dari kerajaan Tanjungpura yang bernama Junjung Buih.

Keturunan keduanya kemudian ada yang mendirikan kerajaan di pedalaman Kalimantan di tepi sungai Kapuas yaitu kerajaan Tayan dan Meliau.⁴⁾ Sampai sekarang di bekas kerajaan Tanjungpura terdapat gambar wayang, cerita wayang dan permainan/kesenian wayang. Bahkan di Meliau di daerah suku bangsa Daya Desa ada keris yang mereka namai keris Majapahit dan menyebut diri mereka keturunan Majapahit namun mereka tidak mau disebut orang Jawa tetapi orang Daya keturunan Majapahit.

Ada juga berita atau cerita yang mengisahkan, bahwa pada waktu Majapahit meluaskan daerah takluknya angkatan laut Majapahit memudiki sungai Kapuas sampai ke hulu yaitu daerah Sintang. Sampai sekarang ada peninggalan berupa patung dan batu bertulis di hulu sungai Kapuas dan anak-anak Kapuas seperti di Belitang, Nanga Mahap, di dekat Muara Sekayam, hingga di samping keraton peninggalan kerajaan Sintang, patung kempat (gusar)? di pinggir Sungai Sepauk, di kampung Pari-Empahan, yang disebut patung qiwa, hingga di kampung Tanjung Ria peninggalan Aji Melayu.⁵⁾ Pada waktu inilah daerah Kalimantan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu.

3) H.J.v.d. Berg, Dr. H.Kroeskamp, L.P. Simanjuntak, *Dari Panggung Peristiwa Sejarah Dunia*, Djilid I, J.B.Wolters, Djakarta, Groningen, hal. 363.

4) J.U. Lontaan, *Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, hal. 75, 78, 80, 81.

5) *Ibid*, (foto), hal. 188 d dan hal. 192.

Banyak kata-kata dari bahasa daerah Daya yang menyerupai atau sama dengan bahasa Jawa seperti kata dewa, bala, cerita (ceritera, bahasa Indonesia), Jin (raksasa setan). Sampai sekarang di masyarakat pedalaman masih ada alat bunyi-bunyian yang bernama gong, dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar dan gendang. Apakah alat-alat bunyi-bunyian tersebut berasal dari Jawa zaman Hindu yaitu karena adanya pengaruh wayang ataukah tidak, belum ada penelitian tentang hal itu.

Setelah datang pengaruh kebudayaan Hindu kemudian datang pula pengaruh agama Islam. Pengaruh agama Islam inipun mula-mula datang di Kerajaan Tanjungpura pada masa pemerintahan Panembahan Giri Kesuma atau Penembah Sorgi sekitar tahun $\pm 1550 - \pm 1600$. Pada masa itu datang Syech Husin di Kerajaan Tanjungpura ini.⁶⁾

Pada tahun 1728 masa pemerintahan Mangkurat dengan gelar Sultan Dirilaga datang Syarif Husein Al-Qadri kesultanan Indralaya (kerajaan pecahan dari Kerajaan Tanjungpura).

Kedua tokoh agama Islam itu kawin dengan putera Keraton. Anak Syech Husin diangkat menjadi Sultan di Kerajaan Tanjungpura bergelar Sultan Aliuddin atau Sultan Syafeiuddin⁷⁾. Sedangkan Syarif Husin Al-Qadri pindah ke Kerajaan Mempawah dan kemudian anaknya Syech Abdurrahman mendirikan Kerajaan Pontianak pada tahun 1771. Sejak Syech Husin datang di Kerajaan Tanjungpura pengaruh agama Islam sudah mulai menyebar di Kalimantan Barat. Menurut cerita ini agama Islam datang ke Kalimantan Barat langsung dari Tanah Saudi Arabia. Pengaruh Islam ini kemudian menyebar ke Mempawah dan terus ke Kesultanan Pontianak dan selanjutnya menyebar keseluruh daerah pantai laut dan tepi pantai sungai-sungai di Kalimantan Barat dan seluruh kerajaan di Kalimantan Barat. Hanya masyarakat pedalaman suku Bangsa Daya yang tidak dipengaruhi oleh kebudayaan dan Agama Islam.

Penyebaran Islam di Kalimantan Barat juga datang dari Malaka. Sampai sekarang penduduk Melayu di pesisir laut dan di tepi sungai-sungai di Kalimantan semua memeluk agama Islam. Dewasa ini penduduk Melayu di Kalimantan Barat kurang lebih 39% dari seluruh penduduk Kalimantan Barat yang berjumlah 2.019.936 jiwa (Sensus Penduduk 1971) sehingga di sana terdapat pemeluk agama Islam yang kuat, ditambah lagi dengan pemeluk agama Islam yang datang dari luar Kalimantan Barat. Dengan demikian kebudayaan masyarakat Melayu merupakan kebudayaan Islam dan menurut hukum Islam.

Kebudayaan yang kemudian mempengaruhi kebudayaan Kalimantan Barat adalah kebudayaan Barat pada umumnya dan kebudayaan Belanda pada khususnya.

6) *Ibid*, hal. 83.

7) *Ibid*, hal. 90.

Mula-mula orang Belanda datang pada tahun 1604 di Kerajaan Tanjungpura, pada waktu itu usaha Belanda masih dalam Bentuk Verehigde Oost-Indische Compagnie (V.O. C). Kompeni Belanda datang mengunjungi Sekadana (Ibukota kerajaan Tanjung pura) ingin mengadakan hubungan dagang. Pada waktu itu orang Inggris juga datang ke Sukadana ingin berdagang⁸⁾. Selanjutnya V.O.C. bukan hanya mengadakan hubungan dagang tetapi mau menaklukkan kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, sehingga dapat memonopoli perdagangan. Demikianlah pada 1779 V.O.C. mengakui Sultan Syarif Abdurman bin Syarif Husin Alqadri sebagai sultan Pontianak⁹⁾.

Pada tahun 1815 Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan perjanjian dagang dengan Sultan Sambas dan mendirikan loji di tepi sungai Teberau di seberang istana sultan¹⁰⁾ Demikianlah juga pada tahun 1822 Comissie Belanda bernama Tobias untuk Kalimantan Barat mengirim utusan di bawah pimpinan G. Muller ke kerajaan Matan (Lanjutan dari Kerajaan Tanjungpura) dan mengadakan perjanjian dengan Sultan Matan. Dalam perjanjian itu ditetapkan antara lain Sultan Matan menyerahkan Kepulauan Karimata dan menjadi hak Pemerintah Hindia Belanda.¹¹⁾

Sejak itu Belanda berangsur-rangsur berkuasa di Kerajaan Matan dan menguasai kerajaan disana. Demikianlah lama kelamaan seluruh Kalimantan Barat pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa meskipun raja-raja di daerah masing-masing masih menduduki tahta tetapi mereka tunduk dan setiap tahun memberi upeti kepada pemerintah Hindia Belanda. Sejak dari masa itu kebudayaan Barat mempengaruhi masyarakat di Kalimantan Barat terutama masyarakat Cina, yang dengan cepat menerima pengaruh kebudayaan Barat ini. Masyarakat Cina yang mula-mula menerima agama Protestan dan agama Katolik di Kalimantan Barat. Kemudian agama Katolik dan agama Protestan ini menyebar ke masyarakat pedalaman suku bangsa Daya. Sampai sekarang suku bangsa Daya yang memeluk agama Katolik di Kalimantan Barat berjumlah sekitar 400.000 orang,¹²⁾ yang memeluk agama Protestan sekitar 100.000 orang, dan selebihnya masih menganut kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.

8) *Ibid*, hal. 84.

10) *Ibid*, hal. 139

9) *Ibid*, hal. 233

11) *Ibid*, hal. 139.

12) ———, *Kenangan 75 Tahun Mandirinya Gereja Katolik di Kalimantan Barat (1905 - 1980)*, Panitia Perayaan 75 Tahun Hadirnya Gereja Katolik di Kalimantan Barat, Pontianak, 1980, hal. 8.

Sejak perempatan pertama abad ke-20 sudah ada pemuda-pemuda yang memasuki pendidikan yang diselenggarakan secara Barat, terutama bagi anak golongan bangsawan, kaum elite dan pegawai pemerintah Kolonial Belanda, mereka telah ada yang memasuki sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda.

Demikianlah pula cara berpakaian sudah meniru pakaian orang Barat, mulai dari penghuni keraton sampai kepada rakyat jelata. Bahasa Belanda sudah dipergunakan oleh masyarakat golongan atas (elite), bahkan digunakan juga untuk berbicara dengan sesama orang Indonesia. Dapat dibayangkan besarnya pengaruh kebudayaan Barat itu terhadap orang Indonesia terutama pengaruh bahasa Belanda. Bahkan dapat dikatakan atau di anggap orang pada waktu itu bahwa orang tidak terpelajar kalau tidak dapat berbahasa Belanda. Sebaliknya orang yang dapat mempergunakan bahasa Belanda dianggap selalu terpelajar. Oleh karena itulah golongan atas (elite) senang mempergunakan bahasa Belanda.

Adapun pengaruh kebudayaan Jepang hampir tidak ada. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang orang masih mempergunakan bahasa Jepang, tetapi setelah Jepang menyerah orang tidak lagi mempergunakan bahasa Jepang. Malahan golongan elite masih senang memakai bahasa Belanda meskipun pemerintah kolonial Belanda sudah tidak ada lagi di bumi Indonesia.

b. Kehidupan Budaya Masyarakat Secara Garis Besar Sejak Zaman Prasejarah Hingga Zaman Dewasa Ini.

1) *Zaman Prasejarah*

Keadaan dan situasi zaman Prasejarah dari Kalimantan Barat belum banyak yang diketahui. Keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang hal ini yang sangat penting untuk bahan penyelidikan sangat sulit didapatkan, walaupun ada harus dicari interpretasinya dan memerlukan pengupasan lebih lanjut. Juga benda-benda peninggalan yang berasal dari zaman ini yang dapat dipakai sebagai bukti kebenaran dari keterangan-keterangan yang sudah didapatkan, masih sangat sedikit yang diketahui.

Karena hal-hal inilah sulit untuk menentukan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari Kalimantan Barat pada zaman Prasejarah.

Apakah Kalimantan Barat pada masa itu sudah dihuni orang dan bagaimana corak kebudayaannya, memang masih merupakan pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan pasti. Berdasarkan hasil riset ke daerah hulu Kapuas yang pernah dilakukan oleh Tim Riset dari "Proyek Riset Penggalian/Penyusunan Data-data Ethnografis, Historis dan Archeologis Kalimantan Barat" pada pertengahan 1971 dan telah berhasil menemukan

benda-benda purbakala di daerah Nanga Belang di Kabupaten Kapuas Hulu juga di Kabupaten Sintang; yang diperkirakan adalah benda-benda peninggalan zaman Neolitikum (Stone Age/Zaman Batu) antara lain berupa kapak batu, pecahan-pecahan periuk tanah, maka kemungkinan besar di zaman itu Kalimantan Barat sudah dihuni oleh manusia.

Zaman Neolitikum ini berlangsung \pm 1500 tahun B.C. atau menurut Moh. Yamin dalam bukunya "6000 tahun Sang Merah Putih" sekitar 6000 tahun B.C. sampai 4000 tahun B.C. Jadi kalau demikian berdasarkan pendapat yang terakhir diperkirakan semenjak \pm 7000 tahun yang lampau di pedalaman Kapuas Kalimantan Barat sudah didiami manusia. Ini diperkuat dengan bukti adanya sumber-sumber garam (zoute bromen) yang memang diperlukan oleh kehidupan manusia yang terdapat antara lain di Naga Belang dan Nanga Sepauk. Juga melihat letak Kalimantan Barat yang tidak jauh dari laut yang tentunya sudah semenjak dahulu merupakan jalan lalu lintas perairan yang ramai, tidak mustahil jauh sebelum Tarikh Masehi daerah ini sudah dihuni manusia.

Bukti selanjutnya tentang sudah adanya peradaban manusia di Kalimantan Barat semenjak zaman Prasejarah yaitu dengan dijumpainya beberapa gua batu (antara lain terdapat di daerah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu dan juga bukit-bukit batu di pedalaman Kalimantan Barat yang kemungkinan besar merupakan bekas-bekas tempat tinggal orang-orang di zaman itu.

2. *Zaman Kuno*

a) Adanya pengaruh Hindu dan Hindu Jawa dibuktikan dengan ditemukan beberapa peninggalan yang bercorak kehinduan antara lain :

1) Lingga (*phallus*), merupakan salah satu lambang dari Agama Hindu Ciwa, diketemukan di daerah-daerah :

- Nanga Belang, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sintang, dibekas istana Sintang bentuknya besar dan karena puncaknya menyerupai buah labu kundur, maka oleh penduduk setempat disebut "*Batu Kundur*".
- Nanga Sepauk, disebut "*Batu Kalbut*" (Kalbut adalah nama semacam kopisah) yang menurut ceriteranya sebab dinamai demikian karena pada zaman dahulu batu/lingga tersebut sering dipakai untuk tempat meletakkan kopiah/Kalbut Aji Melayu pada waktu menyabung ayam di dekat tempat itu. Di salah satu muka/sisi batu tersebut relief yang diperkirakan adalah muka qiwa, sehingga lingga tersebut dinamakan *Ekamuka Ciwa Lingga*.

- Seberang Sungai Sepauk, disebut Ciwa Lingga (tidak bere-lief).
- 2) Patung Ciwa dari Perunggu, terdapat di Kampung Temiang Ampakan di hulu sungai Sepauk, Kabupaten Sintang. Oleh penduduk setempat digelari "*Patung Kampat*" nama dari isteri Aji Melayu. Aji Melayu adalah pendiri Kerajaan Sintang dan penganut Agama Hindu Ciwa atau "*Gusar*". Digelari Gusar karena seolah-olah patung tersebut menjadi marah/gusar ketika akan dipindahkan/diambil, sehingga menyebabkan hujan lebat dan air pasang. Itulah sebabnya sampai sekarang pa-tung perunggu yang tingginya $\pm \frac{1}{2}$ meter dan bertangan empat itu tetap berada di tempatnya, berhubung penduduk setempat tidak berani mengusiknya.
 3. Sebuah kuburan di Nanga Sepauk di dekat kampung Pari-Empahan diketemukannya batu kalbut. Dikatakan sebagai ku-buran Aji Melayu pendiri Kerajaan Hindu di Sintang.
 4. Sebuah bukit/gundukan tanah yang berada di dekat letak batu Kalbut (di Nanga Sepauk), diperkirakan sebagai tempat pe-ninggalan Aji Melayu. Selain itu ada pendapat yang mengata-kan bahwa orang-orang Hindu menyebarkan agamanya, di Kalimantan Barat dilakukan sambil berdagang. Sekitar tahun 977 pengaruh Hindu sudah masuk di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya terkenal kerajaan Tanjungpura, yang lokasinya berada di Kabupaten Ketapang (di dekat Sungai Pawan) me-rupakan kerajaan tertua yang pada mulanya bercorak ke-hinduan (\pm Abad ke 13–14). Bukti yang memperkuat bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu, bahwa pada zaman Kerajaan Majapahit (Raja Hayam Wuruk) nama Kerajaan Tanjungpura pernah disebut mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Majapahit.
- b. Adanya pengaruh Budhisme, dibuktikan dengan suatu peninggalan "*batu pahat*" yang diperkirakan bercorak Budhisme berbentuk sebunghkah batu berukuran 4 x 4 meter pada dindingnya memuat tulisan (mungkin tulisan *Pallawa Cautha*). Diketemukan di Kam-pung Pakit, kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sanggau, dan di-perkirakan berasal dari abad ke-5, Penyelidikan mengenai Batu Pahat ini terus dilakukan dan sedang dicari hugungannya dengan batu bersurat yang agak serupa yang diketemukan di Sungai *Begawan State of Brunai* (Serawak).

c. Selain benda-benda, keterangan-keterangan tersebut di atas yang menunjukkan adanya pengaruh Hinduisme dan Budhisme masih terdapat benda-benda peninggalan kuno yang sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti apakah juga merupakan salah satu peninggalan dari agama-agama tersebut antara lain :

- “*Kolam mandi Puteri Asu*” di Nanga Sepauk.
- “Batu Belian”, berupa sebuah batu yang hampir menyerupai bentuk manusia (mungkin sebuah patung), terapat di Nanga Sepauk, dekat beradanya batu Kalbut
- “Lawang Kuari”, berupa sebuah gua dan terletak di pedalaman Kabupaten Sintang. (Menurut ceriteranya dahulu merupakan sebuah kerajaan).
- “Batu Sampai” berada di dekat pantai Sungai Sekayam (dekat Kota Sanggau), Berupa sebongkah batu dan berukuran $\pm 2 \times 3$ meter dan memuat tulisan.
Dari ceritera-ceritera rakyat (legenda) yang terkumpul, misalnya di Kecamatan Paloh dan Sambas terlihat bahwa kerajaan-kerajaan ditempat tersebut sudah ada sejak zaman Hindu (sebelum Islam).

d. Adanya pengaruh Cina dibuktikan dengan banyaknya benda-benda peninggalan yang berasal dari Negeri Tiongkok antara lain benda-benda keramik yang berupa guci-guci, piring-piring, pot-pot bunga.

Hubungan dengan bangsa Cina ini sudah sejak lama dilakukan kira-kira sekitar abad ke VI (ekspedisi Ceng Ho), terjalin hubungan baik terbukti dengan banyaknya orang-orang Cina menetap di Kalimantan Barat.

Peninggalan-peninggalan lainnya yang berupa : sampan membatu, barang-barang tembikar (keramik) dapat dijumpai antara lain di Gunung Batu Bejamban (Kabupaten Sambas), Pulau Karimata, di Gunung Beruang (Kabupaten Pontianak), membuktikan bahwa pengaruh bangsa Cina di Kalimantan Barat sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu.

3. *Kedatangan Islam*

Pengaruh dan masuknya agama Islam di Kalimantan Barat bersamaan juga dengan masuknya agama ini di daerah-daerah lain di Indonesia (sekitar abad ke-15).

Penyebarannya ke daerah Kalimantan Barat anatara lain lewat Palembang, sebagaimana melalui Berunai (Kalimantan Utara) dan ada yang langsung dari Tanah Arab. Penyebaran agama Islam telah berhasil mema-

suki keraton Raja-raja di Kalimantan Barat, dalam usahanya mengajarkan ajaran-ajaran (dakwah-dakwah) ataupun dilakukan sambil berdagang.

Apalagi melihat letak Kalimantan Barat yang strategis, sering dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang asing, tak mustahillah kalau pengaruh asing, juga agama Islam dapat mudah diterima oleh sebagian besar penduduknya. Juga dikarenakan sikap mereka yang pandai menyesuaikan diri dengan penduduk setempat dan pejabat-pejabat kerajaan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perkawinan-perkawinan dengan keluarga raja ataupun rakyat setempat. Pada mulanya agama ini tersebar di kalangan rakyat di daerah-daerah pesisir yang kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah pedalaman. Sebagian dari pembawa agama ini dikarenakan pandainya membawa diri ada yang kemudian diangkat sebagai pejabat di daerah atau kerajaan sehingga dengan demikian lebih memudahkan penyebaran agama Islam di daerah Kalimantan Barat ini. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat seiring dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di daerah ini, sebagian ada yang tadinya merupakan kerajaan Hindu setelah terpengaruh ajaran agama Islam yang kemudian dipelopori rajanya sebagai pemeluk Islam, sehingga berubahlah kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam.

Hal ini diperkuat dengan adanya peninggalan istana-istana kerajaan di Kalimantan Barat yang masih ada umumnya bercorak ke Islam.

Adapun kerajaan-kerajaan yang berkembang pada zaman Islam tersebut antara lain :

a) *Kerajaan Tanjungpura*

Menurut ceriteranya kerajaan ini diperintah oleh keturunan dari Junjung Buih dan Prabu Jaya (keturunan Raja Majapahit). Sebelum zaman Islam kerajaan ini juga sudah terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di Kalimantan Barat. Bahkan mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit (pada zaman Raja Hayam Wuruk dengan Patihnya Gajah Mada). Dan baru di sekitar abad ke-16 kerajaan ini mengenal agama Islam yang dikembangkan oleh *Syech Husin* (pendatang dari Arab) pada masa pemerintahan Raja *Giri Kesuma*.

Dan kemudian Syech Husin ini dikawinkan dengan Saudara sepupu raja yang kemudian menurunkan raja-raja Islam di Tanjungpura antara lain :

- Sultan Aliuddin
- Sultan Zainuddin
- Sultan Drilaga
- Sultan Zainuddin II, (pada zaman/masa pemerintahan raja ini pada abad XVIII ibukota kerajaan di hulu Sungai Pawan berpindah tempat tetapi masih tetap di tepian sungai Bawan).

Selanjutnya, kerajaan Tanjungpura^{12a)} ini dianggap sebagai pusat pendidikan agama Islam yang pertama di Kalimantan Barat, terkenal salah seorang Guru Agama Islam dari Arab Syech Magribi.

b) *Kerajaan Sukadana* ^{12b)}

Mengalami perkembangannya pada abad ke 17–18 dengan salah seorang rajanya yang terkenal Sultan Kamaluddin.

c) *Kerajaan Simpang* ^{12c)}

Sebagai Raja pertama dari kerajaan ini yakni *Pangeran Ratu Agung* putera Sultan M. Zainuddin Raja Tanjungpura. Pangeran Ratu Agung mulai memerintah pada tahun 1735 dan wafat pada tahun 1824. Dan selanjutnya berturut-turut sebagai pengusaha daerah ini diserahkan Sultan Djamaluddin (juga sebagai Raja Kerajaan Tanjungpura), Gusti Asma, Gusti Mahmud.

d) *Kerajaan Mempawah* ^{12d)}

Yang menjadi cikal bakal dari kerajaan ini ialah *Patih Gumentar* yang memerintah kerajaan ini sekitar abad ke-14.

Pada mulanya ibukota kerajaan ini di Mempawah Hulu. Tetapi kemudian pada abad ke-17 ibukotanya dipindahkan ke Phara (Karangan). Pada masa pemerintahan *Upu Daeng Menambun* dipindahkan ke Sebukit Rama yang akhirnya pada pertengahan abad ke-19 pada masa pemerintahan Gusti Jati/Sultan Muhammad Zainal Abidin pusat pemerintahan dibangun di Mempawah sekarang.

e) *Kerajaan Sambas* ^{12e)}

Kerajaan ini didirikan oleh ratu Sepudak (keturunan Majapahit) di Kota Lama terletak ± 36 Km dari Sambas. Mulai dikenal pada abad ke-17 dengan rajanya yang pertama *Sultan Muhamad Sya-feiuddin* (beragama Islam). Semenjak berdirinya Kerajaan ini sudah merupakan kerajaan Islam. Selain terkenal sebagai kerajaan Islam, Sambas juga dikenal sebagai *kota Kongsi Cina*. Ada beberapa kongsi Cina yang bergerak di bidang perdagangan yang selalu bersaing seperti kongsi *Thai Kong* dan *Sam Thiu Kiau*, sehingga mengakibatkan perang saudara antara kedua kongsi tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1795.

12a) T.U. Lontaan, *op.cit.* hal. 82 – 90

12b) *Ibid*, hal. 100 – 101

12c) *Ibid*, hal. 106 – 107

12d) *Ibid*, hal 119 – 124

12e) *Ibid*, hal. 133 – 138

f) *Kerajaan Landak*^{12f)}

Sebagai raja pertama dari kerajaan ini ialah Raden Ismahayana yang memerintah sekitar tahun 1472-1542 dan setelah menganut agama Islam dikenal dengan gelar Abdulkahar. Beliau adalah keturunan dari Pulang Pali VII (Brawijaya VII, mungkin keturunan Raja Majapahit) yang kawin dengan puteri Kalimantan Dara Hitam.

Dan karena lokasinya di tepi sungai Landak maka dinamai Kerajaan Landak.

Dalam sejarah, kerajaan ini terkenal suatu lakon yang berki-~~sah~~ tentang Intan Kobi, yaitu intan pusaka kerajaan Landak yang sekitar abad ke 17 diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Landak dan Sukadana.

g) *Kerajaan Tayan*^{12g)}

Raja-raja yang memerintah kerajaan ini merupakan keturunan pendiri kerajaan Tanjungpura (putera Brawijaya dari Majapahit). Adapun pendiri kerajaan ini ialah Gusti Likar dan pemegang kerajaan terakhir tahun 1960 ialah Gusti Ismail dengan gelar :
PANEMBAHAN PAKU NEGARA.

h) *Kerajaan Meliau*^{12h)}

Pendiri dari kerajaan ini tidak diketahui dengan jelas, sedang raja terakhir yang memerintah pada tahun 1905 adalah Gusti Tamjid Pangeran Ratu merangkap sebagai Raja Meliau.

i) *Kerajaan Sanggau*¹²ⁱ⁾

Cikal bakal dari kerajaan ini ialah : Dara Nante yang bersuami-kan Baboi Cinga. Mula-mula ibukota pemerintahan di Sanggau, tetapi pada waktu pemerintahan Dayang Mas berpindah ke Mengkiang dan akhirnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Djamaluddin dipindahkan ke Kota Sanggau sekarang.

Sebagai bukti bahwa kerajaan ini kemudidan juga merupakan kerajaan Islam yang besar yaitu dengan didirikannya Mesjid Jami' pada masa pemerintahan Sultan Ayub Paku Negara (1825-1830), dan sampai sekarang mesjid ini masih ada.

12f) *Ibid*, hal. 154 - 159

12h) *Ibid*, hal. 167 - 169

12g) *Ibid*, hal. 163 - 166

12i) *Ibid*, hal. 170 - 175

j) *Kerajaan Sekadau*^{12j)}

Mula-mula pusat kerajaan berada di Keluaten kemudian dipindahkan ke Sekadau di Kampung Sungai Baru. Raja-raja yang memerintah kerajaan ini adalah keturunan Prabu Jaya dan keturunan Raja Siak Bulun.

Di Sekadau ini masih ada peninggalan mesjid kuno yang dapat menjadi bukti bahwa agama Islam di Kerajaan ini dahulu juga mendapatkan posisi yang kuat.

k) *Kerajaan Sintang*^{12k)}

Kerajaan ini merupakan perkembangan dari kerajaan Sepauk, yang ada sebelum kedatangan agama Islam dan pernah berkembang pada masa pemerintahan Aji Melayu dan permaisurinya Putung Empat.

Baru pada pemerintahan Demang Irawan yang bergelar Jubair I pusat pemerintahan dipindahkan ke Sintang. Dalam perhubungan selanjutnya dari kerajaan ini dapat diketahui juga bahwa raja-rajanya kemudian memeluk Agama Islam.

l) *Kerajaan Kubu*^{12l)}

Pendiri kerajaan ini yakni Syarif Idrus, seorang pemuka agama Islam dari Hadramaut. Semenjak berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan Islam (± 1720).

m) *Kerajaan Pontianak*^{12m)}

Pendiri kerajaan ini yakni *Syarif Abdurrachman* pada tanggal 23 Oktober 1771. Dia adalah keturunan Al Habib Husin pemuka agama Islam dari Negeri Arab. Dia kawin dengan anak puteri raja Mempawah (opu Daeng Menambun) yang bernama Utin Tjandramidi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang besar dan terakhir di Kalimantan Barat. Di pusat kerajaan di kota Pontianak sampai sekarang berdiri dengan megahnya sebuah mesjid Jami ' yang dibangun bersamaan waktunya dengan berdirinya kerajaan ini.

12j) *Ibid*, hal 179 – 180

12k) *Ibid*, hal 191 – 202

12l) *Ibid*, hal. 217 – 226

12m) *Ibid*, hal. 232 – 237

4) *Kedatangan Bangsa Barat*

a. *Bangsa Belanda*

Pada awal abad ke 17 Belanda dengan VOC-nya mulai berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Pada mulanya hubungan dilakukan dalam rangka hubungan dagang, tetapi selanjutnya setelah mengetahui keadaan daerah di Kalimantan Barat yang nampaknya dapat mendatangkan keuntungan Belanda bermaksud pula mengembangkan Imperialismenya di Kalimantan Barat. Pada tahun 1604 Belanda tiba di Kerajaan Tanjungpura dengan maksud mengadakan hubungan dagang yaitu ingin membeli intan Kobi (intan pusaka Kerajaan Landak).

Intan tersebut pada masa itu ada di Tanjungpura sebab adanya hubungan baik antara Tanjungpura dan Landak, pada masa pemerintahan Ratu Mas Jaiton dari Sukadana.

Setelah diketahui oleh raja dan rakyat bahwa Belanda dengan VOC nya akan menanamkan kekuasaannya di daerah Kalimantan Barat dan juga merasakan betapa menderitanya hidup dalam tangan penjajahan, maka timbullah pemberontakan-pemberontakan dengan tujuan mengusir penjajahan Belanda dari Kalimantan Barat.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain terjadi di :

- a. Sukadana pada tahun 1822, Belanda dipimpin oleh G. Muller bermaksud menduduki Sukadana tetapi mendapat perlawanan Raja Mursiddin yang memerintah pada masa itu. Akan tetapi akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan keluarga raja.
- b. Tumbang Titi pada tahun 1914, terjadi perlawanan rakyat kerajaan Matan/Tanjungpura terhadap Belanda yang disebabkan rakyat keberatan untuk membayar pajak kepada Belanda. Pusat pertahanan rakyat berada di Tumbang Titi, itulah sebabnya perang ini lebih dikenal dengan sebutan "*Perang Tumbang Titi*". Di pihak rakyat dipimpin oleh Uti Usman/Uti Unggal, Uti Makhmud, Daeng Uti Tentamah. Sedang di pihak Belanda dipimpin oleh Fredrik Alexander Brons. Perang ini berakhir dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Belanda. Sedang di pihak pasukan rakyat Matan/Tanjungpura salah seorang pimpinannya yaitu Tentamah juga mati tertembak. Tetapi perang ini dapat berhasil membobolkan pertahanan Belanda di Matan.
- c. Di Kerajaan Simpang, Perlawanan terhadap Belanda terjadi pada masa pemerintahan Raja Gusti Panji (tahun 1902 - tahun 1920), dikarenakan rakyat tidak mampu membayar pajak yang dibebankan oleh Belanda.

Dalam peperangan ini rakyat Simpang dipimpin oleh Anjang Semah, sedangkan Belanda dipimpin oleh Letnan Obos. Pertempuran terjadi di sekitar tempat yang bernama Belangkai. Peperangan ini berakhir dengan gugurnya Ki Ajeng Samad, sehingga pihak Belanda yang mendapat kemenangan. Tetapi rakyat tetap tidak mau/lebih menderita di bawah kekuasaan Belanda sehingga akhirnya banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan.

- d. Di Mempawah perlawanan terhadap Belanda dimulai semenjak pemerintah Adiwijaya Kesuma Jaya (\pm tahun 1780). Seringkali terjadi pertempuran-pertempuran yang kadang-kadang dipiminnya sendiri (Panembahan Adiwijaya terkenal sebagai orang yang anti penjajahan) antara lain terjadi di Galah Hirang, Sebukit Rama dan Sangking.

Perlawanan terhadap Belanda masih tetap dilanjutkan pada waktu pemerintahan putranya Sultan Muhammad Zainal Abidin dan telah berhasil membebaskan daerah-daerah yang tadinya dikuasai Belanda.

- e. Dikerajaan Landak
Setelah raja-raja Landak merasa dirugikan oleh imperialis Belanda, karena sudah tidak dapat menahan diri lagi, mereka memimpin rakyatnya untuk melawan imperialisme Belanda. Pemberontakan yang terkenal di bawah pimpinan : Ratu Adi tahun 1831, Gusti Kandut tahun 1890, Gusti Abdurrani tahun 1899. Tetapi pemberontakan-pemberontakan ini tidak dapat berhasil mematahkan kekuasaan penjajahan Belanda.

- f. Di Kerajaan Sintang

Belanda mulai datang ke kerajaan ini sekitar tahun 1820. Tetapi karena tindakan-tindakan Belanda selanjutnya dirasakan sangat merugikan raja dan rakyat maka kemudian juga perlawanan-perlawanan.

Perlawanan rakyat di Sintang antara lain dipimpin oleh :

Ratu Kesuma Idris (wafat tahun 1857).

Pangeran Kuning (wafat tahun 1857).

Pangeran Muda (wafat tahun 1860).

Pangeran Mas (tahun 1867).

Abang Kadri (tahun 1869).

Selain itu terkenal peperangan-peperangan melawan Belanda di Sintang yang dianggap sangat membahayakan pihak Belanda, yakni :

- Perang Tebidah (tahun 1890) dipimpin oleh Nata, Apang Labring, Apang Daung, Apang Rabat.
- Perang Padung (Perang Messiku) tahun 1874.
- Perang Melawi tahun 1880 dipimpin oleh Raden Paku.
- Perang Panggi tahun 1908 dipimpin oleh Panggi.
- Perang Apang Semangai dipimpin oleh Apang Semangai.

g. *Kerajaan Kubu*

Pertentangan terhadap Belanda dimulai pada waktu pemerintahan Syarif Muhammad, pada masa itu Belanda berhasil mengadakan perjanjian perdamaian yang sebetulnya merugikan kerajaan dan rakyat.

h. *Bangsa Inggris*

Bangsa Inggris dengan E I C nya juga berhasil mendirikan Kantor dagangnya di Matan (kerajaan Tanjungpura) sekitar permulaan abad-17, tetapi karena mendapat saingan yang berat dari VOC maka Inggris tidak dapat bergerak dengan leluasa di Kalimantan Barat ini.

Pada Tahun 1812 terjadi peperangan antara tentara Inggris dengan kerajaan Sambas. Inggris berhasil memasuki sebuah kota dan kemudian membakar sebuah kampung.

5) *Zaman Jepang*

Setelah Jepang dapat menaklukkan kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1942, maka otomatis kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

Kedatangan Jepang ke Kalimantan Barat selain mengendorkan kekuasaan imperialisme Belanda di daerah ini, mengakibatkan keadaan rakyat yang sudah menderita pada waktu penjajahan Belanda menjadi lebih menyedihkan. Tindakan-tindakan serdadu Jepang sangat kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan. Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat mengakibatkan berakhirnya sebagian besar pemerintahan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, Ini disebabkan sebagian besar raja-raja yang tidak mau tunduk beserta keluarganya dan kemudian berhasil ditangkap langsung dibunuh sehingga mengakibatkan kacau balaunya pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Penangkapan dan pembunuhan terhadap raja-raja dan pejabat kerajaan oleh Jepang yang dilakukan dengan sangat kejamnya dikenal dengan istilah : “*Penyungkupan*”. Adapun raja-raja/pejabat-pejabat yang menjadi korban keganasan Jepang anatara lain :

- Gusti Jafar dan Gusti Mahmud, raja uan putra mahkota kerajaan Tayan.
- Pangeran Mas, raja kerajaan Matan (Tanjungpura).
- Tengku Idris, raja Sukadana.
- Gusti M.Arif, raja Sanggau.
- Gusti Kelip, raja Sekadau.
- Syarif Muhammad Alkadrie Sultan ke-6 kerajaan Pontianak.

Pada waktu kekuasaan jepang terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa *MANDOR* pada tahun 1944. Peristiwa ini terjadi di Mandor, Kabupaten Pontianak dimana Jepang melakukan pembunuhan massal terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan rakyat yang menentanginya dan telah berhasil ditangkap. Tempat pembunuhan dan penguburan pejuang-pejuang bangsa tersebut sampai sekarang dipelihara dengan baik.

Selain terkenal dengan tindakan-tindakannya yang sangat kejam, selama di Kalimantan Barat Jepang telah berhasil merampas harta kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang berupa barang-barang perhiasan dan senjata-senjata yang juga telah memusnahkan dokumen-dokumen dari kerajaan-kerajaan di daerah ini. Tindakan ini sangat merugikan rakyat Kalimantan Barat pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

6. *Revolusi*

Setelah Jepang takluk di bawah Sekutu, mengakibatkan Belanda mendapatkan jajahan-jajahannya kembali antara lain daerah-daerah di Indonesia.

Pada waktu itu Belanda bangkit lagi dengan NICA nya di daerah-daerah yang sudah hilang akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Usaha ini tidak dapat mudah dilakukan karena rakyat sudah bosan hidup ditangan penjajah dan bertekad untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaannya.

Di Kalimantan Barat Belanda juga bermaksud untuk berkuasa dengan mencampuri pemerintahan di daerah-daerah/ kerajaan-kerajaan yang sudah mulai merasa agak lapang dengan jatuhnya Jepang.

Rakyat di Kalimantan Barat juga bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya yang telah diperoleh Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga timbul pemberontakan-pemberontakan rakyat terhadap Belanda/NICA. Anantara lain terkenal : Pmeberontakan/Perjuangan Merah Putih yang terjadi sekitar tahun 1945 di Nanga Pinoh (Sintang) dan penyerangan tangsi Belanda di kota Sambas pada tahun 1946.

Republik Indonesia

Setelah Indonesia berbentuk sebagai Negara Republik, keadaan ini juga membawa perkembangan di Kalimantan Barat, kerajaan-kerajaan kemudian menjadi daerah-daerah Swapraja dan kemudian baru sekitar pada pertengahan abad ke-20 (1958–1960) daerah-daerah Swapraja menyerahkan pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Kalimantan Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/6/10 tanggal 8 September 1951 Kalimantan Barat, terbagi menjadi 6 Kabupaten dan Kotamadya, yakni Kabupaten-kabupaten : Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dan Kotamadya Pontianak.

Mulai tanggal 1 Januari 1957 dengan Surat Keputusan Nomor : Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, Kalimantan Barat berstatus Propinsi Otonom.

Peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada masa ini ialah pembrontakan PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak) atau juga menamakan dirinya Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara). Gerakan ini merupakan gerakan yang berhaluan politik Komunis dan dianggap terbentuk sebagai ekor/kelanjutan dari peristiwa G.30.S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965.

Kegiatan gerakan ini bermaksud untuk melemahkan dengan mengancam kehidupan rakyat di daerah-daerah perbatasan.

Selain dari orang-orang PKI yang memegang peranan penting dalam gerakan ini adalah orang-orang Cina yang sebagian besar tergabung dalam GTK (*Gabungan Tjina Komunis*). Dalam gerakan PGRS/Paraku ini terkenal salah seorang pemimpin yang sangat tangguh yaitu: S.A. Sofian yang baru ditangkap dalam usaha untuk menumpas gerakan ini dilancarkan oleh KODAM XII/Tanjungpura dengan bantuan pasukan-pasukan dari kesatuan-kesatuan Diponegoro, Siliwangi dan Brauwijaya dalam Operasi-operasi Tertibnya dan *Operasi-operasi Sapu Bersih (Saber)*, juga Operasi Laksus.

Pada masa ini juga muncul suatu gerakan "*Gerakan Demonstrasi Rakyat Desa*" yang dilancarkan pada tahun 1967 yang bertujuan mengusir orang-orang Cina di daerah pedalaman.

Adanya gerakan ini membantu kelancaran usaha pemerintah dalam menumpas PGRS/Paraku.

Setelah otak dari gerakan PGRS/Paraku ini (S.A. Sofian) berhasil ditangkap dan tertembak mati, kegiatannya juga nampak mundur, tetapi usaha untuk menumpasnya masih dilaksanakan sampai sekarang

c. Puncak-puncak Budaya yang pernah terjadi di daerah Kalimantan Barat pada masa lampau.

Telah diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat sebelum kedatangan agama Islam belum sempat berdiri dengan kuat dan leluasa telah dipengaruhi atau didominasi oleh kerajaan atau bangsa lain.

Kerajaan Tanjungpura misalnya baru dalam tahap berkembang telah dikuasai oleh Kerajaan Kediri. Dalam kitab *Chu fan Chi* yang ditulis oleh *Chau Yu Kua* (1225) yang mengisahkan tentang keadaan kerajaan Kediri, yang ditulisnya waktu Chau Yu Kua mengunjungi Kerajaan Kediri, disebut kan tentang daerah jajahan kerajaan Kediri. Salah satu daerah jajahan kerajaan Kediri itu disebutkan *Tanjung wu - la* yang ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai kerajaan Tanjungpura di Daerah Kalimantan Barat.¹³⁾ Dari bukti ini menunjukkan bahwa baru dalam tahap perkembangan kerajaan Tanjungpura telah dikuasai oleh kerajaan lain. Kemudian setelah Kerajaan Kediri menguasai kerajaan Tanjungpura diganti oleh kerajaan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada dengan angkatan lautnya yang kuat. Bahkan kerajaan Majapahit tidak hanya menaklukkan kerajaan Tanjungpura tetapi juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di pantai laut di sebelah Barat sampai ke pantai-pantai sungai Kapuas dari hilir sampai ke bagian hulu.

Hal ini telah diuraikan pada halaman terdahulu. Kerajaan yang didominasi oleh kerajaan lain berarti harus menyerahkan sebagian dari kekayaannya atau upeti kepada kerajaan yang menaklukkan. Kerajaan yang ditaklukkan juga tidak dibiarkan kuat dan kaya karena kalau dibiarkan dapat membahayakan kerajaan yang menaklukkan. Oleh karena itu kerajaan yang ditaklukkan tidak mungkin mengalami kejayaan atau puncak budaya yang tinggi.

Demikian juga kerajaan Mempawah mempersatukan diri di bawah kekuasaan Majapahit pada masa pemerintahan Patih Gumantar¹⁴⁾ Kerajaan Landak dipersatukan pada akhir abad ke-15¹⁵⁾. Di sepanjang sungai Kapuas seperti Kerajaan Tayan, Kerajaan Meliau, Kerajaan Sanggau, Kerajaan Sekadau dan Kerajaan Sintang, juga dipersatukan. Kerajaan Sambas, kerajaan Pontianak dan Kerajaan Kubu belum berdiri pada waktu itu. Akibatnya di Kalimantan Barat terdapat kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil yang tidak kuat dan tidak sebuah kerajaan pun dapat mempersatukannya menjadi satu kerajaan.

Baru setelah Majapahit runtuh dan agama Islam datang, kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat bebas dari dominasi kerajaan dan bangsa lain sampai VOC datang dan pemerintah Hindia Belanda memperkuat kedudukan atau kekuasaannya di Kalimantan Barat.

Di Kerajaan Sukadana, kelanjutan dari kerajaan Tanjungpura Pemerintahan Hindia Belanda datang tahun 1827 dan menduduki kerajaan itu.¹⁶⁾ Di Kerajaan Mempawah Belanda dapat berkuasa sekitar 1831¹⁷⁾

13) Drs. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Djilid II, Penerbit Nasional Trikarya, Djakarta, tahun 1959, hal 54.

14) J.U. Lontaan, *op.cit.* hal. 119.

16) *Ibid.*, hal. 103

15) *Ibid.*, hal. 154

17) *Ibid.*, hal. 128 - 129

Di Kerajaan Sambas Pemerintah Hindia Belanda dapat bercokol tahun 1815 yang mengadakan perjanjian perdagangan dan mendirikan sebuah loji di tepi sungai Teberau di seberang istana Sultan.¹⁸⁾ Belanda menguasai kerajaan Landak pada permulaan abad ke-19.¹⁹⁾ Kerajaan Tayan menandatangani kontrak (*korte verklaring*) dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 12 Nopember 1822.²⁰⁾ Kerajaan Meliau dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1866.²¹⁾ dan tahun 1890 kerajaan Meliau digabungkan dengan kerajaan Tayan.²²⁾ Di kerajaan Sanggau Pemerintah Hindia Belanda dan mulai berkuasa pada tahun 1875.²³⁾ Kerajaan Sekadau diduduki oleh Belanda juga sekitar abad ke-19.²⁴⁾ Di kerajaan Sintang Pemerintah Hindia Belanda menyerbu tahun 1822.²⁵⁾

Kerajaan Kubu menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1780.²⁶⁾ sedangkan kerajaan Pontianak dengan sultannya yang pertama yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Bin Syarif Husin Alkadri menanda tangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 5 Juli 1779.²⁷⁾

Sejak bebasnya kerajaan-kerajaan tersebut dari kekuasaan Majapahit sampai datangnya Belanda, kerajaan-kerajaan tersebut merdeka dan bebas dari kekuasaan asing. Namun pada waktu itu juga tidak ada sebuah kerajaan yang dapat mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Daerah Kalimantan Barat.

Kerajaan-kerajaan lain memang cukup lama merdeka dan masa itulah kerajaan itu mengalami masa budaya yang mencapai puncaknya kalau dibandingkan dengan masa-masa lainnya, kecuali kerajaan Pontianak dan kerajaan Kubu sebentar sekali mengalami kemerdekaan.

Tetapi meskipun demikian mereka juga mengalami puncak budaya yaitu sebelum mereka menandatangani *korte verklaring* dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya keraton-keraton yang didirikannya cukup megah dan daerah kekuasaannya cukup luas. Tetapi setelah Pemerintah Hindia Belanda datang ke masing-masing kerajaan tersebut dengan memaksa menandatangani *korte verklaring* maka kerajaan-kerajaan itu mulai pudar dan harus menyerahkan upeti kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

18) *Ibid.*, hal. 139

19) *Ibid.*, hal. 162

20) *Ibid.*, hal. 164

21) *Ibid.*, hal. 168

22) *Ibid.*, hal. 165 dan 169

23) *Ibid.*, hal. 175

24) *Ibid.*, hal. 180

25) *Ibid.*, hal. 202

26) *Ibid.*, hal. 221

27) *Ibid.*, hal. 233

2. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR

- a. Kehidupan pendidikan di Daerah dari Masa ke Masa Secara Garis Besar. Menurut data yang diperoleh di Daerah Kalimantan Barat pendidikan secara formal diadakan baru pada akhir abad ke-19. Yaitu dengan didirikannya *Volksschool* oleh Missi Katolik di Singkawang tahun 1892 dan di Nanga Sajiram tahun 1894. Sejak itulah sekolah dengan bermacam-macam jenisnya mulai dibuka di daerah ini, Pada tahun 1906 di Singkawang, kota di pantai Utara Kalimantan Barat, juga didirikan *volksschool* oleh Missi Katolik.

Dan di Sintang *Volksschool* didirikan tahun 1907 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di Pontianak *Volksschool* didirikan juga oleh Missi Katolik pada tahun 1910 beberapa tahun setelah pemerintah kolonial Hindi Belanda mendirikan sekolah-sekolah tersebut.

Di samping *Volksschool* pemerintah Hindia Belanda mendirikan pula Sekolah Rendah Kelas satu (I) untuk anak-anak Indonesia dari golongan bangsawan dan elite yang kemudian pada tahun 1914 disebut *Hollandsch Inlandsche School* (H.I.S)

Sekolah yang sama didirikan pula oleh Missi Katolik di Pontianak tahun 1924 untuk golongan Cina yang telah menerima pengaruh kebudayaan Barat, Sekolah ini disebut *Hollandsch Chineesche School* (HCS).

MULO atau *Meer Uitgebred Lager Onderwijs* yaitu setingkat sekolah Menengah Pertama yang pertama didirikan baru menjelang Perang Dunia II

Demikianlah pula lembaga pendidikan yang berdasarkan agama Islam secara formal baru didirikan pada perempatan pertama-abad ke-20. Pada masa ini sudah masuk pengaruh dari Muhammad Abduh dan muridnya Sayyid Rasyid Ridha yang dibawa oleh para pendatang dan perantauan ke Daerah ini.

Pengaruh, gagasan-gagasan dan cita-cita Haji Oemar Said Cokroaminoto dengan Serikat Islamnya telah dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang dari Surabaya.

Di kota Sambas, Ibukota Kerajaan Sambas juga telah didirikan 1868 Sekolah yang berdasarkan ajaran Islam yang didukung oleh Sultan Kerajaan Sambas. Sekolah itu bernama "*Madrasah as Sulthaniyyah*" yang mirip dengan perguruan *Hollandsch Inlandsche School*. Pendirinya adalah Haji M. Basuni Imran yang pernah belajar di Mesir, bersama-sama dengan adiknya Muhammad Fauzi Imran dan beberapa orang lain yang pernah belajar di Mekah. Kemudian Sekolah ini pada tahun 1936 berubah nama menjadi "*Tarbiyatul Islamiyah*" baik organisasi maupun pelajaran yang diberikannya sudah dimodenisir dan mirip dengan *Volksschool* tetapi dengan memasukkan pengajaran agama Islam dalam program pengajarannya.

Di Pontianak di antara sekolah-sekolah agama Islam itu terdapat sekolah agama yang disebut "Al Hasan" yang juga merupakan tempat yang menghasilkan beberapa tokoh yang terkenal sebagai tokoh politik yang beraliran keagamaan di daerah ini.

Sekolah agama Katolik yang khusus untuk mendidik calon-calon Imam (Pastor) yaitu Seminari Menengah didirikan pada tahun 1933 sampai dengan tahun 1941 di Pontianak sebelum Perang Dunia II. Tetapi pada masa pendudukan Jepang sekolah Seminari Menengah ini ditutup. Baru Pada tahun 1949 Seminar ini dibuka lagi tetapi lokasinya dipindahkan ke Nyarumkop, suatu kota pelajar, di sebelah Timur kota Singkawang. Seminari ini bukan didirikan oleh Pastor-Pastor dari Portugis tetapi didirikan oleh Pastor-Pastor dari Negeri Belanda. Di Kalimantan Barat tidak ada sekolah yang dipengaruhi atau didirikan oleh orang Portugis, karena Portugis tidak pernah berkuasa di Daerah ini.

Menjelang jatuhnya pemerintah Hindia Belanda di kota Pontianak, baru ada sekolah lanjutan yaitu Sekolah Dagang (Handelschool) MULO (Sekolah Menengah/Umum/Pertama) Sekolah guru seperti OVVO dan CVO serta Sekolah Pertukangan (Ambachtschool) tetapi Normalschool dan AMS belum ada di daerah Kalimantan Barat sebelum Perang Dunia II.

Pada masa pendudukan Jepang semua sekolah itu ditutup dan diganti dengan sekolah yang diingini oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Kurikulumnyapun berlainan dari kurikulum sekolah pada masa sebelumnya. Jepang ingin menjepangkan generasi muda Daerah Kalimantan Barat. Oleh karena itu Jepang menekankan kurikulum sekolah pada disiplin perang Jepang dan kebudayaan Jepang karena selain ingin menjepangkan generasi muda Daerah Kalimantan Barat Jepang juga ingin memenangkan Perang Asia Timur Raya dengan menarik dukungan rakyat Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang di daerah Kalimantan Barat didirikan Sekolah Indonesia I (satu)²⁸⁾, Sekolah Pertanian, Sekolah semacam SKP dan Sekolah Dagang (Handelsschool) serta Sekolah Menengah yang disebut *Futzu Cuugakkoo*.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Republik Indonesia diproklamasikan maka sekolah-sekolah seperti sebelum perang didirikan lagi seperti MULO, OVVO dan CVO, Handelsschool dan Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar 6 tahun). Kemudian baru dibuka Sekolah Guru Bagain (SGB), SMP yang menggantikan MULO, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Guru Atas (SGA).

28) Sama dengan Sekolah Rakyat 6 tahun (hasil wawancara dengan Drs. Samza, bulan Pebruari 1981.

Selain daripada itu masa Republik juga telah dibuka sekolah sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Tehnologi Menengah Atas (STMA), Sekolah Teknik Pertama (STP) atau sekarang disebut ST (Sekolah Teknik), SKP (Sekolah Kepandaian Putri), SKKA (Sekolah Kepandaian Kesejahteraan Atas), SMOA (Sekolah Menengah Olah Raga Atas) berubah menjadi SGPO, yang kemudian diubah lagi menjadi SGO (Sekolah Guru Olah Raga), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Dan PGAP Pendidikan Guru Agama Pertama serta Pendidikan Guru Agama (Islam) Atas (PGAA) yang kemudian keduanya digabung menjadi Pendidikan Guru Agama (Islam) Negeri atau PGAN.

Ambachtschool juga terus dibina oleh Missi Katolik di Pontianak dan Singkawang yang dimulai pada tahun 1913.

Kemudian didirikan Sekolah Menengah Perintis Pembangunan. Tetapi karena kurang pengertian dari masyarakat maka sekolah tersebut diubah menjadi SMA Negeri V Pontianak. Sementara itu SGB dan SGA digabung menjadi satu disebut SGA saja pada tahun 1960. Tahun 1964 berubah lagi menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Untuk mendidik kader dalam pamongpraja didirikan kursus yang disebut KDC (Kursus Dinas C) pada tahun 1961, oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat. Sekolah atau kursus ini menerima siswa dari SMP yang sudah menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagai kelanjutannya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tahun 1965 mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Pontianak yang menerima siswa lulusan SMA baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Pada tahap permulaan mengutamakan pegawai lulusan SMA dan KDC yang pegawai Pemerintah Daerah kemudian baru menerima siswa lulusan SMA biasa, bahkan pada mulanya lulusan dari SGA pun diterima juga.

Pada tanggal 20 Mei 1959 didirikan sebuah Universitas di Daerah ini. Mula-mula Universitas ini berbentuk Swasta dan didirikan oleh sebuah Yayasan yang bernama *Yayasan Daya Nasional Universitas* mula-mula bernama Universitas Daya Nasional (UNDANAS) yang mempunyai 2 Fakultas :

1. Fakultas Hukum dan
2. Fakultas Tata Niaga.

Pada tanggal 20 Mei 1963 UNDANAS berstatus Negeri dengan nama Universitas Negeri Pontianak (UNEP) dan meliputi empat Fakultas yaitu :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik

Pada tanggal 14 September 1965 nama Universitas Negeri Pontianak diganti nama menjadi Universitas Dwikora dan pada tahun ini didirikan Fakultas Sosial Politik.

Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1967 sekali lagi Universitas ini mengalami perubahan nama menjadi Universitas Tanjungpura.

Sementara itu pada tanggal 25 Nopember 1964 Pemerintah Daerah mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Pontianak yang mual-mula hanya terdiri dari Fakultas Keguruan yang masih berstatus swasta. Kemudian IKIP ini dinegerikan oleh Pemerintah terhitung tanggal 3 Januari 1965 yang merupakan IKIP Bandung Cabang Pontianak. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1967 ditambah dengan sebuah Fakultas lagi dengan didirikannya Fakultas Ilmu Pendidikan.²⁹⁾ Dekan Koordinator dari 2 (dua) fakultas pada IKIP tersebut ialah Drs. Wan Usman. Tetapi sejak tanggal 1 Januari 1969, IKIP Bandung Cabang Pontianak ini bergabung dengan Universitas Tanjungpura sehingga dengan demikian Universitas ini meliputi 7 Fakultas :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Sosial dan Politik
6. Fakultas Keguruan
7. Fakultas Ilmu Pendidikan

Pada tanggal 3 Agustus 1965 di Pontianak didirikan Fakultas Tarbiyah yang masih berstatus swasta. Dekannya ialah Drs. Malikul Adil. Fakultas Terbiyah ini dinegerikan pada tanggal 6 Agustus 1969 sehingga namanya menjadi Fakultas Tarbiyah. IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Jakarta. Demikian juga di Singkawang didirikan Fakultas Ushulludin pada tanggal 6 Agustus 1969 yang berstatus negeri, sehingga namanya menjadi Fakultas Ushulludin, IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Jakarta. Di kota yang sama juga didirikan Fakultas Hukum Universitas "Tujuh Belas Agustus" (UNTAG) Cabang Jakarta pada tahun 1964 dan masih berstatus swasta.

Pada tahun 1979 di Kota Pontianak didirikan sebuah Akademi yaitu Akademi Pimpinan Perusahaan atau APP yang berstatus swasta.

29) Hasil wawancara dengan Dr. Hadari Nawawi, bekas Dosen FIP. IKIP Bandung Cabang Pontianak yang pertama, tgl. 19 Maret 1981.

b. *Tinjauan ke muka tentang perkembangan pendidikan di daerah.*

Jika melihat pendidikan secara keseluruhan dapatlah dilihat ke depan bahwa pendidikan di Daerah Kalimantan Barat hari depannya cukup baik. Namun meskipun demikian di antara pendidikan yang ada di Daerah Kalimantan Barat masih dapat dirasakan kurangnya sekolah kejuruan. Dalam hal ini perlu ditekankan adalah Sekolah Kejuruan yang Langsung dapat ditampung oleh lapangan kerja dalam masyarakat. Seperti misalnya Sekolah Asisten Apoteker (SAA) yang belum ada di Kalimantan Barat guna memenuhi kebutuhan apotek-apotek yang sudah cukup banyak. Demikian juga Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) perlu didirikan mengingat sekarang koperasi di seluruh Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah. Lulusan sekolah inilah kiranya yang berkompetensi dalam mengelola koperasi-koperasi yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya tenaga yang trampil tersebut, maka terdapat salah satu faktor yang mendorong keberhasilan dalam mengelola koperasi yang sedang digalakkan pemerintah sekarang.

Dalam masa pembangunan ini terutama pembangunan ekonomi, maka Sekolah Industri Menengah Atas juga perlu didirikan di Kalimantan Barat untuk mendorong baik kuantitas maupun kualitas hasil industri, terutama industri kecil sehingga dapat dijangkau harganya oleh masyarakat luas.

Demikian beberapa contoh sekolah kejuruan yang masa datang perlu didirikan di Daerah Kalimantan Barat yang out - putnya langsung dapat ditampung dalam masyarakat. Selain dari itu tentu masih ada sekolah kejuruan lain yang perlu didirikan di Daerah Kalimantan Barat. Hal ini tergantung kepada lapangan kerja mana yang memerlukan tenaga kerja yang lebih trampil dari semula.

Dari segi lain dapat dilihat akibat pendirian SD Inpres di pedesaan. Jelas pendirian SD Inpres ini menambah lebih banyak Sekolah Dasar yang dapat menampung anak-anak usia sekolah baik di kota maupun di desa terutama.

Dari segi lain dapat dilihat akibat pendirian SD Inpres di pedesaan. Jelas pendirian SD Inpres ini menambah lebih banyak Sekolah Dasar yang dapat menampung anak-anak usia sekolah baik di kota maupun di desa terutama. Tetapi di pihak lain dengan tambahnya lokal-lokal sekolah maka guru-guru di SD Inpres menjadi kurang, terutama di desa-desa. Misalnya sebuah sekolah kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) hanya diasuh oleh 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang guru atau sebuah sekolah SD yang terdiri dari 3 (tiga) kelas diasuh oleh seorang guru saja.

Akibat lain dengan bertambahnya SD karena didirikannya SD Inpres di mana-mana, maka lulusan SD Inpres itu juga makin bertambah. Sedangkan SMP yang menampungnya kurang bertambah. Kalaupun bertambah, tetapi pertambahan SMP tidak seimbang dengan pertambahan SD Inpres.

Akibatnya lulusan SD tidak dapat ditampung semuanya di SMP atau Sekolah Lanjutan Pertama. Akhirnya banyak lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Pertama terutama di pedesaan/di pedalaman. Namun demikian SD dan SD Inpres pada tahap pertama sudah hampir dapat menampung semua anak usia sekolah sehingga hampir tidak ada yang buta huruf seperti masa orde lama dulu.

Pada Sekolah Menengah baik Sekolah Menengah Lanjutan Pertama maupun Sekolah Menengah Lanjutan Atas yang cukup merisaukan adalah mutunya masih kurang dapat diharapkan. Kalau pada SD usaha untuk meningkatkan mutu sudah ada dan sudah nampak hasilnya, maka pada Sekolah Menengah Lanjutan hal ini baru mulai diusahakan atau bahkan ada yang belum diusahakan untuk menaikkan mutunya, terutama SLTA yang ada di pedalaman yang jauh dari kota besar. Hal ini disebabkan mungkin karena guru-guru yang ada di pedalaman belum mendapat giliran untuk mengikuti penataran-penataran yang diadakan oleh pemerintah. Inilah salah satu sebab lulusan dari Sekolah kejuruan yang biasa seperti SMEA, STM dan lain-lain yang kurang mutunya tidak dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya di masyarakat.

Di samping itu sekolah makin bertambah, tetapi lapangan kerja belum berimbang. Antara pendidikan dan lapangan kerja pada masa datang dikhawatirkan adanya ketidak seimbangan yang makin besar di mana lapangan kerja makin sempit dibandingkan dengan jumlah output Sekolah Menengah Kejuruan. Kebanyakan dari mereka tidak dapat membuka lapangan kerja sendiri sebagai wiraswasta, tetapi masih tetap menunggu lapangan kerja dari pihak lain dan dari pemerintah.

Di pihak lain lulusan dari Sekolah Menengah Lanjutan Atas di Kalimantan Barat cukup banyak, sehingga tidak sesuai dengan daya tampung Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini, Daya tampung Perguruan Tinggi makin lama makin sedikit kalau dibandingkan dengan lulusan SLTA yang makin banyak. Tetapi diharapkan dengan adanya pembukaan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Daerah, daya tampung terhadap lulusan SLTA tersebut makin banyak.

BAB II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDHA

Pengaruh Agama Hindu di Kalimantan Barat terutama di daerah pantai sudah tidak kelihatan lagi pada masa kini. Tetapi kalau kita menengok sejarah sejenak dari pada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Kalimantan Barat dan juga kalau kita masuk ke daerah pedalaman di mana pengaruh Agama Hindu masih kelihatan, meskipun tinggal bekas-bekasnya saja. Pengaruh itu dapat dilihat dari sejarah kerajaan Tanjungpura dengan ibukota kerajaan Sukadana dan kerajaan Matan di mana raja-rajanya pada waktu itu masih beragama Hindu.

Agama Hindu masuk ke Kalimantan Barat terutama dibawa oleh para bangsawan/pangeran pada zaman Majapahit dahulu, jadi ± abad ke-14 dengan tentaranya yang mengadakan ekspedisi perluasan jajahan.³⁰⁾ Adapun pengaruh yang sampai sekarang masih sering disebut orang mengenai gelar-gelar raja yaitu gelar Panembahan, gelar Gusti, yang sama dengan gelar-gelar di Jawa maupun di Bali. Juga mengenai benda-benda kuno, dengan diketemukannya sebuah patung/arca (potong Empat) di Kecamatan Sampauk di Kabupaten Sintang, yang sampai sekarang masih dipandang keramat oleh masyarakat setempat, dan juga benda-benda lain seperti gong, payung yang semua ini menunjukkan bahwa pada abad ke-14 Kalimantan Barat pernah mendapat pengaruh agama Hindu.

Bukti yang lain lagi bahwa Kalimantan Barat pernah dipengaruhi agama Hindu, yaitu bahasa yang masih dipakai oleh suku Daya pedalaman seperti kata : Petara dan Batara, Jubata dari Jawata, puyunggana dari pulanggana, Mahatara dan masih banyak kata-kata lagi yang bersamaan artinya. Khusus mengenai pendidikan yang diselenggarakan pada zaman Hindu di Kalimantan Barat apakah itu pendidikan yang bersifat formal ataupun yang informal sudah tidak kelihatan lagi bekas-bekasnya. Hanya-lah yang dapat diduga bahwa kemungkinan pengaruh agama Hindu pada waktu itu menyebarnya dengan melalui ajaran-ajaran/pendidikan yang bersifat ritual saja, hal ini terbukti dengan banyaknya bahasa Daya yang berasal dari bahasa Sanskerta yang dipakai untuk menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.

Sezaman dengan masuknya pengaruh agama Hindu di Kalimantan Barat dan mengingat pula bahwa penduduk di Kalimantan Barat banyak terdiri dari orang-orang Cina pendatang (abad XIV) yang datangnya konon

30) Sejarah Kodam XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berjuang*. hal. 27.

karena singgah pada waktu pulang dari ekspedisi. Kubilaikan untuk menggempur Kertanegara di Singasari. Tetapi ternyata malahan terusir oleh Raden Wijaya (Raja Pertama Majapahit), maka sebagian dari sisa-sisa tentara Kubilaikan itu ada yang melanjutkan perjalanan untuk pulang ke negeri Cina dan ada yang tetap tinggal di Kalimantan Barat dan kawin dengan penduduk asli di Kalimantan Barat. Selanjutnya gelombang kedatangannya di Kalimantan Barat dimulai lagi pada akhir abad ke-XVII dan permulaan abad ke 18 sebagai imigran dari dataran Tiongkok. Banyak di antara mereka itu memang merupakan pelarian-pelarian politik yang menghindari penindasan dinasti Ching (Manchu), namun banyak pula yang karena alasan-alasan untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada di dataran Cina. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1777 orang-orang Cina yang bermukim di Kalimantan Barat, telah membentuk kongsi-kongsi.³¹⁾

Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan juga berdasarkan wawancara-wawancara, maka pendidikan yang tertua di Kalimantan Barat adalah pendidikan Cina, meskipun pendidikan itu belum bersifat formal, masih merupakan pendidikan yang diadakan oleh keluarga sendiri. Hal ini terbukti bahwa di mana dahulu banyak bermukim orang-orang Cina seperti di daerah Montrado (daerah tambang emas) banyak orang-orang tua Cina yang tidak buta huruf, Meskipun terbatas pada huruf-huruf Cina saja. Perlu diketahui bahwa suku Cina yang banyak bermigran ke Kalimantan Barat adalah dari suku *Hok Loa* dan suku *Kek* yang kebanyakan menganut agama Kong Hu Cu, sehingga tak heran kalau kita melihat sampai sekarang peninggalan Kelenteng (rumah ibadah) yang sudah lebih dari satu setengah abad umurnya di daerah Singkawang, Montrado ataupun Mandor.

Mengenai pengaruh Portugis, meskipun sebagian dari bumi Indonesia ini terutama Jawa, Maluku dan Nusa Tenggara Barat maupun Timur mendapat pengaruh itu karena pemerintah Portugis didukung oleh tentaranya, namun di Kalimantan Barat bahwa tanda-tanda pengaruh itu tidak kelihatan sama sekali. Hal ini tentunya disebabkan karena Kalimantan bukan tempatnya penghasil rempah-rempah seperti yang dikehendaki oleh bangsa Eropa pada umumnya dan bangsa Portugis pada khususnya.

Demikian juga pada zaman VOC setelah kekuasaan Portugis di Nusantara ini mulai surut, dan VOC mengantikannya sebagai penguasa di Nusantara, Kalimantan Barat khususnya daerah Sukadana yang pernah sekali dikunjungi kapal VOC yaitu pada tahun 1604, tetapi kedatangannya ternyata hanya untuk membeli intan. Tetapi pengaruh VOC di Kalimantan Barat tidak kelihatan sama sekali, hal ini terbukti karena rakyat Kalimantan Barat baru mengenal pajak pada tahun 1912 yaitu setelah Belanda mulai berkuasa di Kalimantan Barat dan setelah mengadakan perjanjian dengan Sultan-sultan maupun Panembahan-panembahan di seluruh Kalimantan Barat.³²⁾

31) de Groot J.J.M., *Het Kongsiwezen in West Borneo*, Den Haag, 1880, hal. 1.

32) Hasil wawancara dengan HR.Mahmud Susila Suwignyo.

Sebab baru akhir abad ke XIX dan permulaan abad ke XX kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat menandatangani perjanjian (*korte verklaring*) dengan pemerintah Belanda dan mengakui bahwa kerajaannya merupakan bagian dari pemerintah Gouvernement Hindia Belanda. Kerajaan itu antara lain : Sintang menjelang abad ke XX menandatangani perjanjian, kemudian Simpang pada tahun 1911, Kubu pada tanggal 13 Oktober 1919, Tayan pada tanggal 29 Nopember 1930. Hal ini dapat diketahui dari laporan (raport) Gubernur Borneo, tertanggal 11 Nopember 1848 nomor 187, yang antara lain menyatakan bahwa Gubernur Borneo dengan menaiki kapal "onrust" telah berlayar memudiki sungai Kapuas untuk menyampaikan surat-surat kontrak (politik) yang telah disyahkan kepada raja-raja dan untuk memberitahu kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan serta bagaimana hubungan antara mereka.³³⁾ *Korte verklaring* ini sebagai tindak lanjut untuk membuat perjanjian politik yang sebelumnya pernah diadakan dan harus ditandatangani oleh raja-raja (Sultan-sultan/Panembahan-panembahan).

B. PENGARUH AGAMA ISLAM

Di daerah pesisir utara Kalimantan Barat yang membujur dari Selatan ke Utara yang meliputi daerah-daerah Ketapang, Sukadana, Matan, Mempawah dan Sambas merupakan daerah-daerah yang pertama-tama mendapat pengaruh agama Islam. Baru dalam perkembangannya kemudian mulai menyusuri sungai Kapuas, Sungai Landak terus masuk sampai jauh ke pedalaman, tetapi hanya sampai daerah-daerah sepanjang sungai saja. Adapun pembawa pengaruh agama Islam ini adalah para pendatang dari Sumatera Selatan (Palembang) dan Jawa dan juga orang-orang asing yang dengan melalui perdagangan dan tidak melalui organisasi keagamaan, jadi merupakan kegiatan perorangan.

Jadi jelasnya kira-kira pada tahun 1550 Kalimantan Barat kedatangan para pedagang Muslim, yang agamanya mula-mula hanya berpengaruh pada rakyat jelata saja.

Sedangkan Panembahan Baruh (raja Matan) sendiri tidak mau masuk Islam sampai wafatnya tahun 1590. Barulah setelah diganti oleh puteranya yaitu Giri Kusuma, maka perkembangan agama Islam. sangatlah pesat, karena raja sendiri memeluk agama Islam. Gelar Panembahan diganti dengan gelar Sultan pada waktu putera Giri Kusuma naik tahta yaitu Sultan Muhammad Syafiuddin.³⁴⁾

33) Besluit Gouverneur no. 6 tgl. 7 Januari 1949

34) Kodam XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berjuang*, op.cit. hal. 35.

Pada masa pemerintah Sultan Muhammad Syafiuddin hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat sudah masuk agama Islam.

Gelar Sultan Muhammad Syafiuddin di Kerajaan Matan ini akhirnya dipakai lagi oleh keturunannya yang mendirikan kerajaan di Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin ke VI, pada tahun 1866

Khusus mengenai lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Barat yang pertama-tama didirikan ialah *Assultaniah* oleh Sultan Sambas sendiri yaitu Sultan Muhammad Syaifuddin VI, dua tahun setelah pelantikannya pada tahun 1866. Pada waktu itu yang diajarkan masih 100% agama. Memang pertama-tama pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada kaum kerabat Sultan saja, tetapi lama kelamaan meluas sampai anak-anak dari kaulanya. Adapun sebagai bahasa pengantarnya masih dipergunakan bahasa Melayu kuno dengan huruf-huruf Arab Melayu. Dan mengenai tempatnya pun belum berujud seperti sekolah-sekolah pada lazimnya tetapi masih ada di dalam istana. Jadi pengelolaan lembaga pendidikan ini sepenuhnya masih di tangan Sultan. Baru dalam perkembangannya kemudian mulai ramai berdirinya *Volkschool* hampir di seluruh Kalimantan Barat. Maka *Assultaniah* juga mulai menyesuaikan diri dengan *Volksschool* tersebut dengan merubah sistem maupun metoda pengajarannya antara lain dengan menambah mata pelajaran yang bersifat umum, antara lain mulai diajarkannya berhitung, menulis huruf latin, membaca dan sebagainya, dengan tetap berpedoman pada ajaran agama yang menjadi pokok ajaran.

Perubahan ini terjadi pada tahun 1918 dan sudah merupakan pendidikan yang memakai tingkat-tingkat kelas dan sudah sampai kelas lima.

Dan juga sudah mulai dirintis pengiriman calon-calon guru untuk menuntut ilmu ke luar negeri antara lain ke Kairo dan Mekah. Sepulang dari Kairo dan Mekah, lalu ikut memperkuat staf guru di *Assultaniah* dan gedung sekolahpun mulai dipindahkan, tidak lagi di dalam istana.

Guru-guru itu antara lain : Achmad Fauzi, Muhammad Basuni Imran, Haji Achmad Sood, Haji Abdul Rachman semuanya ini adalah lulusan Kairo, sedangkan Haji Imam Zabir dan Haji Achmad adalah lulusan Mekah.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1936 di mana nama sekolah itu diganti menjadi *Tarbiatul Islam*. Perubahan mana merubah juga sistem maupun metoda pengajarannya. Tenaga guru banyak juga didatangkan dari Sumatera Barat terutama yang berasal dari *Perguruan Attawalib* dan Safei (Kayu Tanam). Perbandingan kerikulumnya pun menga-

lami perubahan antara lain 50% pelajaran agama dan 50% pelajaran umum, bahkan mulai dimasukkan pelajaran-pelajaran yang berbau kebangsaan. Hal ini terbukti sampai sekarang bahwa alumni dari sekolah Tarbiatul Islam semangat kebangsaannya tidak dapat diragukan lagi.

Setelah nama Assultaniah diganti dengan *Tarbiatul Islam* bahasa pengantarnya juga berubah, kalau dahulunya bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah maka sekarang untuk kelas satu dan dua masih memakai pengantar bahasa daerah tetapi setelah kelas tiga ke atas bahasa pengantarnya pun memakai bahasa Belanda. Kelasnyapun disesuaikan dengan HIS ataupun HCS yang sudah ada di Pontianak, yaitu sampai dengan kelas VII. Memang maksud dari penyesuaian ini adalah sebagai tandingan karena di Sambas dan Singkawang sudah ada HCS kepunyaan Bruder dan di Pontianak sudah ada HIS (Pemerintah) ada HCS kepunyaan Suster dan Bruder, maka alangkah baiknya kalau umat Islam juga mempunyai lembaga pendidikan yang diasuh dengan sistem Barat dan dengan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan *sistem Barat dan dengan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan* lembaga-lembaga pendidikan Barat, meskipun sekolah-sekolah itu hanya diperuntukkan bagi golongan-golongan bumi putra yang kedudukan sosial ekonominya sudah memadai. Demikian juga sistem ko edukasi di mana antara murid laki-laki dan wanita sama-sama menuntut ilmu dalam satu ruangan kelas dilaksanakan juga dalam Perguruan Tarbiatul Islam ini. Hal ini disebabkan karena guru-gurunya adalah didikan Kairo dimana di Mesir sistem ko edukasi ini sudah lama dijalankan. Dalam hal ini lembaga pendidikan Tarbiatul Islam lebih maju kalau dibanding dengan Perguruan Katolik pada umumnya, karena sistem pendidikan Katolik masih memisah-misahkan antara murid laki-laki dan wanita dalam sekolah sendiri-sendiri.⁶⁾

Tetapi penulis masih meragukan keterangan dalam wawancara ini, terutama yang menyangkut soal sistem ko edukasi di dalam perguruan Tarbiatul Islamiah. Adapun alasan penulis meragukan keterangan itu karena pada tahun 1958/1959 di kota Sambas, untuk melihat film di gedung/di panggung (istilah di Sambas) harus duduk berpisah, meskipun antara suami dan isteri sendiri.³⁵⁾ Kalau keterangan dalam wawancara itu benar artinya lulusan dari Tarbiatul Islam ada yang wanita, maka menurut dugaan penulis itu hanyalah suatu kekecualian saja, artinya jumlah murid wanita yang masuk sekolah di situ hanya satu dua orang saja dan inipun mungkin karena keluarga Sultan. Jadi jelasnya bukan merupakan sistem ko edukasi yang sesungguhnya yang diterapkan dalam perguruan itu, tetapi hanyalah secara kebetulan saja. Mengapa penulis berkesimpulan demikian karena bukti-bukti yang otentik yang merupakan peraturan tata tertib sekolah sudah tak dapat diketemukan lagi.

35) Hasil wawancara dengan Hifni Imran dan Munawar Kalahan.

Sejalan dengan berdirinya Perguruan Islam di kota Sambas, maka di Pontianak juga berdiri Perguruan Islam yang dinamai *Perguruan Islamiyah*. Perguruan ini berdiri sejak tahun 1926, dan sebagai pelopor pendirinya adalah H.Arif H. Ismail dan dibantu masyarakat di Kampung Bangka.

Mula-mula sebagai lazimnya Perguruan Agama, maka pendidikan itu hanya bersifat mendidik agama saja, baik kepada orang-orang tua pada malam hari (khusus laki-laki) dan sore hari untuk kaum wanita dan bagi anak-anak hanyalah pelajaran mengaji saja. Gedung yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah rumah H.Arif H. Ismail sendiri seorang hartawan dan dermawan di kampung Bangka itu. Lama kelamaan karena jumlah muridnya makin banyak, dan rumah H. Arief H. Ismail sudah tidak mampu menampung lagi maka oleh H. Arief H. Ismail dibangunlah gedung berukuran 12 meter panjang x 8 meter lebar, yang dapat menampung sejumlah 50 orang murid. Karena makin banyaknya murid maka sekolah juga diadakan pada pagi hari. Sejak itulah dimulai untuk belajar dengan menggunakan bangku sekolah dan papan tulis, serta cara memberikan pelajaran pun disusun sebagai sebuah madrasah. Pada waktu pagi dari jam 8.00 sampai jam 11.00 untuk anak-anak yang berumur sekitar 10 sampai 15 tahun, tengah hari jam 11.00 sampai 16.00 untuk anak-anak yang berumur 20–25 tahun dan malam untuk orang-orang tua, dan seminggu sekali untuk kaum ibu.

Setelah sekolah itu berjalan dua tahun lamanya, murid-muridnya pun makin bertambah dan gedung yang lamapun tidak dapat menampungnya. Maka oleh H.Aref H.Ismail dibangunlah gedung baru lagi yang lebih luas dan dapat menampung 100 orang murid, sedang gedung yang lama dijadikan rumah untuk kediaman Kepala Sekolah yaitu Abdul Manaf Siasa dengan keluarganya.

Gedung itu berukuran panjang 25 meter dan lebar 8,5 meter cukup untuk tiga lokal, sedangkan di bagian belakangnya dibangun pula 12 x 8,5 meter untuk satu lokal, jadi semuanya berjumlah empat lokal. Bangunan gedung ini demikian baiknya sehingga dapat menyaingi gedung sekolah HIS kepunyaan *Gouvernement* Pemerintah waktu itu, meskipun biaya pembuatannya ditanggung oleh H.Arief sendiri, dan hanya sedikit bantuan secara gotong royong dari masyarakat kampung Bangka yang berujud meninggikan tanah.

Sejak berdirinya sekolah ini pada tahun 1926 sampai dengan tahun 1932 belum mempunyai organisasi sama sekali. Baru setelah menempati gedung baru diusulkan supaya dibentuk Dewan Pengurus maupun Dewan Guru Perguruan Islamiyah yang akan menangani perkembangan selanjutnya. Setelah diadakan pertemuan dengan beberapa pemuka kampung yang dianggap sedikit mengerti mengenai organisasi, maka dibentuklah pengurus Perguruan Islamiyah di mana kebetulan susunan Pengurusnya diketuai/dipimpin sendiri oleh H.Arief bin H.Ismail sendiri.

Setelah Perguruan Islamiyah memiliki gedung maupun tenaga gurunya serta sudah memenuhi syarat sebagai sekolah, oleh H. Arif diangkatlah dengan resmi Ustadz A. Manaf Siasa sebagai Ketua Dewan/majelis Pengajaran dengan dibantu oleh beberapa orang guru, yang dulunya bekas murid. Ustadz A. Manaf sendiri dan sudah belajar selama lima tahun sehingga ilmu dan pendidikannya sudah dapat dianggap mencukupi untuk membantu mengajar di Perguruan tersebut.

Atas permintaan penduduk, maka tingkat pelajar dibagi dalam dua tingkat, yaitu tingkat Sekolah Umum yang setingkat dengan sekolah-sekolah, yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda yaitu *Vervolgschool* (SD 5 tahun), dan tingkat pendidikan agama (madrasah) yang setingkat dengan Ibtidaiyah. Dan perkembangan selanjutnya pada tahun 1939 didirikan lagi cabang pendidikan, yang merupakan kelanjutan dari *Vervolgschool*/pendidikan Umum dengan nama *Schekelschool*.

Untuk keperluan ini, maka didatangkan tenaga-tenaga pengajar dari Jawa dan Sumatera sebanyak tiga orang yang berijazah HIK (*Hollandsch Inlandsche Kweekschool*) / Sekolah Guru Menengah. Setahun kemudian yaitu pada tanggal 30 Mei 1940 oleh H. Arief, Perguruan Islamiyah ini dijadikan badan hukum dengan Akte Notaris. Selain itu oleh beliau juga diwakafkan tiga buah rumah beton di pasar seharga 200.000 gulden, untuk disewakan dan hasil sewa diperuntukkan biaya tambahan pendidikan Islamiyah, dan juga diwakafkan sebuah mesjid yang terletak disamping sekolah, dan sebuah rumah untuk asrama guru-guru.

Pada waktu zaman Jepang sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Perguruan Islamiyah ini ditutup untuk sementara, karena banyak tenaga guru yang ditangkap Jepang bahkan ada yang dibunuh. Setahun kemudian dibuka kembali dengan pelajaran-pelajaran yang disesuaikan dengan politik pemerintah Balatentara Jepang. Sedangkan salah satu cabang sekolahnya terpaksa ditutup terus yaitu *Schakelschool*, selain memang tidak diperbolehkan juga guru-gurunya sudah tidak ada lagi.³⁶⁾

Selain daripada itu di Pontianak didirikan juga sekolah agama Islam yang disebut "*Al-Hasan*" yang didirikan sebelum Perang Dunia II. Sekolah ini juga merupakan sumber yang menghasilkan beberapa tokoh yang terkenal dalam dunia politik yang beraliran keagamaan di daerah ini.³⁷⁾

8) Catatan Singkat Sejarah Pembangunan Perguruan Islamiyah 50 tahun, 1926 – 1976, Brosur.

9) U.A. Hamid Makhmud, *Gerakan Kemerdekaan di Kalimantan Barat*, (Ceramah di Fakultas Ekonomi UNTAN, 10 - 8 - 1974), hal. 4.

BAB III

PENDIDIKAN BARAT

A. PENGARUH PORTUGIS

A. PENGARUH PORTUGIS

Dari sejarah Kalimantan Barat yaitu sejak adanya Kerajaan-Kerajaan Hindu di Sukadana dan Matan, maka tidak kelihatan sama sekali pengaruh Portugis di Kalimantan Barat. Dan ternyata bahwa Portugis hanya mengarahkan tujuannya untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia Bagian Timur yaitu Maluku dan pulau Jawa sebagai batu loncatan.

Jangankan Portugis menanam kekuasaannya di Kalimantan menginjakkan kaki di bumi Kalimantanpun tidak pernah tidak adanya perhatian Portugis terhadap Kalimantan mungkin disebabkan karena Kalimantan bukan merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh Eropa pada waktu itu.

Bahwa pengaruh pendidikan pada zaman portugis di Kalimantan Barat juga tidak kelihatan sama sekali. Dan memang ternyata agama Katolik Roma masuk di Kalimantan Barat tidak melalui Pengaruh Portugis pada abad ke XV-XVI tetapi melalui missionaris Belanda pada abad ke XIX.

Pertama-tama yang datang di Kalimantan Barat adalah Pater Danders kira-kira pada tahun 1816 dengan maksud untuk menjajagi kemungkinan pembukaan missi di Kalimantan Barat, tetapi kesimpulan dari peninjauan itu ialah bahwa belum tiba saatnya untuk membuka missi di sini.

Pada tahun 1861 - 1862 seorang pastor militer mengadakan hubungan dengan masyarakat Daya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, namun juga tanpa hasil.

Baru pada tahun 1885 muncul imam pertama di Singkawang untuk melayani sekitar 200 orang Katolik Cina yang berasal dari pulau Bangka.

Imam tersebut ialah Pater Staal dari Ordo Yesuit yang kemudian menjadi Vikaris Apostolik Jakarta.

Dan pada tahun 1980 imam Yesuit membuka sekolah yang kedua di Semitau, jauh di pedalaman Kalimantan Barat ditengah-tengah masyarakat asli, yaitu masyarakat Daya dengan pastornya P.H.Looymans S.J.

Tetapi ternyata sebagai pusat kurang cocok sehingga dipindahkan ke Sejeram dan sekaligus dibuka sekolah di situ pada bulan Januari 1891, sebagai pastor pembantu adalah G. Mulder S.J.

Sementara itu perkembangan Gereja Katolik di luar Kalimantan semakin meningkat, khususnya di Jawa dan Flores, sehingga sangat memerlukan penambahan tenaga. Karena tak ada tenaga baru maka terpaksa dua Pastor yang ada di Sejeram dan yang ada di Singkawang ditarik kembali pada tahun 1897. Akibatnya untuk pembinaan umat Katolik yang ada di Singkawang terpaksa pastor yang bertugas di Bangka harus mengunjungi setahun dua kali, bahkan untuk umat yang ada di Sejeram tak pernah dikunjungi lagi. Perlu diketahui bahwa selain di Sejeram yang dibuka sekolah khusus untuk anak-anak penduduk asli (Daya) maka sebelumnya yaitu pada tahun 1892 di Singkawang juga dibuka sekolah misi yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan Cina terutama yang beragama Katolik.

Tetapi sekolah ini agaknya tidak berjalan sebagai mestinya mengingat para pengajarnya pastornya sudah banyak yang kembali atau dipindahkan ke Jawa maupun Medan.

Rupa-rupanya pimpinan gereja di Jawa memusatkan tenaga O.Y. (Ordo Yesuit) di Jawa dan memberi kesempatan bagi ordo dan kongregasi lain bekerja di pulau lain.

Pada tanggal 11 Pebruari 1905 daerah Kalimantan ditetapkan sebagai *Prefectur Apostolik* kedua yang dipisahkan dari Ordo *Societas Yesu*. Dan seluruh Kalimantan dipercayakan kepada *Ordo Kapusin Belanda* di mana ordo ini adalah salah satu cabang *Ordo Fransiskan*.³⁸⁾

Ada empat orang imam Kapusin yang pertama-tama dipercayakan untuk bekerja di Kalimantan Barat sejak tanggal 30 Nopember 1905, terutama di Singkawang mereka ini diketuai oleh Mgr. Pasifikus Bos sebagai Prefec.³⁹⁾

Pada tanggal 22 Agustus 1906 paroki Sejeram diduduki kembali. Dengan tibanya missioner dari ordo Kapusin ini, maka sekolahpun dibuka kembali, baik yang ada di Singkawang maupun yang ada di Sejeram.

Bahwa sekolah-sekolah yang dibuka oleh misi itu adalah sekolah Desa (Volkschool) yang lamanya hanya 3 tahun tetapi bagi masyarakat pada waktu itu sudah merupakan keuntungan yang luar biasa, karena mengingat masih langkanya sekolah.⁴⁰⁾

38) Bumbun OFM Cap, Hironymus, Drs. (Uskup Agung Pontianak), *Archdiocese of Pontianak*, Kalimantan Barat, Keuskupan Agung, Pontianak, Kalimantan Barat, hal. 23.

39), *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Penerbit Bagian Dokumentasi Pengerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, hal. 313

40) Ibid. hal. 314 Jacobus Saman.

Seperti Pemerintah Hindia Belanda sendiri baru membuka sekolah pertama-tama di Pontianak pada tahun 1892, lalu berikutnya di Singkawang, Sintang dan Sambas, sehingga sampai pada tahun 1918 maka sekolah desa (*Volksschool*) ataupun *Vervolgschool* di seluruh Kalimantan Barat termasuk HIS nya baru berjumlah 17 buah dengan jumlah murid sebanyak 1200 orang.

Dan sebagai bahan perbandingan sampai pada tahun itu juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh misi Katolik sudah mencapai 11 buah dengan jumlah murid 400 orang tersebar di Sejeram, Singkawang, Pontianak, Pemangkat, Sambas, Sintang, Lanja, Pelonjan, Benua Martinus dan Nyarungkop.⁴¹⁾

B. PENDIDIKAN ZAMAN VOC

Seperti telah dikemukakan bahwa Kalimantan Barat tidak mendapat pengaruh secara langsung dari VOC. Kedatangan VOC di Sukadana pada tahun 1604, hanya untuk membeli intan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syaifuddin belumlah merupakan ekspedisi tempur yang akan menyerang Sukadana, hal itu disebabkan VOC baru berhasil disusun dan Jakarta dijadikan markas besarnya.

Pada saat itu juga kapal-kapal Inggris datang di Sukadana dan sekaligus mengajukan permohonan izin untuk mendirikan kantor dagangannya dan dikabulkan oleh Sultan.⁴²⁾

Sedangkan pengaruh agama Kristen Protestan di Kalimantan Barat juga tidak langsung dibawa oleh VOC tetapi melalui misionaris Kristen yang terdiri dari bermacam-macam bangsa antara lain orang Belanda, Amerika dan hal inipun baru masuk ke Kalimantan Barat ± tahun 1930 – 1935.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa pendidikan di Kalimantan Barat baru dimulai pada abad ke XIX, jadi pada zaman VOC sama sekali belum dikenal adanya pendidikan secara formal.

Dan kalau mungkin ada pendidikan itu bersifat informal atau pendidikan keluarga, terutama di kerajaan-kerajaan dimana agama Islam sudah mulai dipeluk oleh raja-raja yang ada di Kalimantan Barat.

C. PENDIDIKAN ZAMAN HINDIA BELANDA (ABAD KE XIX)

Pada abad ke XIX, terutama pada masa peralihan di Kalimantan Barat belum mengenal adanya pendidikan formal baik untuk golongan Eropa maupun golongan Bumiputra.

41) Wawancara dengan Jacobus Saman, Pensiunan Penilik Sekolah Kabupaten Sambas dan Landak, tanggal 13 - 1 - 1981.

42), *Tanjungpura Berjuang*, op.cit. hal. 36.

Barulah pada pertengahan abad ke XIX, yaitu pada tahun 1868, jadi 2 tahun setelah Sultan Sjaifuddin VI dilantik menjadi Sultan di Sambas maka oleh Sultan didirikanlah suatu lembaga pendidikan yang diberi nama Assultaniah. Lembaga ini belum merupakan sebagai lembaga pendidikan yang sesungguhnya, karena selain yang diajarkan hanya pelajaran agama saja, juga murid-muridnya hanya terdiri dari kaum kerabat Sultan dan anak-anak dari handai taulan Sultan saja. Jadi pelajarannya khusus mengaji dan mengenal huruf Arab dan Alqur'an.

Baru kemudian setelah pemerintah Belanda membuka sekolah *Vokschool* di Kalimantan Barat, maka pendidikan Assultaniah mulai menyesuaikan diri dengan keadaan, antara lain dimasukkannya pelajaran yang bersifat umum, seperti berhitung, membaca dan menulis huruf Latin. Dan sebagai bahasa pengantarnya (*voertaal*) masih mempergunakan bahasa daerah (Melayu Sambas).

Namun demikian pelajarannya masih ditekankan pada pelajaran agama, sedangkan pelajaran berhitung, membaca dan menulis hanya sebagai pelengkap saja. Keadaan ini akan mengalami perubahan-perubahan setelah nama lembaga pendidikan itu dirubah menjadi Tarbiatul Islam pada abad ke XX, tepatnya pada tahun 1936.⁴³⁾

Sedangkan sekolah lain yang didirikan ialah sekolah yang sederajat dengan *Volksschool* dengan lama pendidikan tiga tahun yaitu yang didirikan oleh Pastor Stall S.J. di Singkawang pada tahun 1892.

Sekolah itu khusus didirikan untuk anak-anak orang Tionghoa yang sudah memeluk agama Kristen Katolik.

Selain itu misi Katolik juga mulai masuk ke pedalaman yaitu dengan mendirikan paroki di Semitau. Tetapi ternyata Semitau kurang cocok sebagai pusat pengembangan agama, sehingga dipindahkan di Sejiram.

Di Sejiram mulailah dirintis oleh Pastor P. H. Looymans S.J. membuka sekolah Desa (*Volksschool*) yang muridnya terdiri anak-anak Daya.

Tetapi sekolah ini tidak berumur panjang, karena Pastor-pastornya yang terdiri dari orde Jesuit dipindah ke Jawa dan Medan, sehingga baik di Singkawang maupun Sejiram tidak ada pengajarnya lagi.

Baru setelah didatangkan Pastor dari orde Kapusin yang terdiri orang-orang Belanda dibawah pimpinan Mgr. Pasifikus Bos maka sekolah-sekolah di Singkawang dan Sejiram dihidupkan kembali yaitu di Singkawang pada tahun 1905 dan di Sejiram pada tahun 1907.⁴⁴⁾

43) Hasil wawancara dengan Hifni Imran dan Munawar Kalahan.

Pada tahun 1892 sekolah Pemerintah Belanda yang pertama-tama didirikan di Kalimantan Barat adalah Sekolah Desa Tiga tahun (*Volks-school*) di Pontianak. Dan baru pada permulaan abad ke XX sekolah Pemerintah (*Volkschool*) mulai didirikan di kota-kota lain.



44), *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, op.cit.* hal. 350.

BAB IV

PENDIDIKAN PADA ABAD XX

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Pengaruh politik Etika

Pengaruh politik Etis dari para pemuka masyarakat Belanda yang dipelopori oleh van Deventer pada permulaan abad ke XX ternyata tidak hanya sampai pada pusat Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga sampai ke daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan.

Titik tolak pemikiran dari para pemuka masyarakat di negeri Belanda sendiri yang beraliran sosial etis adalah turut merasakan bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang lamanya ± 3 abad, dengan hasil dapat mengeruk keuntungan dan dapat menimbun kekayaan yang berlimpah-limpah, berakibat kemelaratan yang diderita oleh rakyat Indonesia. Maka merupakan suatu dosa besar bagi bangsa Belanda kalau tetap ingin membiarkan bangsa Indonesia tetap bodoh.

Oleh karena itu Pemerintah jajahan Belanda harus segera membalas kebaikan bangsa Indonesia itu dengan suatu tindakan yang nyata antara lain dengan imigrasi, irigasi dan edukasi. Namun dalam kenyataannya pemerintah jajahan Belanda dalam melaksanakan pembayaran hutang budinya terhadap bangsa Indonesia disesuaikan dengan kepentingan penjajahannya. Seperti halnya irigrasi bukanlah pertama-tama kepentingan rakyat yang diutamakan, tetapi justru kepentingan perkebunan perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang memperoleh manfaatnya terlebih dahulu.

Demikianlah juga halnya dengan edukasi, maka pendidikan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat jelata, tetapi ternyata sekolah-sekolah yang didirikan hanya merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon-calon mandor yang dapat dipekerjakan untuk kepentingan perusahaan perkebunan besar Belanda saja. Dan kalau dibuka pendidikan yang bersifat kejuruan tak lain juga hanya mempersiapkan tenaga-tenaga yang dapat dipakai dalam lapangan perkebunan, terutama untuk menduduki tempat-tempat yang sudah tidak patut lagi diduduki oleh orang-orang Belanda.

Oleh karena itu maka di daerah-daerah di seluruh Indonesia didirikanlah sekolah-sekolah rendah/desa (Volkschool) yang lamanya tiga tahun. Sekolah sekolah ini hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran yang sangat sederhana sekali, yaitu berhitung, membaca dan menulis.

Namun demikian pengaruh politik etis itu sampai juga menjamah daerah Kalimantan Barat meskipun pertama-tama yang merintis adalah

missi Katolik, barulah Pemerintah Hindia Belanda mengikutinya. Pertama-tama yang dibuka adalah di Singkawang dan Sejiram (1890 – 1894), terus dibuka lagi di Pontianak, Pemangkat, Sambas, Lanjak, Pelanjau (1911), kemudian Benua Martinus (1916) dan Nyarungkop (1917). Sedangkan Pemerintah pertama-tama membuka di Volkschool (Sekolah Desa) di Pontianak tahun 1892, lalu Sintang (1908), kemudian baru daerah-daerah lain seperti Pemangkat, Singkawang, Sambas, Landak, Mempawah dan lain-lain. Sampai tahun 1918 seluruh Kalimantan Barat baru ada Volkschool termasuk Vervolgschoolnya sejumlah 28 buah di mana 11 buah diantaranya adalah kepunyaan misi Katolik. Sedangkan muridnya baru ada ± 1.600 orang saja.⁴⁵⁾

Kalau dilihat tahun mulai didirikannya sekolah-sekolah di Kalimantan Barat pada umumnya, maka sebenarnya berdirinya sekolah-sekolah itu sudah diilhami dengan politik pengajaran dari Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1893 mulai membeda-bedakan daripada pengajaran untuk Bumi Putera.

Adapun hal-hal yang menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah itu ialah :

- 1) Hasil sekolah-sekolah Bumi Putera ternyata kurang memuaskan Pemerintah Kolonial. Hal ini disebabkan karena isi pelajarannya terlalu padat.
- 2) Di kalangan pemerintah mulai timbul “perhatian” pada rakyat jelata. Mereka mulai insyaf, bahwa yang harus mendapat pengajaran itu bukan hanya lapisan atas saja.
- 3) Menurut Direktur Pengajaran pada waktu itu, berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai dua kebutuhan di lapangan pendidikan, yaitu :
 - a. lapisan atas membutuhkan pengajaran yang dapat membawanya kearah kemajuan dan yang dapat memenuhi syarat-syarat kepegawaian yang selalu bertambah berat.
 - b. lapisan rendah merasa cukup dengan sekolah rendah yang sangat sederhana, yang hanya memberikan pengetahuan pokok seperti membaca, menulis dan berhitung.

Jalan yang ditempuh oleh Direktur Pengajaran Hindia Belanda ini merupakan pandangan yang salah, yakni rakyat jelata tidak perlu mendapat bimbingan untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda dengan Staatsblad tahun 1893 nomor 125 mengeluarkan peraturan yang membagi sekolah di Indonesia ini menjadi 2 bagian,

45) Hasil wawancara dengan Pensiunan Penilik Sekolah Daerah Swapraja Sambas dan Landak Jacobus Saman tanggal 13 Januari 1981.

yaitu :

1. Sekolah kelas satu sekolah ini khusus untuk anak-anak priyayi dan kaum terkemuka (aristokrat).
2. Sekolah-sekolah kelas dua sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak rakyat jelata.⁴⁶⁾

Oleh karena itu pola pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, apakah itu yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah sudah disesuaikan dengan keadaan di Jawa, di mana lembaga-lembaga pendidikan itu lebih dahulu ada.

2. Pendidikan Sekolah Dasar

Sesuai dengan diterapkannya politik differensiasi bagi pendidikan Bumi Putera oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka di Kalimantan Barat mulai bermunculanlah sekolah-sekolah baik sekolah kelas satu yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak priyayi dan kaum terkemuka maupun sekolah kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak-anak rakyat jelata.

Sekolah-sekolah Kelas I itu antara lain HIS, ELS, HCS yang didirikan di kota-kota Pontianak, Singkawang dan Sambas. Seperti halnya HIS di Pontianak yang didirikan oleh Pemerintah pada tahun 1922. Selain itu HCS yang diperuntukkan bagi golongan Cina adalah sekolah dasar yang didirikan oleh misi Katolik baik oleh Bruder maupun oleh Suster. Di Singkawang yang dulunya *Vervolgschool* oleh Bruder pada tahun 1921 ditingkatkan menjadi HCS, sedangkan di Pontianak perubahan dari *Vervolgschool* menjadi HCS baru dilaksanakan pada tahun 1924 oleh Zuster-zuster, dan tahun 1931 oleh Bruder didirikan lagi HCS dan di Sambas didirikan juga HCS pada tahun 1924.⁴⁷⁾

Selain itu oleh Pemerintah juga didirikan ELS *Europesche Lager School* (Sekolah Dasar) yang khusus untuk anak-anak dari golongan Eropa di Pontianak pada tahun 1920. Sekolah ELS (*Europesche Lagere School*) ini meskipun resminya diperuntukkan bagi anak-anak golongan Eropa, tetapi dalam kenyataannya dapat dimasuki juga golongan yang bukan Eropa, tetapi dengan syarat-syarat antara lain : anak-anak raja, Sultan atau bangsawan-bangsawan maupun anak-anak orang-orang yang berpangkat dalam pemerintahan. Adapun lamanya pendidikan sekolah-sekolah Kelas I itu (HIS,HCS) adalah 6 tahun, baru pada tahun 1934 diroboh menjadi 7 tahun. Sekolah-sekolah dasar lain antara lain di Sambas sebagai kelanjutan

46) I Djumhur/Drs.H.Donosuparto, *Sejarah Pendidikan*, Penerbit CV Ilmu, Bandung, Cetakan ke 7, 1976, hal. 131 – 132.

47), *De Broeders van Huijbergen een Halve eeuw werkzaam in Indonesia*, 1920 – 1970, Pontianak. 1970, hal. 19, 20.

daripada Assultaniah yang pada tahun 1936 dirobah menjadi Tarbiatul Islam. Dengan perubahan ini dimasukkan untuk mensejajarkan pendidikan Islam yang mula-mula hanya setingkat Sekolah Desa saja atau *Vervolgschool* lalu dijadikan sejajar dengan sekolah Kelas I seperti HIS atau HCS yang sudah mulai bernunculan di Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ini maka perguruan Tarbiatul Islam mendatangkan guru-guru dari Sumatera yang berpendidikan HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool) di samping guru-guru agama yang sudah ada. Mata pelajarannya maupun bahasa pengantarnya juga mengalami perubahan disesuaikan dengan HIS atau HCS, demikian juga kelasnya. Juga di Sambas didirikan *Standaard School* sama dengan *Schakelsschool* pada tahun 1940, sebagai kelanjutan daripada *Vervolgschool* kepunyaan misi. Selain di kota Sambas, maka di Kota Pontianak juga didirikan Perguruan Islamiyah yang berdiri sejak tahun 1926. Mula-mula tahun 1927 didirikanlah Sekolah Desa tiga tahun. Kemudian pada tahun 1932 ditingkatkan menjadi lima tahun (*Vervolgschool*) dengan mata pelajaran 70% umum dan 30% pelajaran agama.

Selain itu juga dibuka *Schakelschool* dua tahun sebagai lanjutan dari *Vervolgschool*, dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda.

Dalam mendirikan sekolah dasar ini ternyata *GKKKB (Gereja Kristen Kalimatan Barat)* juga tidak mau ketinggalan, meskipun sekolah dasar itu dikhususkan bagi anak-anak golongan Cina yaitu sekolah dasar yang sederajat dengan Sekolah Desa Tiga tahun dengan bahasa pengantar bahasa Cina. Sekolah ini namanya *Sekolah Lak Yue* yang artinya “*senang atas pendidikan*”, didirikan pada tahun 1938. Adapun tujuan didirikannya sekolah ini membantu bagi anak-anak Cina yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan.

Disamping itu secara tidak langsung tentunya Gereja Kristen juga ingin mengembangkan pengaruh agamanya pada masyarakat Cina. Hal ini dapat dipahami karena selain GKKKB sendiri belum lama berdiri di Kalimantan Barat, juga untuk mendapatkan pengaruh yang paling mudah adalah pada orang-orang Cina., karena untuk memperoleh pengaruh dari golongan Bumi Pute-
ra (Melayu) yang telah memeluk agama Islam adalah sulit.

Khusus mengenai pendidikan yang stingkat dengan HIS, HCS ataupun ELS yang persyaratan untuk memasukinya sangat ketat seperti halnya di Jawa, maka di Kalimantan Barat persyaratannya itu agak lebih longgar, hal ini tentunya disebabkan karena keadaan sosial ekonomi maupun adat istiadat di Kalimantan Barat adalah lain dari pada di Jawa,

Seperti halnya susunan masyarakatnya yang terdiri dari bermacam-macam suku/ras, maka tidak jarang anak-anak orang Indonesia suku Melayu yang mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah HCS sehingga memberi kesan seolah-olah di Kalimantan Barat sistem persekolahannya tidak disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

3. Pendidikan Menengah Umum

Mengenai pendidikan sekolah menengah umum di Kalimantan Barat baru berdiri sejak tahun 1937, dan inipun tidak didirikan oleh Pemerintah tetapi oleh misi Katolik. Sekolah Menengah Umum (RK MULO Rooms Katolik *Middelbare Uitgebreid Lager/Onderwijs*) ini didirikan di kota Pontianak sebagai tempat penampungan para lulusan HIS, HCS maupun ELS yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Dan sebagai guru-gurunya adalah para pastor dan para Bruder yang berkompeten dalam bidang mata pelajarannya. Lama pelajaran tiga tahun sampai empat tahun seperti halnya MULO yang terdapat di Jawa. Tetapi setelah berjalan lima tahun, maka sekolah ini ditutup, karena pecahnya Perang Dunia II dan Jepang mulai masuk ke Pontianak, guru-gurunya yang terdiri dari pastor-pastor dan Bruder-bruder ditawan oleh Jepang.

4. Pendidikan Kejuruan

Pembukaan pendidikan kejuruan di Pontianak lebih awal dari pada pendidikan HIS, HCS dan ELS karena pada tahun 1913 di kota Singkawang telah didirikan *Ambachtchool* (Sekolah Pertukangan) oleh Bruder Wenceslaus, yang disusul didirikan di Pontianak pada tahun 1928 dan kemudian di Sintang dan Ketapang.⁴⁸⁾

Maka tak mengherankan kalau di seluruh Kalimantan Barat banyak terdapat tenaga tukang yang merupakan hasil tempaan Sekolah Pertukangan itu. Sekolah tersebut lamanya dua-tiga tahun dan lebih dipentingkan pelajaran praktek dengan perbandingan praktek 70% teori 30%. Selain itu kekhususan dari pendidikan kejuruan sekolah ini adalah bahwa para murid tinggal di asrama semua, tanpa di pungut bayaran, dan sebagai bayaran makannya di asrama dipotong dari upah mereka pada waktu kerja praktek. Sehingga murid lulusan Sekolah Pertukangan tersebut ketrampilannya dalam soal tukang menukang tidak diragukan lagi.

48), *Syarat Gereja Katolik Indonesia, op.cit.* hal. 313

Pada waktu yang bersamaan pada tahun 1928 itu juga di desa Nyarungkop di buka sekolah Pertanian oleh Pastor Gerardus, di mana sekolah ini merupakan kelanjutan dari *Volksschool*, jadi masih merupakan sekolah dasar.

Sebelum Perang Dunia II pihak gereja berusaha untuk mengubah cara bercocok tanam Suku Daya dengan memberi pendidikan pertanian. Dalam Sekolah Pertanian yang dibukanya itu terutama diajarkan pelajaran-pelajaran praktek tentang bagaimana orang mengerjakan sawah dan kebun sayur. Selain itu Bruder-bruder Kapusen membuka kebun-kebun karet, tempat anak-anak memperdalam pengetahuan prakteknya. Selain itu mereka dapat menabung uang dari gaji dan memperoleh bibit dengan cuma-cuma untuk menanam pohon karet sendiri. Maka antara lain berkat usaha gereja inilah kini karet sudah menjadi tanaman rakyat dan bahan ekspor.⁴⁹⁾

Untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru agama maka di Sejiram dida tangkan guru dari Menado untuk memimpin kursus katekismus pada tahun 1913. Baru setelah Perang Dunia I usai disusul pula pendirian kursus katekismus itu di Pontianak, Singkawang dan Nyarungkop.

Untuk menyiapkan tenaga-tenaga imam, maka didirikanlah di Pontianak pada tahun 1933 Pendidikan Imam (Seminari) tingkat menengah. Sebagai lazimnya Seminari Menengah maka waktu yang diperlukan adalah 7 tahun (bagian SMP dan SMA). Bahasa pengantarnya Bahasa Belanda. Seminari Menengah ini ditutup pada tahun 1941, karena pecah Perang Dunia II.⁵⁰⁾

Selain sekolah-sekolah tersebut di atas misi Katolik pada tahun 1937 di Pontianak juga membuka Sekolah Dagang Kecil (*Klein handel-school*) kemudian diikuti di Singkawang pada tahun 1939.

Keistimewaan daripada sekolah ini ialah antara murid yang masih berumur 15 tahun dengan yang sudah berumur 25 tahun dicampur karena minat untuk mengetahui pengetahuan dagang ini timbul dari kalangan orang-orang dewasa, terutama orang-orang Cina. Karena banyak yang sudah bekerja pada pagi hari (berdagang) maka sekolah diadakan pada sore hari.⁵¹⁾

Sampai Perang Dunia II usai ternyata Pemerintah Belanda dan Jepang tidak pernah membuka Sekolah Kejuruan di Kalimantan Barat.

49), *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*. hal. 107

50) Keterangan tertulis dari Bapak Uskup Agung Pontianak (Drs. Hironimus Bumbun PFMCap).

51), *De Broeders van*, *op.cit.* hal. 28.

Untuk Mengatasi kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah desa yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat maka Pemerintah Hindia Belanda cq Direktur Pengajarannya menempuh jalan dengan membuka kesempatan Kursus Guru selama dua tahun bagi anak-anak yang sudah tamat Sekolah Desa. Sebab sampai pecah Perang Dunia II di Kalimantan Barat belum pernah ada (*Normal School, jadi bagi murid-murid lulusan Volk-school ataupun Vervolgschool* yang ingin bersekolah ke *Normaalschool* harus pergi ke Banjarmasin ataupun ke Jawa.

B. PENDIDIKAN ZAMAN PERGERAKAN NASIONAL

Akibat kekalahan armada Rusia oleh armada Jepang di teluk Cusyima pada tahun 1905, maka pengaruhnya dapat dirasakan di seluruh benua Asia. Lebih-lebih bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah kekalahan armada Rusia (Barat) oleh armada Jepang (Timur) ini menimbulkan perasaan percaya diri maupun harga diri dan sekaligus membangkitkan semangat perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. Demikian pula di negara kita yang pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda maka sejak tahun 1908 timbullah pergerakan-pergerakan rakyat yang bercorak Nasional maupun Keagamaan, baik yang berorientasi politik maupun yang bersifat sosial.

Adapun organisasi pergerakan yang pertamakali lahir ialah Budi Utomo, didirikan oleh almarhum Dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini adalah merupakan organisasi Pergerakan Nasional yang untuk pertama kali masih bersifat sosial budaya. Kalau dilihat dari tujuannya maka Budi Utomo bertujuan untuk mencapai : "*de harmonische ontwikkeling van Land en Volk van Java en Madoera*" artinya "kemajuan yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura".⁵²⁾

Mengapa hanya disebut Jawa dan Madura dan tidak seluruh Indonesia? Karena pada waktu itu idee Indonesia, artinya persatuan Indonesia belum tumbuh di kalangan bangsa Indonesia. Maka dari itu yang dikehendaki oleh perkumpulan Budi Utomo hanya meliputi Jawa dan Madura saja, sedang ka ta-kata kemerdekaan belum pernah disebut-sebut. Tetapi hal ini sudah cu -

kup membuktikan bahwa rasa "*nationaal bewustzijn*" atau "kesadaran Nasional" sudah ada, hanya untuk menegaskan dengan kata "kemerdekaan" belum waktunya. Untuk mencapai tujuan ini maka oleh perkumpulan Budi Utomo ini antara lain diusahakan

- 1) Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, sebagai usaha pertama yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan kemajuan bangsa itu memang pengajaran.

52) Drs. Soesanto Tirtoprodjo SH, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1965, hal. 10.

- 2) Memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan. Jadi sudah dipertimbangkan, kemajuan itu harus juga dalam bidang perekonomian.
- 3) Memajukan teknik dan industri. Jadi dalam bidang inipun sudah di-cita-citakan sebagai usaha.
- 4) Menghidupkan kembali kebudayaan. Jadi lapangan kebudayaan juga sudah ditarik di dalam usaha perkumpulan Budi Utomo itu.

Selanjutnya juga disebutkan untuk “mempertinggi cita-cita kemanusiaan” di mana cita-cita ini termasuk dalam salah satu sila daripada Pancasila kita sekarang ini.

Akhirnya disebut “Alles wat nodig is om te bereiken een waardig volksbesfaan”, artinya “segala yang perlu untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat”. Jadi di sinilah letaknya apa yang sebenarnya menjadi cita-cita Budi Utomo ialah kehormatan bangsa, kedudukan bangsa supaya menjadi bangsa yang terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Dari sinilah dapat diberikan corak baru dalam sejarah bahwa kesadaran nasional dapat diwujudkan dalam suatu bentuk perkumpulan atau organisasi. Maka dari sini pula ditetapkan sebagai permulaan Pergerakan Nasional ialah berdirinya Budi Utomo.⁵³⁾

Dan sesudah perkumpulan Budi Utomo maka perkumpulan sosial kedua yang dirikan oleh bangsa Indonesia ialah Serikat Dagang Islam yang didirikan di kota Solo oleh seorang pengusaha batik yaitu Haji Samanhudi pada tahun 1911. Perkumpulan ini didasarkan pada :

1. Agama ialah agama Islam.
2. Ekonomi.

Setelah tahun 1912 dengan nasehat seorang tokoh pelajar yang berkerja pada perusahaan dagang di Surabaya yaitu H. Omar Said Cokroaminoto maka perkumpulan itu diganti namanya dengan menghilangkan kata “dagang” nya. Hal ini dimaksudkan supaya anggotanya tidak terbatas pada kalangan dagang saja.

Adapun tujuan dari perkumpulan Serikat Islam itu dimuat dalam Statuta Pendirinya pada tahun 1912 yang antara lain disebutkan :

- a. memajukan perdagangan. Jadi tujuan itu tetap dipertahankan.
- b. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran. Jadi semacam koperasi bantu membantu
- c. memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli. Disini ternyata bahwa tujuan tidak hanya terbatas kepada anggota saja, tetapi perkumpulan itu meluas kepada masyarakat, ialah kepentingan penduduk asli.

53). *Ibid.* hal. 11.

d. memajukan kehidupan keagamaan Islam

Dari sini ternyata bahwa perkumpulan Sarikat Islam ini berlainan dengan Budi Utomo yang dalam prakteknya hanya mendapatkan anggota-anggota dari kalangan atas saja. Sedangkan Sarikat Islam berhasil mendapatkan anggota-anggota di kalangan rakyat banyak sehingga dalam waktu singkat meluas menjadi perkumpulan yang banyak anggotanya. Tercatat bahwa pada kongresnya yang pertama yakni tahun 1916 jumlah anggotanya sebanyak 360.000 dan dua tahun kemudian yaitu tahun 1918 sudah menjadi 450.000;⁵⁴⁾

Perkumpulan berikutnya ialah berdirinya Indische Party pada tahun 1912. Pertama-tama didirikan oleh Douwes Dekker atau Setia Budi, Dr. Ciptomangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Indische Party meluaskan keanggotaannya tidak terbatas pada orang Indonesia asli tetapi anggotanya adalah orang-orang yang lahir di Hindia Belanda. Adapun tujuannya disebutkan ialah "*voorbereiding voor een on ofhangkelijk colksbestaan*", artinya "persiapan untuk kehidupan bangsa yang merdeka".

Indische Party pengaruhnya tidak dapat meluas, meskipun pada tahun 1919 namanya diganti dengan "National Indische Party". Dan setelah Ki Hajar Dewantara pulang dari Negara Belanda, karena harus menjalani pembuangan, maka sesampai di tanah air kembali pada tahun 1921 lalu mendirikan Perguruan Nasional yang dinamai "Taman Siswa".

Khusus pengaruh party-party di Kalimantan Barat ternyata Serikat Islam yang mula-mula datang di Kalimantan Barat, tetapi ternyata bahwa pemimpin-pemimpin pergerakan yang aktif di daerah ini kebanyakan justru yang berasal dari Serikat Rakyat, yang terlibat dalam pergolakan melawan pemerintah Kolonial pada tahun 1926. Banyak pemimpin-pemimpin pergerakan di daerah ini yang ditangkap Belanda kemudian dibuang ke Boven Digul.

Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan-bangsawan dari kerajaan Landak seperti Gusti Sulung Lelanang yang berpendidikan *Normaaschool*,

Gusti Mahmud H.Rais, M.Hambal. Pemimpin-pemimpin Serikat Rakyat yang lain yang juga dibuang ke Boven Digul adalah Jo anding Abdurrachman.

Sampai saat berdirinya Party Indonesia Raya (Parindra) maka di daerah Kalimantan Barat, pergerakan kebangsaan berada dalam keadaan pasip. Tetapi pasipnya ini hanya meliputi kegiatan pergerakan yang

54) *Ibid.* hal. 31.

bercorak politik saja, sedangkan gerakan rakyat yang bercorak dan berlandaskan sosial dan agama tetap berjalan. Organisasi sosial yang berazas Islam seperti Muhammdiyah misalnya, mulai dikenal di Kalimantan Barat sejak tahun 1926 dan masuknya dibawa oleh para muballigh dari Minangkabau yang merantau ke daerah Kalimantan Barat. Karena sikapnya yang moderat terhadap kaum penjajah sehingga di Kalimantan Barat cepat berkembang dan kemudian dapat mendirikan sekolah yang sifatnya lain daripada madrasah-madrasah yang sudah ada. Tetapi karena sekolah-sekolah swasta itu harus serba berdikari dalam pengadaan sarana-sarana sekolah, maka yang dapat didirikan oleh Muhammadiyah hanya dua buah sekolah saja, yaitu di Pontianak dan di Singkawang. Itu pun didirikan sesudah tahun 1935.

Sedangkan organisasi lain yang juga mendirikan sekolah di Pontianak dan Singkawang ialah Taman Siswa, namun pada umumnya sekolah-sekolah itu gulung tikar dengan sendirinya karena pembiayaan yang harus dipikul terlalu besar, sedangkan murid-muridnya hanya sedikit jumlahnya. Taman Siswa di Singkawang didirikan pada tahun 1939 oleh seorang guru yang bernama Ki Sai. Sebagai halnya dengan sekolah-sekolah swasta yang lain, maka pada waktu Jepang mulai berkuasa maka sekolah-sekolah itu ditutup.⁵⁵⁾

Motivasi pendidikan Taman Siswa ialah kebangsaan sehingga banyak sekali murid-murid keluaran Taman Siswa yang menjadi Pemimpin-pemimpin pergerakan. Sedangkan sekolah-sekolah rendah yang didirikan oleh tokoh-tokoh Parindra antara lain Perguruan Rakyat yang tersebar di Ngabang, Pahauman, Mungguh, Jatan, Sepatak, semuanya merupakan sekolah desa. Namun demikian karena dasar pendidikan adalah menanamkan rasa kebangsaan dan semangat patriotisme, maka hasilnya pun setelah masa perjuangan daerah Ngabang menjadi pusat perlawanan rakyat Kalimantan Barat selain Sambas terhadap kekuasaan Nica yang mulai bercokol kembali di Kalimantan Barat.

Adapun riwayat para pendiri sekolah-sekolah Perguruan Rakyat itu antara lain di Pontianak ialah :

- a. R. Kempul, Kepala Kantor Pos Pontianak
- b. Hajarati, Guru HIS
- c. Mustamir, Djunet Landhouw Consulent.
- d. A. Harahap, Kepala Pelabuhan Pontianak.

Sedangkan dari kalangan swasta adalah : R. Wariban, Doelhaji.

Sedangkan di Ngabang tokoh-tokohnya ialah Gusti Effendi Rani. Pangeran Natakusuma, Mohammad Amir, Rani Sulaiman, Hidayat Ismail Syamsuddin Arsyad.

55) Hasil wawancara dengan Syamsudin, Penilik Sekolah Kabupaten Sambas, tgl. 12 - 1 - 1981.

Dan sebagai pendidik adalah Rani Sulaiman keluaran HIS di Pontianak, yang ikut mendirikan Perguruan Rakyat di daerah Ngabang.

Tokoh lain yang berkecimpung dalam pendidikan Perguruan Rakyat adalah Syamsuddin Arsyad di mana ia merupakan tamatan sekolah Guru Bukit Tinggi dan sekaligus menjadi Ketua Pendidikan Perguruan Rakyat tersebut. Adapun pemikiran-pemikiran yang timbul pada waktu itu pertama-tama mencerdaskan bangsanya supaya sederajat kedudukannya dengan bangsa-bangsa lain melalui pendidikan. Yang kedua menanamkan rasa kebangsaan pada kalangan anak-anak muda, sehingga nantinya dapat diperoleh kader-kader penerus perjuangan.

Sedangkan Perguruan Taman Siswa karena umurnya tidak lama di Kalimantan Barat, maka sangat kurang mendapat pengaruh. Sedikit sekali yang dapat diketahui kecuali hanya seorang pemimpin Perguruannya yang sekaligus merangkap jadi gurunya.

BAB V

PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA

A. PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG

Seperti telah diketahui bahwa tujuan Jepang menduduki Indonesia ialah mencari sumber bahan mentah dan tenaga manusia untuk kepentingan perang. Untuk mengelabui maksud tujuan itu maka ditanamkannya ideologi baru yaitu “*Hakko Ichuu*” atau kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu pada zaman pengaruh Jepang landasan idiil pendidikan ialah mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang untuk mencapai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

Untuk penanaman ideologi baru ini melalui sekolah-sekolah, dimulai dengan mengadakan latihan guru-guru yang bertugas sebagai penyebar ideologi baru tersebut.

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang ialah :

1. Pelajar-pelajar dididik untuk menjadi militer dan buruh demi kepentingan Jepang.
2. Menjepangkan anak-anak Indonesia.

Di Kalimantan Barat menjelang jatuhnya Pemerintahan Hindia Belanda di kota Pontianak baru ada dua buah yaitu Sekolah Dagang (*Handelsschool*) dan MULO (Sekolah Menengah Umum Pertama) yang diasuh oleh Misi Katolik.

Pada masa pendudukan Jepang di kota Pontianak terdapat sekolah menengah yang bernama *Putra Guru Gakko* Kepala sekolah yang pertama adalah seorang Jepang yang dikenal sebagai Prof. Murakawa 56) Sekolah yang terdapat pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih ada dan tetap dibuka seperti *OVVO* dan *CVO*, atau Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Indonesia I (satu), Sekolah Pertanian dan Sekolah semacam SKP.⁵⁷⁾ Tetapi sekolah-sekolah yang sejenis diintegrasikan yang berarti hapusnya dualisme atau Sistem persekolahan yang berdasarkan golongan dalam masyarakat. Di setiap itbukota kabupaten terdapat Sekolah Rakyat atau Sekolah Indonesia I (Pertama) : di Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang dan Ketapang.

Seperti misalnya Sekolah Rakyat yang bermacam-macam jenisnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda menurut golongan dalam masyarakat diintegrasikan menjadi satu yaitu satu Sekolah rendah yang disebut

56) Drs. Soedarto, et.al. *Sejarah Daerah Kalimantan Barat, 1900 – 1942*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD), 1978/1979. hal. 135 dan hasil wawancara dengan Drs. Samza, tgl. 12 - 11 - 1979.

57) Hasil wawancara dengan Drs, Samza, Pebruari 1981.

Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat. Sekolah-sekolah desa menjadi Sekolah Pertama. Dengan demikian terdapat Sekolah Rakyat Enam tahun termasuk Sekolah Pertama.

Pada waktu itu hanya sekolah pemerintah saja yang boleh berdiri sedangkan sekolah Swasta semuanya ditutup. Sejak pertengahan Juli 1942 tentara darat (Rikugun) yang memerintah Kalimantan Barat sejak 2 Pebrari 1942 ditarik dan diganti oleh angkatan laut (Kaigun), Mulai saat itu Kalimantan Barat berada di bawah kekuasaan armada Selatan Kedua. Armada Selatan Kedua memegang kekuasaan di Indonesia Timur dan Kalimantan yang berpusat di Makasar. Pemeritahnya disebut *Minseifu* yang terdiri atas Departemen Keuangan Kehakiman. Pengangkatan dan Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perindustrian dan Urusan Umum Wilayah Kekuasaannya meliputi pulau Borneo (Kalimantan, Selebes (Sulawesi), Sunda Kecil (Nusa Tenggara dan Bali), Maluku dan Papua (Irian Barat).⁵⁸⁾

Pemerintah Angkatan Laut ini lebih kejam dari pemerintahan Angkatan Darat terutama di Kalimantan Barat. Jepang mau menjepangkan rakyat Kalimantan Barat. Para Pastur, Bruder, dan Suster yang berasal dari Negeri Belanda, semuanya ditangkap dan ditawan di Kampung di Serawak. Dengan demikian pengasuh sekolah-sekolah misi tidak ada dan sekolah semua ditutup. Rakyat dilarang mengadakan perkumpulan atau berkumpul. Organisasi yang ada hanya berupa organisasi musik dan olah raga lain tidak. Itupun diawasi dengan ketat oleh pemerintah balatentara Jepang. Umat Islam setelah sembahyang Jum'at tidak berani berkumpul-kumpul tetapi terus pulang ke rumah masing-masing supaya tidak dicurigai.⁵⁹⁾ Oleh karena itulah maka sekolah-sekolah tidak dapat dibuka selain memang dilarang. Murid-murid dari Sekolah Pemerintah bukan diajarkan ilmu pengetahuan melainkan sebagian besar diperintahkan kerja bakti (*kenrohoshi*) bagi murid-murid di asrama, bengkel-bengkel dan mengumpulkan bahan-bahan untuk kepentingan umum. Selain itu murid-murid diberi latihan-latihan jasmani berupa latihan kemiliteran (*Kyoren*). Untuk menanamkan semangat Jepang, murid setiap hari harus mengucapkan sumpah setia dan diajarkan serta menyanyikan lagu-lagu Jepang seperti Hino maru yang dinyanyikan dengan penuh rasa gembira sambil bersemam pagi atau bertaiso; lagu Kimigayo yaitu lagu kebangsaan Jepang yang hanya boleh dinyanyikan dalam upacara resmi, lagu Umiyekaba yang harus dinyanyikan setiap pagi sambil menghadap dan menyembah matahari terbit yang mereka anggap sebagai dewi matahari. Menurut orang Jepang menyanyikan lagu itu sebagai pemujaan dan ucapan rasa syukur masih dapat bertemu dengan Sang dewi dari hari ke hari.

58) Sartono Kartodirdjo, et.al. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Dept. P dan K, hal 5, 8, 156.

59) Hasil wawancara dengan Drs. Samza, tgl. 12 - 11 - 1979.

Para pelajar diberi pelajaran bahasa Jepang, menyanyi (uta) nyanyian Jepang, tari-tarian Jepang (odori), tata kebiasaan dan adat istiadat Jepang dengan maksud agar bahasa dan adat istiadat Jepang populer. Ceritera-ceritera rakyat Jepang seperti Monotaro diperkenalkan melalui anak-anak sekolah.

Selain kepada para siswa pelajaran bahasa Jepang juga secara intensif diberikan kepada para guru dan para pegawai, karena kemahiran berbahasa Jepang menjadi ukuran bagi seseorang untuk dapat dianggap bersimpatik kepada tentara Jepang. Tujuan Jepang adalah menyimpangkan seluruh penduduk dan melalui bahasa merupakan salah satu jalan untuk menyimpangkan rakyat Kalimantan Barat.

Oleh karena murid-murid terlibat dalam kesibukan-kesibukan yang luar biasa maka guru-gurunya juga ikut sibuk. Bersama dengan pegawai pemerintah lainnya, guru adalah kelompok yang disibukan dengan menyolok.⁶⁰⁾

Jepang tidak membedakan golongan dalam memberikan kesempatan pendidikan. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan-kesempatan untuk menerima pendidikan atau kesempatan pendidikan terbuka lebar bagi seluruh bangsa Indonesia hanya saja sekolahnya yang terbatas. Satu hal yang menarik dalam dunia pendidikan pada zaman Jepang, bahwa pendidikan menjalani mobilitas. Guru-guru yang dulunya tidak bisa mengajar di SD Belanda (*Eropeschool*) dan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), pada zaman Jepang bisa mengajar di semua Sekolah Rakyat sehingga menambah kepercayaan kepada diri sendiri dan tidak dibeda-bedakan lagi. Hal ini penting bagi perjuangan kita untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada waktu Belanda ingin menjajah lagi setelah kekalahan balatentara Jepang dari sekutu.

Pengintegrasian pendidikan yang dimulai zaman Jepang ini diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tanpa memandang golongan masyarakat sampai sekarang.

b. PENDIDIKAN ZAMAN KEMERDEKAAN

Sesuai dengan semangat dan tekad segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang berkeinginan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka para pemimpin masyarakat, tokoh agama dan beberapa perintis Kemerdekaan di daerah inipun tidak mau ketinggalan untuk ikut serta mengisi kemerdekaan, khususnya dalam lapangan pendidikan.

60) Drs. Soedarto, et.al.op.cit.hal. 137 – 138 dan I. Djumhur, dan Drs. H.Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Penerbit C.V. Ilmu, Bandung, Cetakan ke - 7, 1976, hal. 195 – 198.

Usaha mereka dimulai dengan membenahi lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada (swasta) dan merintis pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh setempat yang menetap di daerah ini, yang pernah menuntut ilmu di luar daerah, maupun para pendatang dari daerah lain (Jawa dan Sumatera).

Semangat para tokoh agama (baik Islam, Katolik maupun Protestan), selain didorong oleh tuntutan Proklamasi 17 Agustus 1945 juga mereka merasa wajib melaksanakan tuntutan atau kehendak agama mereka. hal ini terbukti, bahwa sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama sudah tumbuh sejak awal abad ini. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa Madrasah Sultaniyah di kota Sambas, secara resmi berdiri pada tahun 1868 dengan titah Sultan Muhammad Tsafiuddin (Sultan Sambas) pada waktu itu.⁶¹⁾ Madrasah Sultaniyah tersebut didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh agama setempat yang menuntut ilmunya di luar negeri misalnya H.M. Basuni Imran (di Kairo), H.Abd. Rachman Hamid (di Mekah) dan lain-lain. Namun, hasrat dan keyakinan mereka tidak akan mudah terlaksana, apabila tidak ditunjang oleh Sultan Tsafiuddin yang membiayai sepenuhnya gaji guru-gurunya. Selain itu, biaya juga diperoleh dari masyarakat Islam di daerah itu sebagai pengumpulan dari zakat fitrah, wakaf, derma ahlul Khair (sumbangan dari para mukhlisin), dan lain-lain.⁶²⁾

Pada umumnya, lembaga pendidikan Islam ini dikelola atau dibina oleh suatu Yayasan, baik yang berdiri sebelum lembaga pendidikan itu berdiri maupun sesudahnya.

Lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama Katolik, memberikan gambaran yang menggembarakan pula di daerah Kalimantan Barat. Pada dasarnya, pengelolanya adalah gereja. Gereja yang ingin membina manusia seutuhnya, selain memberikan pelajaran agama juga memberikan pelajaran lainnya, melalui pendidikan formal, yaitu sekolah. Walaupun pada awal karyanya, gereja hanya mampu mendirikan Sekolah dalam jumlah yang sangat terbatas pada beberapa ibukota Kawedanan saja, akan tetapi pada awal Kemerdekaan (1945) jumlah sekolah yang telah didirikan oleh empat Keuskupan di Kalimantan Barat. (Pontianak, Sintang, Ketapang dan Sekadau), sudah berjumlah 32 buah.⁶³⁾

Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh golongan umat Kristen Protestan juga sudah mulai didirikan sebelum Kemerdekaan. Gereja Protestan yang ada di Kalimantan Barat terdiri dari : GKKB (*Gereja Kristen Kalimantan Barat*), HKBP (*Huria Kristen Batak Protestan*),

61) Hasil wawancara dengan Hifni Imran dan Munawar Kalahan

62) *Loc.cit.*

63), *Kenangan 75 Tahun Mandirinya Gereja Katolik di Kalimantan Barat (1905 - 1980)*, op.cit. hal.23.

GPIB (*Gereja Protestan Indonesia Barat*) dan *Gereja SILOAM*. Di antara sekian Gereja, maka GKKB pada tahun 1938 telah mendirikan Sekolah setingkat Sekolah Dasar (*Volkschool*) yang terletak di Kampung Bali Pontianak, dengan sebutan LOK YUE yang artinya Senang Atas Pendidikan.⁶⁴⁾ Tidak berbeda dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak lain, bahwa GKKB juga mempunyai tujuan tambahan, yaitu hendak membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam pendidikan.

Di daerah Kabupaten Sambas, Sekolah Protestan yang pertama kali didirikan oleh Misi Protestan Bethesda ialah di Sei Betung pada tahun 1918 yang merupakan Sekolah Dasar tiga tahun, dengan pendeta pertamanya ialah Dortenton.⁶⁵⁾

Selain usaha-usaha tersebut di atas, di daerah-daerah lain juga berdiri sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat, dalam bentuk Madrasah dan lain-lain, terutama menjelang Kemerdekaan. Hal ini merupakan modal yang tidak ternilai harganya dalam mengembangkan berdirinya sekolah-sekolah baik Swasta maupun Pemerintah setelah Proklamasi, dengan perkembangannya hingga sekarang sebagai berikut

1. Yang diusahakan oleh Swasta

Faktor pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan, demikian juga untuk membina yang sudah ada, adalah dengan terbunuhnya tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, dan kaum terpelajar lainnya akibat kekejaman penjajah Jepang di daerah ini. Menjelang dan awal Kemerdekaan, masyarakat Kalimantan Barat boleh dikatakan krisis pemimpin, karenanya lebih meningkatkan usaha-usaha di lapangan pendidikan.

Sebagai kelanjutan daripada Sekolah-sekolah/Madrasah yang sudah ada sebelum Kemerdekaan, sampai dengan tahun 1950, Madrasah Ibtidaiyah yang ada antara lain di Sambas (Tarbiyatul Islamiyah perubahan dari Madrasah Sultaniayah) di Pemangkat, di Jongkong (Hidayatul Mustaqiem), di Mempawah/Sei Bakau Basar (Alfalah), di jl. Merdeka Barat Pontianak (Rawdhah Islamiyah), di Kp. Mariana dan Kp. Bangka Pontianak (Islamiyah). Bagi Madrasah-madrasah yang semula hanya mengutamakan pendidikan agama, kemudian kurikulumnya berubah dengan dimasukkannya mata pelajaran umum.⁶⁶⁾ Sebagai contoh,

64) Hasil wawancara dengan *Albert Sutjiadi*, Dokter dan Pendeta GKKB, Pontianak, tgl. 4 April 1981.

65) Hasil wawancara dengan *Jacobus Saman*, Pensiunan Penilik Sekolah Swapraja Sambas dan Landak, tgl. 13 - 1 - 1981.

66) Hasil wawancara dengan *Chatib Syarbaini*, Dosen Fak.Tarbiyah IAIN, Syarif Hidayatullah Cabang Jakarta di Pontianak.

dalam daftar pelajaran menurut "Rencana 1953" pada Madrasah Tarbiyatul Islamiyah Sambas telah pula memasukkan mata pelajaran Berhitung, Ilmu Bumi, Ilmu Ukur, Gerak Badan, walaupun kalau diperhatikan, rencana 1953 di antara pelajaran-pelajarannya kurang sesuai (agak tinggi), untuk tingkat dasar.⁶⁷⁾ Perubahan kurikulum mana, selain hanya tuntutan zaman, juga sebagai akibat dari diterimanya Subsidi dari Pemerintah.

Dengan kembalinya orang-orang asal Kalimantan Barat dari perantauan (Jawa) dan masuknya orang-orang dari luar daerah (Jawa dan Sumatera), maka lembaga pendidikan yang berlatar belakang Islam mulai meningkat. Pada tanggal 2 Agustus 1954 di Pontianak berdirilah Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) dan *Sekolah Menengah Islam Pertama* (SMIP) yang masih berstatus Swasta, dengan Kepala Sekolah yang pertama yaitu Chatib Syarbaini (keduanya dirangkap). Atas usaha-usaha dari para pendiri, pengasuh dan bantuan dari Pemerintah Daerah, maka pada tahun 1958 PGAP dinegerikan, yang dalam perkembangannya menjadi PGA VI Tahun (PGAA) dan sekarang PGA Negeri (PGAN).

Pada tahun 1960 sudah menamatkan siswanya. Kemudian pada tahun 1958, SMIP diasuh oleh sebuah Yayasan yaitu *Yayasan Raudhah Islamiyah*, yang pada waktu itu Kepala Sekolahnya bernama Sukma.

Pada tahun 1959 di Pontianak didirikan *Sekolah Menengah Islam Atas* (SMIA). Sebagai pendiri sekaligus Kepala Sekolahnya ialah Chatib Syarbaini. Dalam rangka untuk membentuk calon-calon Mahasiswa Institut Agama Islam, dan dalam rangka untuk merintis berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Islam, maka SMIA dirubah menjadi Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (Persiapan IAIN). Sebagai Direktur pertamanya ialah Drs. Malikut Adil.

Sebagai kelanjutan daripada cita-cita para tokoh Agama (Islam) dan tokoh-tokoh mesyarakat di daerah ini, maka pada tanggal 3 Agustus 1965 didirikan Fakultas Tarbiyah Pontianak, dengan Dekan pertamanya ialah Drs. Malikul Adil. Dalam perkembangannya, Fakultas yang swasta tadi, dinegerikan pada tanggal 6 Agustus 1969 bersama dengan Fakultas Ushulludin Singkawang oleh Menteri Agama K.H.Moh. Dachlan. Setelah dinegerikan, Fakultas Tarbiyah Pontianak menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak dengan Dekan pertamanya Drs. Achmad Lujito, sedangkan Fakultas Ushulludin Singkawang menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Singkawang.

Tentang pesatnya pertambahan jumlah lembaga pendidikan (Islam) di daerah Kalimantan Barat, dapat dikutip dari Memorie Serah-Te-

67) Tamrin Gani, *Partisipasi orang Islam kota Sambas Dalam Usaha Peningkatan Madrasah Tarbiyatul Islam Sambas* (Kalimantan Barat), 1979, hal. 24.

rima Gubernur/KDH Propinsi Kalimantan Barat JC Oevaang Oeray tanggal 18 Juli 1966 lampiran D-3, bahwa bertambahnya jumlah Sekolah selama periode 1959 – 1965 sebagai berikut :

- *Madrasah Ibtidaiyah* (SD) bertambah : 119 buah.
- *Madrasah Tsanawiyah* (SLP) bertambah : 13 buah.
- *Madrasah Aliah* (SLA) bertambah : 2 buah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa hasrat masyarakat untuk memajukan lapangan pendidikan makin meningkat. Hal ini lebih memungkinkan lagi, dengan adanya subsidi Pemerintah terhadap sekian banyak sekolah.

Selain hal tersebut, organisasi-organisasi kemasyarakatan juga tidak mau ketinggalan dalam mengambil bagian. Dapat dikemukakan sebagai contoh, yaitu Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Barat telah mendirikan sebuah SMP di Pontianak pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan Kepala Sekolahnya yang pertama ialah Prawoto. Kemudian disusul dengan pendirian SMA pada tanggal 1 Agustus 1961, dengan Kepala Sekolah yang pertama ialah Drs. Nurdin Siregar. Kemudian beberapa tahun kemudian didirikan pula SMEA.

Ada pula Organisasi yang dipelopori oleh masyarakat keturunan Arab yang ikut menangani lapangan pendidikan, misalnya Madrasah Arab yang kemudian kurikulumnya disesuaikan), yaitu Madrasah Bawamai di Pontianak didirikan pada tahun 1956 oleh Ali Bajanduh dan Kusyairi Yanis, dengan Kepala Sekolahnya yang pertama Abdul Kadir Al Idrus.

Demikian pula Organisasi masyarakat dari Sulawesi yang tergabung dalam *Darul Da'wah wal Irsyad* (DDI), mendirikan SMP di Pontianak dan beberapa Madrasah di daerah-daerah dimana penduduknya banyak masyarakat Sulawesi Selatan.

Namun tidak semua usaha masyarakat itu berjalan sukses. Di antara Sekolah atau Madrasah yang pernah berdiri, ternyata sampai pada suatu masa yang suram dan terpaksa ditutup. Sebagai contoh, *SMP Bawamai* yang pernah berdiri, akhirnya harus tutup. Hal semacam ini banyak tergantung dari segi pembinaan, manajemen dan faktor-faktor lain.

Sebagai gambaran, dapat diungkapkan keadaan Madrasah di Kalimantan Barat pada tahun 1973.⁶⁸⁾

68) Boelaars, HOfm, Cap. et. al. *Situasi Sekolah-sekolah Katolik Propinsi Kalimantan Barat 1976*, Jilid I, Pusat Penelitian Atma Jaya, 1976, hal. 14.

TABEL I
KEADAAN MADRASAH DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1973

Lokasi	Aliyah	Tsanawiyah	Ibtidaiyah	Diniyah	Raudatulatfal
Kodya Pontianak	4	6	10	14	2
Kab. Pontianak	—	6	68	11	—
Kab. Sambas	2	10	74	18	1
Kab. Sanggau	—	2	2	8	—
Kab. Sintang	1	3	2	3	—
Kab. Kapuas Hulu	—	3	14	5	—
J u m l a h	8	31	170	76	3

Seperti yang dikerjakan oleh Yayasan semacam di daerah lain, di Pontianak juga telah berdiri sebuah *Yayasan Mujahidin* yang usaha utamanya adalah mengelola Mesjid Raya Mujahidin (Mesjid terbesar di daerah ini), telah pula mendirikan sebuah SMP dan SMA yang diberi nama SMP dan SMA Mujahidin yang berlokasi di kompleks Mesjid Mujahidin pula.

Dengan modal 32 buah sekolah yang sudah ada pada awal Kemerdekaan (1945), Gereja Katholik di Kalimantan Barat terus mengembangkan usahanya di lapangan pendidikan. Apalagi apabila diingat bahwa pada saat itu, Gereja Katholik Kalimantan Barat sudah berusia 40 tahun (yaitu dengan berdirinya Prefektur Apostolik Borneo pada tahun 1905).⁶⁹⁾ Di bidang pendidikan formal maupun non formal, gereja telah mencurahkan perhatian yang sangat besar dengan mendirikan sekolah-sekolah dan asrama-asrama, yang sekaligus ingin membuktikan diri sebagai partner Pemerintah dalam usahanya untuk ikut serta membina kehidupan bangsa, melalui pembinaan di lapangan sosial-ekonomi, kesehatan, maka lapangan pendidikanpun menjadi sasaran utama (sudah barang tentu penyebaran agama merupakan tujuan paling utama).

Penyebaran gereja bukan saja dimulai di Pontianak, tetapi pada awal berdirinya sudah dimulai sekaligus di pedalaman Kalimantan Barat, misalnya selain di Pontianak dan Singkawang, juga di Nanga Sejiram.

69), *Kenangan 75 tahun Mandirinya Gereja Katholik* di Kalimantan Barat (1905 – 1980), *op.cit.* hal.5.

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa di pedalaman seperti Nanga Sejiram ini, gereja Katholik telah mulai mendirikan sekolah, sebelum orang lain memulainya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Suku Daya di pedalaman Kalimantan Barat, pada awal abad ini masih terisolasi dengan masyarakat lain. Cara bertani masih berpindah-pindah, pergaulan mereka dengan golongan lain masih tertutup. Dengan latar belakang itulah, maka pada awal mula berdirinya gereja di Kalimantan Barat, pada tahun 1905 mendirikan lagi sekolah di Nanga Sejiram. (Pernah didirikan sekolah di tempat yang sama pada tahun 1894, tetapi tahun 1903 terpaksa tutup karena tidak mendapat dukungan murid. Dengan adanya sekolah di Nanga Sejiram ternyata telah membawa efek yang positif, yaitu tampilnya masyarakat suku Daya ke dalam pergaulan masyarakat. Baik dengan suku-suku lainnya dalam masyarakat besar di Indonesia.⁷⁰⁾

Dengan motivasi dan hasil tersebut, maka umat Katholik di daerah ini terus meningkatkan usahanya setelah kemerdekaan. Daerah Singkawang yang termasuk daerah yang pertama menjadi objek penyebaran agama Katholik. Maka pada tahun 1949 pihak misi mendirikan *Sekolah Seminari Nyarumkop*, yang merupakan perpindahan dari Seminari Pontianak yang didirikan tahun 1937. Sebelum Perang Dunia II telah di perhatikan imam di wilayah Pontianak. Tempat itu ialah di kota Pontianak sendiri sedari tahun 1933 sampai 1941. Perang Dunia II juga melanda kepulauan Nusantara, termasuk Pontianak, semua missionaris di-internir oleh Jepang ke Kuching. Seminar Pontianak ditutup.

Sesudah Perang Dunia II usai, para missionaris kembali ke posnya masing-masing. Sejarah Seminari Menengah St.Paulus Nyarumkop bersemi dengan pembicaraan P.Honorius Ofm. Cap. bersama calon pendiri P. Canutus Ofm.Cap. Kesimpulannya, P.Canutus Ofm.Cap. meninggalkan parokinya Raba dan menuju Nyarumkop pada 31 Juli 1949. Pelajaran pertama Seminar Menengah Nyarumkop dimulai pada tanggal 11 Agustus 1949, karena belum ada gedung tersendiri terpaksa mondok pada SD-Sub. Kompleks persekolahan Nyarumkop. Kekayaan Seminari baru hanya berupa tiga bangku, serta kursi untuk guru dan murid. Sebenarnya diharapkan 6 orang siswa, tapi 4 orang siswa tidak muncul karena dilarang oleh orang tuanya, (dua orang siswa itu ialah Sdr. A.Yan dan Ngo Liah).

Mata pelajaran utama ialah bahasa Belanda 18 jam/minggu -agama 6 jam/minggu. Bahasa Indonesia – Ilmu Bumi–Sejarah Indonesia–berhitung/aljabar 6 jam seminggu. Sejak 1950, kedua siswa diberikan instruksi ilmu rohani/askese, sekali seminggu, dan berdoa rosario.

Setelah setahun, 15 Juli 1950, kedua siswa dikirim ke Tomohon untuk meneruskan studi mereka. A. Lyah kembali lagi ke Kalimantan Barat 18-6-1952 (mengundurkan diri), dan temannya A. Ayan setelah

70) *Ibid.*, hal. 11.

tujuh tahun di Seminari Menengah, melanjutkan studinya ke Seminari Tinggi Parapat sampai tingkat III teologi, lalu mengundurkan diri (tujuan menjadi imam gagal).

Tahun kedua Seminari Nyarumkop dimulai 1-8 1950, dengan siswa 16 orang, disaring dari 24 orang pelamar. Umur mereka bervariasi dari 15 sampai 25 tahun.

Suasana kehidupan rohani ditambah dengan setiap harinya bacaan rohani selama 15 menit sebelum tidur. Mata pelajaranpun ditambah a.l. bahasa Latin setiap hari.

Keadaan gedung dan tempat makan tidur tidak mengizinkan lagi, maka pada tanggal 16-4-1951, dimulailah pembangunan gedung seminari Nyarumkop dimintai bantuannya secara gotong royong meratakan tanah. Tanggal 3 Juli 1951, P. Martinus Ofm.Cap. dikukuhkan menjadi direktor Seminari menengah Nyarumkop yang pertama. Sementara itu pembangunan gedung berjalan terus, akhirnya pada tanggal 6 Januari 1952, gedung Seminari permanen diberkati oleh Mgr. L.van Kessel SMM. Siswa semakin banyak. P. Martinus disamping direktur seminari, juga merangkap pastor paroki dan pimpinan umum persekolahan Nyarumkop, untuk tidak membebankan tugas lebih banyak dan padat, dan supaya pendidikan calon imam sungguh mendapat perhatian, maka P. Honorius diangkat menjadi direktur baru seminari menggantikan P. Martinus pada 13 Oktober 1952. Dalam usahanya mengembangkan pendidikan yang bukan agama semata-mata, maka pada tahun 1952 di tempat yang sama (desa Nyarumkop) didirikan SMP. Dalam rangka membantu Pemerintah dalam pengadaan guru, maka pada tahun 1959 didirikan SGA, yang kemudian memperoleh subsidi Pemerintah, sebelumnya telah didirikan SGB. Pengadaan tenaga guru ini minimal dalam rangka pengisian keperluan tenaga guru di sekolah-sekolah Katholik. Sedangkan untuk menampung tamatan murid-murid SMP Nyarumkop sendiri dan sekitarnya, maka pada tahun 1970 di tempat yang sama didirikan sebuah SMA.⁷¹⁾

Di kota Pontianak juga tidak luput dari usaha-usaha memperbaiki sekolah-sekolah. Setelah sekian lama didirikan SD dan SMP Bruder, maka pada tahun 1963 berdiri pula SMA Santo Paulus. Berhubung makin meningkatnya permintaan masyarakat akan Sekolah Lanjutan Atas, maka pada tahun 1980 di daerah Jl. Akhmad Yani Pontianak, berdiri pula sebuah Sekolah Menengah Atas Sugiopranoto.

Jauh sebelum tahun 1980, di daerah yang sama telah lahir pula sebuah SMP Santo Petrus pada tahun 1950. Sebagai pendiri yang sekaligus pimpinan pertama SMP Santo Petrus tersebut adalah Pastur Andeas L.Y. Kemudian pada Sekolah Santo Petrus itu juga, pada tahun 1953 telah

71) Hasil wawancara dengan Drs. Soedarto, tanggal 30 - 3 - 1981

didirikan pula SMA Santo Petrus. Berdirinya SMA ini, didesak oleh makin terbatasnya daya tampung SMA Negeri di kota Pontianak. Sehingga dengan berdirinya SMA Santo Petrus ini siswa-siswa tamatan SMP Santo Petrus dan sekitarnya dapat tertampung.⁷²⁾

Daerah Kalimantan Barat yang dibagi menjadi empat wilayah Gerejani yaitu : Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Ketapang, Keuskupan Sintang dan Prefektur Apostolik Sekadau, masing-masing berusaha mengembangkan perluasan usaha-usaha pendidikan, yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan paroki-paroki. Seluruh jumlah Sekolah Katholik yang resmi, berada di bawah sebelas Yayasan yang telah tergabung dan *Majelis Pendidikan Katholik Kalimantan Barat*, yang telah tersebar di keempat wilayah gerejani tersebut, dengan penyebaran yang tidak merata. Selain di Keuskupan Agung Pontianak yang memang mempunyai wilayah yang luas, terdapat delapan Yayasan, di Keuskupan lainnya masing-masing hanya terdapat satu Yayasan.

Dengan adanya sebelas Yayasan yang bergerak dilapangan pendidikan tersebut, di seluruh Kalimantan Barat terdapat 237 Sekolah Katholik resmi dengan jumlah murid 45.772 orang pada tahun 1976. Dari 237 Sekolah ini, lebih dari separohnya yaitu sebanyak 125 sekolah (52,7%) berada di Keuskupan Agung Pontianak, sedangkan yang lain masing-masing 41 sekolah di Keuskupan Ketapang, 38 sekolah di Keuskupan Sintang dan 33 sekolah di Prefektur Apostolik Sekadau. Tingkatan dan penyebarannya menurut Keuskupan masing-masing adalah sebagai berikut.⁷³⁾

TABEL II

Keuskupan Tingkat an Sekolah	Pontianak	Ketapang	Sintang	Sekadau	Jumlah
STKK	9	—	—	—	9
SD	94	36	32	29	191
SMP	14	2	3	3	22
SLP Kejuruan	3	3	2	—	8
SMA	4	—	—	—	4
SLA Kejuruan	1	—	1	1	3
Jumlah	125	41	38	33	237

72) Hasil wawancara dengan pimpinan SMP/SMA Santo Petrus tanggal 24 Maret 1981.

73) Boelaars, H.Ofm Cap. et.al. op.cit. hal. 50 dan 56.

74) *Ibid.* hal. 58

Meningkatnya usaha-usaha di lapangan pendidikan Katholik ini, juga tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong lainnya, satu diantaranya adalah adanya bimbingan dari Pemerintah, subsidi dan bantuan Pemerintah

Di antara 237 Sekolah Katholik tersebut, 100 buah sekolah (42,2%) mendapat subsidi, 43 buah sekolah (18,1%) mendapat bantuan dan selebihnya 94 buah sekolah (39,7%) adalah swasta. 74)

Dengan adanya bimbingan, subsidi dan bantuan dari Pemerintah terhadap Sekolah Katholik di daerah ini, maka lebih memungkinkan lagi untuk menyediakan tenaga guru yang memadai, baik dalam kualitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, lebih dimungkinkan lagi, mengingat Yayasan tersebut juga menyediakan wadah tersendiri, yaitu membuka SPG yang sudah tentu mengutamakan keperluan sendiri dahulu.

Dari data tahun 1976 tercatat sebagai berikut : jumlah guru Sekolah Katholik 1.292 orang yang terdiri dari 956 pria dan 336 wanita yang masing-masing mengajar di Sekolah bersubsidi 592 orang, di sekolah bantuan 144 orang dan selebihnya 486 orang mengajar di sekolah swasta : 75)

Walaupun tidak semua sekolah Katholik dapat diketahui tepat tahun berdirinya, akan tetapi sebagian besar dapat diketahui sebagai berikut : 76)

Yang didirikan antara tahun 1906 – 1945 :	32 buah
Yang didirikan antara tahun 1946 – 1950 :	33 buah
Yang didirikan antara tahun 1951 – 1955 :	20 buah
Yang didirikan antara tahun 1956 – 1960 :	36 buah
Yang didirikan antara tahun 1961 – 1965 :	35 buah
Yang didirikan antara tahun 1966 – 1970 :	26 buah
Yang didirikan antara tahun 1971 – 1975 :	9 buah
Yang didirikan antara tahun 1975 – :	1 buah

Demikian situasi pendidikan yang berlatar belakang agama Katholik, yang pada tahun 1980/1981 sudah ada perubahan baik dalam jumlah sekolah, jumlah murid maupun tenaga guru.

Sekolah-sekolah yang diusahakan oleh umat Kristen Protestan di Kalimantan Barat, ternyata tidak sebanyak yang diusahakan oleh umat Katholik. Walaupun berdirinya Sekolah Protestan sudah dimulai sejak tahun 1918 di Belitung Kabupaten Sambas, berupa Sekolah Dasar 3 tahun (setingkat *Volksschool*), akan tetapi perkembangannya kurang pesat.

75) *Ibid.* hal. 24 – 67

76) *Ibid.* hal. 54

Di antara umat Gereja Protestan yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 1967 mendirikan suatu *Yayasan Pendidikan Kristen* dengan singkatan YPK, yang bergerak dalam lapangan pendidikan, baik berusahamendirikan sekolah-sekolah baru maupun mengelola atau membina Sekolah-sekolah Kristen yang sudah ada. Misalnya Volks School di Kampung Bali Pontianak didirikan tahun 1938 oleh GKKB mula-mula hanya empat lokal, pada tahun 1950 ditambah menjadi delapan lokal. Pada tahun 1965 menjadi 14 lokal, dan tahun 1970 menjadi 19 lokal. Karena permintaan masyarakat akan sekolah semakin meningkat, sedangkan lokal yang ada tidak mampu menampung lagi, maka pada tahun 1970 didirikan SD pada waktu Sore di tempat yang sama. Pada tahun 1965 terjadi perubahan nama bagi SD tersebut menjadi SD Swasta Protestan. Karena Yayasan belum mampu mendirikan sekolah lagi dengan adanya masterplan Kotamadya Pontianak yang mengharuskan SD ini dipindahkar dari tangan kota (daerah pertokoan). Maka pada tahun 1978 sekolah ini dipindahkan ke lokasi baru di daerah Jalan A.Yani Pontianak, dengan jumlah lokal bertambah menjadi 24 lokal. Kerjasama antara GKKB dengan Yayasan Pendidikan Kristen (yang sebenarnya berdiri sendiri terlepas dari Gereja), pada tahun 1979 mendirikan SMP Immanuel sore yang tempatnya menumpang di SD Immanuel. Sedangkan SMP dan SMA YPK yang sudah ada dan berlokasi tidak berjauhan dengan SD Swasta Kristen di tengah kota, bersamaan dengan kepindahan SD tersebut, dipindahkan pula ke lokasi Jalan A.Yani. Sebagai karya GKKB tahun 1980, telah berhasil mendirikan sebuah Sekolah Taman Kanak-kanak yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Pontianak, bersamaan dengan berdirinya Gereja yang baru di tempat yang sama.⁷⁷⁾

Umat Kristen yang bergabung dalam Gereja GPIB Pontianak yang berdiri sebelum perang, tidak ketinggalan pula berkarya dalam lapangan pendidikan, yang dipercayakan kepada sebuah Komisi Pendidikan GPIB Siloam Pontianak. Karena GPIB/SILOAM Pontianak adalah merupakan Gereja pembimbing di seluruh Kalimantan Barat (kecuali Singkawang), maka para pimpinannya tidak saja merasa wajib membina pendidikan di Pontianak saja, akan tetapi juga daerah-daerah lain. Oleh karena itu, pada awal tahun 1970, Komisi Pendidikan tersebut mendirikan lima buah sekolah yang terdiri dari empat buah SD dan sebuah SMP, dengan penyebaran sebagai berikut :

- SD Kristen SILOAM I di Sei Kajang (Kabupaten Sambas)
- SD Kristen SILOAM II di Elok Asam (Kabupaten Sambas)
- SD Kristen SILOAM V di Sei Ambawang (Kabupaten Pontianak)
- SD Kristen SILOAM VI di Sei Lingga (Kabupaten Pontianak)
- SMP SILOAM IV di Maran (Kabupaten Ketapang)

77) Hasil wawancara dengan Albert Sutjiadi, Dokter dan Pendeta GKKB Pontianak, tanggal 4 April 1981.

Karena kemampuan Komisi ini juga terbatas, maka bangunan fisik sekolah-sekolah tersebut terbuat dari bahan bangunan yang semi permanen. Sedangkan tenaga pengajarnya selain yang disediakan sendiri yaitu tamatan SPG dengan ditambah penataran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, juga di beberapa sekolah mendapat bantuan tenaga guru dari SD Inpres di sekitarnya. Atau, karena kekurangan tenaga guru, dibantu oleh guru-guru negeri yang pada sore hari tidak bertugas.⁷⁸⁾ Dengan demikian semakin penting adanya **kerjasama** yang erat antara Pemerintah, Swasta atau Organisasi Keagamaan.

Suatu bentuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu Organisasi masyarakat Cina di daerah ini, mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SLTA. Bahkan Universitas Rakyat juga pernah berdiri di Pontianak menjelang meletusnya G 30 S/PKI, Karena perkembangan politik dengan meletusnya G 30 S/PKI, maka sekolah-sekolah tersebut tutup.

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan Universitas Tanjungpura, pada permulaannya adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta. Berdirinya IKIP Bandung Cabang Pontianak antara lain didasari atas fakta kurangnya tenaga guru Tingkat SLTP di daerah Kalimantan Barat yang sangat dirasakan mendesak sekali. Sedang untuk mendatangkan guru-guru dari daerah lain khususnya dari pulau Jawa sebagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan pada masa lampau terlalu banyak menimbulkan persoalan yang terlalu sulit untuk dipecahkan atau diatasi, terutama mengenai perumahan yang sampai saat ini tetap merupakan problem bagi daerah Kalimantan Barat.

Di pihak lain fakta menunjukkan bahwa banyak pelajar tamatan SLTA (terutama SPG dan SMA) yang tak dapat melanjutkan pelajarannya ke pulau Jawa, karena memburuknya situasi ekonomi negara, yang sedikit banyak berpengaruh dalam situasi ekonomi keluarga.

Fakta-fakta tersebut di atas mendorong para pendidik di daerah Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak, dengan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk mencari penyelesaiannya.

Dalam usaha itu dapat dicatat peranan PGRI yang cukup besar artinya bagi berdirinya IKIP Bandung Cabang Pontianak di samping lembaga-lembaga resmi seperti Pemerintah Daerah dan Kantor Daerah Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (waktu itu Dep. P dan K masih terdiri dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP). Usaha-usaha para pendidik itu antara lain ditujukan untuk :

78) Hasil wawancara dengan J.J. Lesil (56 tahun) Ketua Komisi Pendidikan GPIB/SILOAM, Pontianak, tanggal 1 - 4 - 1981.

- a. Mendidik calon Guru SLTP dan SLTA, tingkat Universitas di daerah.
- b. Menampung hasrat masyarakat yang terdiri dari pelajar tamatan SLTA serta guru-guru untuk melanjutkan pendidikannya.

Sambutan yang sangat baik pada tahun 1964 dari Pemerintah Daerah terhadap inisiatif para pendidik melalui Gubernur J.C. Oevaang Oeray mencetuskan berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pada permulaan berdirinya tahun 1964 IKIP merupakan lembaga pendidikan Swasta yang dibiayai Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan tentang pendiriannya No. 83/Sek TU/64 tanggal 25 Nopember 1964.

Pada tahun itu juga atas usaha Drs. Wan Usman sebagai pimpinan yang dipercayakan Pemerintah Daerah, IKIP Pontianak dijadikan IKIP Cabang Pontianak sebagai Filial IKIP Bandung, sehingga dengan demikian setatusnya berubah menjadi IKIP Negeri. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan tugas pimpinan oleh Rektor IKIP Bandung dan dengan Keputusan Mentari PTIP No. 8008/Sekret/BUP/65 tanggal 28 September 1965 ditunjuk Sdr. Drs. Wan Usman sebagai Dekan Koordinator.

Perubahan status menjadi IKIP Bandung Cabang Pontianak (IKIP Negeri terhitung 3 Januari 1965) dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PTIP No. 75/1965 tanggal 30 April 1965. Dengan demikian IKIP Pontianak bukan merupakan IKIP yang berdiri sendiri dan berafiliasi dengan salah sebuah IKIP yang dibina oleh IKIP Bandung sebagai IKIP Pembina.

Para sponsor lainnya yang tak boleh dilupakan dalam lintasan sejarah FIP UNTAN yng perlu dicatat sebagai pendiri IKIP Bandung Cabang Pontianak ialah :

1. Muhammad Jusuf Sjueb -- Anggota BPH Seksi C Propinsi Kalimantan Barat.
2. Drs. Wan Usman -- Kepala Inspeksi SMA Propinsi Kalimantan Barat.
3. Drs. Abasuni Abubakar -- Kepala Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Barat.
4. Uray Alliudin Yusba -- Kepala SMA Negeri I Pontianak.
5. Beberapa tokoh PGRI lainnya.

Pada permulaan berdirinya IKIP Bandung Cabang Pontianak, dengan segenap kekurangan fasilitas dan tenaga dosennya banyak diperoleh bantuan dari Kantor Daerah Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Lembaga-lembaga Pendidikan lain di bawahnya. Bantuan itu antara lain

berupa : ruang kuliah bertempat di SMA Negeri I, SMEA dan SPG di samping diperkenalkannya tenaga guru tamatan Sarjana Muda menjadi Assisten di lingkungan IKIP Bandung Cabang Pontianak.

IKIP Bandung Cabang Pontianak pada saat berdirinya terdiri dari (tiga) Fakultas dengan (empat) Jurusan yakni :

1. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta : Jurusan Ilmu Pasti
2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial : Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Jurusan Ekonomi Koperasi
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni : Jurusan Bahasa Inggris.

Tokoh-tokoh yang dapat diketengahkan sebagai Pembinaan IKIP Bandung Cabang Pontianak antara lain :

- Dekan Koordinator : Drs. Wan Usman
- Pembantu Dekan Koordinator I : Drs Hadari Nawawi
- Pembantu Dekan Koordinator II : Drs. Abbasuni Abubakar
- Pembantu Dekan Koordinator III : S. Masyhor Almutahar, SH (baru diisi setelah yang bersangkutan Dosen Tetap pada tahun 1966).
- Dekan FKIE : Drs. Wan Usman
- Dekan FKIS : Dra. Haida Ramli
- Dekan FKSS : AA Kamaruddin

Staf Tata Usaha terdiri dari :

- Kepala Tata Usaha : Samza
- Kepala Bag. Keuangan : A. Hamid
- Pegawai-pegawai lainnya: Habibah^(@)
M. Noer.^(@)
A. Aziz
Sofjan Dasa
Machmud Kasim

^(@) diperbantukan dari Kantor Sensus dan Statistik.

Pada tahun 1967 ditambah Sdr. Sutini Ibrahim dan pada tahun 1968 ditambah Sdr. S. Anny dan Sdr. Ilham. Perlu dicatat pula bahwa sebelum menempati gedung baru di Jalan Sumatra, Kantor Tata Usaha dan Pimpinan menempati salah satu ruangan pada Kantor Gubernur lama di Jalan Rahadi Usman Pontianak.

Di samping staf Pimpinan dan Pegawai tersebut di atas, IKIP Bandung Cabang Pontianak dibina oleh DEWAN PEMBINA yang terdiri dari:

KETUA UMUM	:	J.C. OEVANG OERAY
KETUA	:	I. KAPING
SEKRETARIS I	:	DRS. WAN USMAN
SEKRETARIS II	:	URAY ALIUDDIN YUSBA
BENDAHARA I	:	IBRAHIM SALEH
BENDAHARA II	:	DRS. NURDIN

Dengan adanya perubahan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat, di mana Bapak SOEMADI Bc.H.K. diangkat menjadi Gubernur Propinsi Kalimantan Barat (sebelumnya wakil Gubernur) maka BADAN PEMBINA IKIP Bandung Cabang Pontianak mengalami reorganisasi sebagai berikut :

KETUA UMUM	:	SOEMADI Bc. H. K.
KETUA I	:	M. JUSUF SJU'EB
KETUA II	:	J.C. OEVANG OERAY
SEKRETARIS I	:	DRS. WAN USMAN
SEKRETARIS II	:	URAY ALIUDDIN YUSBA
BENDAHARA I	:	IBRAHIM SALEH
BENDAHARA II	:	DRS. NURDIN
ANGGOTA	:	M. HARUN

Dalam kenyataannya setelah beberapa tahun kuliah berjalan, tampak bahwa banyak mahasiswa yang kurang dapat mengikuti perkuliahan pada Jurusan-Jurusan yang telah disebutkan di atas karena sebagian besar mereka berasal dari SPG atau SGA. Oleh karena itu untuk menampung hasrat Mahasiswa dan Calon Mahasiswa lainnya yang berasal dari SPG atau SGA dipandang perlu segera membuka/mendirikan Fakultas Ilmiah Pendidikan.

Berdirinya FIP dalam lingkungan sebuah IKIP di samping alasan tersebut di atas dipandang penting mengingat arti dan peranan Fakultas tersebut dalam mempersiapkan calon-calon guru/pedidik.

Atas dasar pemikiran itu dimulailah usaha merintis Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 1966. Usaha itu dapat diwujudkan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Badan Pembinaan IKIP Bandung Cabang Pontianak No. 1/BP/IKIP/67 tanggal 15 Januari 1967.

Berdasarkan Surat Keputusan itu Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Jurusan Ilmu Pendidikan Umum mulai menerima Mahasiswa dan mulai kuliah-kuliahnya pada tahun Akademi 1967.

Dapat dicatat sponsor berdirinya FIP dalam lingkungan IKIP Bandung Cabang Pontianak Sdr. Drs. HADARINAWAWI yang sampai saat ini masih terus mengabdikan dirinya dalam pembinaan FIP UNTAN.

Pada saat berdirinya FIP dengan Jurusan Ilmu Pendidikan Umum mempunyai mahasiswa berjumlah 64 orang, masing-masing 20 wanita dan 44 orang pria dan pada tahun 1968 tercatat pula mahasiswa baru sebanyak 69 orang mahasiswa terdiri dari 20 wanita dan 49 orang pria.

Waktu berjalan terus, sejarah terlukis dan meninggalkan fakta yang menentukan existensi suatu lembaga termasuk FIP sebagai lembaga pendidikan.

Situasi politik negara ikut memberi warna terhadap perkembangan historis suatu lembaga pendidikan. Timbulnya pergolakan Politik pada tahun-tahun 1965 dan 1966 dan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai klimaknya dalam peristiwa G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 sebagai peristiwa yang dikutuk oleh bangsa Indonesia, membawa kegoncangan dan angin bagi pendidikan dan pengajaran di Indonesia.

Semangat Orde Baru memasuki seluruh aparat pemerintahan. Semangat itu masuk pula ke dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan serta Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Penyederhanaan di lingkungan kedua Departemen itu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membawa aspirasi-aspirasi baru bagi pembinaan dunia Pendidikan dan Pengajaran di Indonesia.

Kenyataan itu antara lain dimanefestasikan pula dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161/1967 tertanggal 16 Desember 1967 tentang Pengintegrasian IKIP Cabang di seluruh Indonesia ke dalam Universitas setempat (Menteri P dan K waktu itu adalah Mashuri SH).

Berdasarkan Surat Keputusan itu IKIP Bandung Cabang Pontianak harus melebur diri ke dalam lingkungan Universitas Tanjungpura.

Akan tetapi karena beberapa hal, maka pengintegrasian itu baru dapat dilaksanakan pada permulaan tahun akademi 1969. Dengan demikian pada permulaan tahun akademi 1969 IKIP Bandung Cabang Pontianak menjelma menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas keguruan Universitas Tanjungpura Pontianak.⁷⁹⁾

Dengan adanya dua Perguruan Tinggi Negeri dan sebuah Akademi, dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini ternyata daya tampungnya tidak memadai dengan permintaan masyarakat untuk ikut serta menikmati pendidikan tinggi di daerah ini. Diakui bahwa dengan adanya Perguruan

Tinggi tersebut di atas, sudah sangat menolong keperluan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencetak kader-kader pembangunan, khususnya yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Sebelumnya mereka harus belajar keluar daerah, baik atas biaya sendiri maupun sebagai siswa Ikatan Dinas dari berbagai Instansi. Sekarang pun, hal semacam itu masih berjalan akan tetapi hanya terbatas pada bidang-bidang studi di mana belum dapat ditempuh di daerah ini.

Mengingat bahwa permintaan masyarakat akan daya tampung pendidikan tinggi di daerah ini cukup besar yang dapat diukur dari bertambahnya Sekolah Tingkat Atas yang tidak kurang dari 15 buah dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini, maka tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, berhasil membentuk *Yayasan Panca Bhakti Pontianak* yang diketuai oleh H. Aliaswat Saleh. Yayasan yang mengabdikan antara lain di bidang pendidikan, telah berhasil mendirikan Akademi Pimpinan Perusahaan Panca Bhakti yang berkedudukan di Pontianak, yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1979.

Dipilihnya Akademi Pimpinan Perusahaan sebagai bukti pertama kalinya, selain dengan sasaran untuk ikut serta menggalakan jiwa wiraswasta di daerah ini, juga untuk menampung hasrat para usahawan dan karyawan perusahaan dalam meningkatkan karier dan profesinya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pontianak selain sebagai ibukota Propinsi, juga merupakan kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan di daerah ini. Dalam usianya yang menginjak dua tahun ini, dalam bulan April 1981 APP Pontianak memulai pula dengan pembangunan kampusnya. Mengenai kurikulumnya, selain disesuaikan dengan APP yang telah ada di daerah lain, juga disesuaikan dengan keperluan dunia usaha dewasa ini. Sedangkan tenaga pengajarnya tidak mengalami kesulitan, yaitu dengan diadakan kerjasama dengan Universitas Tanjungpura.

Dalam usianya yang belum dua tahun ini, Yayasan Panca Bhakti Pontianak bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak, telah mendirikan pula *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum* Panca Bhakti Mempawah di Mempawah, ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak. Peresmian berdirinya dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1980 oleh Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat Sudjiman.

79) -----, *Guide Book Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura*, 1974 - 1975. Sekretariat FIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1974, hal. 1 - 7

Kelangsungan hidup STIH Mempawah sangat dimungkinkan, mengingat potensi pelajar daerah itu memadai (sedikitnya didukung oleh empat buah SLA.), juga letaknya dari ibukota Propinsi tidak terlalu jauh (sekitar 65 km), sehingga memudahkan kerjasama dengan Universitas Tanjungpura. terutama dalam memenuhi kekurangan tenaga pengajar.

Latar belakang didirikannya STIH Mempawah yang telah menampung 107 mahasiswa pada tahun pertama, seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Sudjiman dalam pidato peresmiannya adalah atas pemikiran bahwa suksesnya pembangunan tidak terlepas daripada suksesnya bidang pendidikan.⁸⁰⁾

Sebagai Dekan pertama STIH Mampawah adalah Rachmad Sahu-din B.Sc, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Pontianak.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan dalam memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengabdian Yayasan Panca Bhakti Pontianak, maka dalam tahun 1981 ini juga di kota Sanggau ibukota Kabupaten Dati II Sanggau akan dibuka *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi*. Sedangkan di kota Sintang ibukota Kabupaten Sintang akan dibuka Pendidikan Tinggi yang mengenai (Jurusan) Sosial Politik.

Di kota Singkawang juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Cabang Jakarta pada tahun 1964 dan masih berstatus swasta, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, diteruskan oleh *STIH SOELTAN M. TSAFIOEDDIN* tahun 1978.

2. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

a. Sekolah Dasar

Dalam rangka melaksanakan pasal 31 UUD 1945, maka Pemerintah dengan segala dana dan daya, sudah mulai mendirikan Sekolah-sekolah Pemerintah sejak awal kemerdekaan. Selain mendirikan sekolah-sekolah maka pemerintah juga mendirikan kursus-kursus yang baru.

Sejak pendudukan Pemerintah balatentara Jepang maka Sekolah Dasar yang bermacam-macam pada zaman Pemerintah Hindia Belanda disatukan atau diintegrasikan menjadi satu jenis Sekolah Dasar bagi semua golongan dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia hanya meneruskan Sekolah Dasar yang dulu itu. Tetapi di Kalimantan Barat masa itu tetap seperti masa pemerintah Hindia Belanda karena Kalimantan tergantung dalam RIS. Oleh karena itu *Volkschool* atau Sekolah Rakyat tetap masih ada yaitu berlokasi di Gang Nurali (dulu). Demikian juga Sekolah Dasar - Sekolah Dasar jenis lain masih ada seperti *Hollandsch Inlandch School* (HIS) berlokasi di Jalan Tamar sekarang dan *Eropeesche*

80) *Harian Akcaya*, Pontianak, Selasa 2 Desember 1980, hal. 1

school berlokasi di Bank Negara Indonesia 1946 sekarang serta *Schakels-school* sekolah penghubung antara *Volkschool* dan *Mulo* berlokasi di Gang Mariana sedangkan *Hollandsch Chineesche School* (HCS) yang diselenggarakan oleh Misi Katolik terletak di Kampung Bali.⁸¹⁾

Di kota lain di Kalimantan Barat juga jenis-jenis sekolah ini masih tetap dipertahankan. Tetapi setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Pemerintah Belanda, maka seperti di daerah lain Sekolah-sekolah Dasar diintegrasikan menjadi satu jenis Sekolah Dasar untuk semua golongan dalam masyarakat.

b. Sekolah Lanjutan Pertama

Dengan dihapuskannya *Mulo* yang peninggalan penjajah itu, merupakan problema bagi siswa-siswa yang melanjutkan pendidikan tingkat menengah.

Karenanya, bagi para pelajar yang pernah menduduki bangku *Mulo* maka diadakan *Herstel Mulo*, dan selanjutnya memasuki *Mulo Gaya Baru*, yang merupakan peralihan dari *Mulo* ke Republik. *Mulo* gaya baru ini berlangsung terus di Pontianak sejak 1945 sampai 1951.⁸²⁾

Pada tahun 1950/1951 itu juga di Pontianak mulai berdiri sebuah SMP, yang kemudian dikenal dengan SMP I Pontianak. Sementara itu di Singkawang tahun 1949 telah berdiri pula sebuah SMP yang kemudian dikenal dengan SMP I.⁸³⁾

Ternyata perkembangan dan pertambahan jumlah SMP Negeri di daerah ini cukup lambat. Di Pontianak sendiri, berdirinya SMP Negeri selanjutnya (SMP II) baru pada tahun 1960.

Seirama dengan pertambahan penduduk Kalimantan Barat pada umumnya dan Pontianak khususnya, ditunjang pula dengan kemampuan Pemerintah yang meningkat, maka dalam Pelita ke-III, pertambahan jumlah SMP Negeri di Kalimantan Barat cukup pesat. Sebagai gambaran, di kota Pontianak saja selama tahun 1977–1978 telah berdiri tidak kurang dari lima buah SMP Negeri. Jumlah itu terdiri dari Sekolah-sekolah baru maupun peleburan dari SKKP maupun SMEP, Selain itu, tidak sedikit pula SMP yang tadinya merupakan filial dari SMP Negeri dan yang tadinya SMP Swasta, telah berubah menjadi SMP Negeri. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam ikut serta menanggulangi usaha pendidikan. Sampai akhir tahun 1980, SMP Negeri di Kalimantan Barat seluruhnya berjumlah 84 buah.⁸⁴⁾

81) Hasil wawancara dengan Abdullah Haddad, Staf Bagian Pengajaran, Universitas Tanjungpura, tanggal 12 - 1 - 1981.

82) Ibid.

83) Hasil wawancara dengan Syamsuddin, Penilik Sekolah Kabupaten Sambas, tanggal 12 - 1 - 1981.

84) Hasil wawancara dengan Drs. Soedarto, tanggal 30 - 3 - 1981.

Selain SMP sebagai Sekolah Menengah Umum, didirikan pula Sekolah-sekolah Kejuruan Pertama, antara lain SKP dan SMEP yang sekarang sudah dilebur menjadi SMP, STN I dan STN II Pontianak yang pada tahun 1974 telah disatukan

Untuk membentuk kader-kader yang akan menangani bidang pertanian, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat juga mendirikan *Sekolah Pengamat Pertanian* yang berkokasi di komplek Dinas Pertanian Pontianak pada tahun 1960, dan kemudian pada tahun ajaran 1962/1963 di pindahkan ke Pusat Latihan Kerja Pertanian di Anjungan Kabupaten Pontianak. Sejak berdirinya hingga berakhir tahun 1964 (empat angkatan), telah menghasilkan lulusan 52 orang, yang telah disebarakan ke daerah-daerah.⁸⁵⁾

Di lapangan kesehatan, telah berdiri pula *Sekolah Pengamat Rawat* (Pembantu Perawat) di Pontianak pada tahun 1959, dengan Direktur pertamanya ialah dr. Lim Kiong Wan. Pada tahun 1962 dr. Lim Kiong Wan digantikan oleh dr. Gandawidjaja.⁸⁶⁾

c. Sekolah Lanjutan Atas

Bahwa hampir bersama tahun berdirinya dengan SMP I Pontianak, maka Sekolah Guru Atas pun berdiri di Pontianak pada tahun 1950/1951, yang gedungnya juga masih menumpang di SMP I. Sebagai Kepala Sekolah pertama dari SGA Pontianak adalah Marah Kusin sampai 1953. Selain menjabat sebagai Kepala SGA, Marah Kusin juga menjabat sebagai Kepala SMA I Pontianak, di mana kedua Sekolah tadi merupakan Sekolah Tingkat Atas yang tertua di Kalimantan Barat.

Pada saat Kepala SGA Pontianak dijabat oleh A. Wahab Jamil, BA (1964-1969), maka berubahlah nama SGA menjadi SPG.⁸⁷⁾

Seirama dengan pertumbuhan Sekolah Lanjutan Pertama di seluruh Kalimantan Barat, maka Sekolah Lanjutan Atas-pun berkembang. Disusul dengan berdirinya SMA Singkawang dan Sintang tahun 1956, maka akhirnya menyebarlah Sekolah-sekolah Lanjutan Atas di seluruh Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat. Sampai dengan akhir tahun 1980, jumlah SMA Negeri di Kalimantan Barat tidak kurang dari 16 buah. Sesuai dengan program Pemerintah untuk dapat mencetak kader-kader pembangunan melalui Sekolah Menengah, maka Pemerintah telah berhasil pula membangun dua buah SMPP, yang merupakan bagian dari ke-16 SMA tadi, yaitu sebuah di Pontianak (1974) dan sebuah di Sintang (1976).

85) -----, *Memorie Serah Terima Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat : J.C. Oovaang Oeray*, Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1966, hal.49-50.

86) Hasil wawancara dengan Suster Katharina, Staf Pendidikan Perawat RSU Sungai Jawi, Pontianak, 23 - 4 - 1981.

87) Hasil wawancara dengan Pimpinan SPG Pontianak, April 1981.

Di antara beberapa SMA yang ada, berdirinya dimulai dari sekolah swasta yang belajar pada sore hari digabung dengan SMA—SMA Negeri dan diselenggarakan oleh guru-guru SMA Negeri tersebut, dan ada juga yang semula SMA filial dari sebuah SMA Negeri.

SGA (sekarang SPG) Negeri Pontianak yang merupakan SLA tertua di daerah ini, merupakan awal dari berdirinya sekolah-sekolah Kejuruan. Disusul berdirinya SPG Singkawang dan Sintang (1956), Mempawah (1967/1968) yang semula adalah filial SPG Pontianak, Sanggau (1967), Ketapang (1968) dan Menjalin Kabupaten Pontianak (1977) yang semula merupakan filial dari SPG Pontianak.⁸⁸⁾

Sekolah Teknik Menengah (STM) yang hingga sekarang hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, dimulai dengan berdirinya sebuah STM "Bhakti" yang masih berstatus swasta pada tanggal 16 September 1959 atas usaha Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Tujuan Pemerintah Daerah mendirikan STM tersebut, adalah dalam rangka membentuk kader-kader pembangunan di bidang teknik. Sebuah Badan pengelola STM Bhakti tersebut yang diketuai oleh Gubernur J.C.Oevang Oeray waktu itu berhasil membangun lokal-lokal belajar dengan segala perlengkapannya dan bahkan perumahan guru, dengan pembiayaan Pemerintah Daerah. Setelah statusnya ditingkatkan menjadi bersubsidi, maka pada tanggal 1 Agustus 1965 dengan Surat Keputusan Menteri P.D. dan K tertanggal 8 Oktober 1965 No. 135/Dirpt/Bl/65, berubahlah status STM Bhakti menjadi STM Negeri (sekarang STM I Pontianak).⁸⁹⁾

Dengan dimulai berdirinya STM I Pontianak tersebut, kemudian menyusul pula pembangunan STM II Pontianak pada tahun 1974 dan STM Singkawang tahun 1979. Sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) berdiri di Pontianak tahun 1958, yang kemudian disebut dengan SMEA I Pontianak. Untuk menampung tamatan SLP yang tidak tertampung di SMEA I Pontianak maka beberapa orang pendidik dengan dukungan Jawa - tan Koperasi, mendirikan sebuah sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) di Pontianak, sekitar tahun 1963, yang kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi SMEA II Pontianak setelah Pemerintah melengkap - pi gedung dan peralatannya.

Di kota Sambas, sebuah kota Kecamatan di Kabupaten Sambas, berdiri pula sebuah SMEA pada tahun 1966, kemudian menyusul di Sanggau tahun 1969, di Singkawang dan Ketapang tahun 1980 (yang keduanya berasal dari SMEA Swasta), dan di Sekura Kabupaten Sambas tahun 1973 yang merupakan filial dari SMEA Sambas).⁹⁰⁾

88) Hasil wawancara dengan Drs. Soedarto, tanggal 30 - 3 - 1981.

89) ----, *Memorie Serah Terima Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat : J.C. Oovang Oeray*, Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1966, op.cit. hal. 37.

90) Hasil wawancara dengan Drs. Soedarto, tanggal 30 - 3 - 1981.

Untuk menyalurkan bakat remaja putri di lapangan keputrian, maka tokoh-tokoh wanita di daerah ini, dengan dipelopori oleh Ny. Sutitah Soedarso (isteri dr. Soedarso salah seorang tokoh masyarakat dan perintis kemerdekaan itu), mendirikan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) di Pontianak pada tahun 1959 dengan nama "SGKP" "Suti - tah Soedarso". setelah dinegerikan tahun 1977, namanya berubah menjadi SKKA.

Dalam rangka memenuhi tenaga guru Sekolah Lanjutan Pertama maka pada tahun 1962 di Pontianak didirikan sebuah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), bersamaan dengan berdirinya Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA), sekarang Sekolah Guru Olahraga (SGO).

Selain sekolah-sekolah umum dan kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah seperti tersebut di atas, beberapa Instansi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, juga menyelenggarakan Sekolah-sekolah Kedinasan, antara lain :

1. Dengan ditutupnya Sekolah Pengamat Pertanian setelah menyelesaikan siswa angkatan ke-IV tahun 1964, maka beberapa tahun kemudian, Pemerintah Daerah mendirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Pontianak. Ternyata lulusan SPMA tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang pembangunan pertanian. Setelah Pelita bahkan Pemerintah Daerah merasa kekurangan tenaga semacam ini, baik untuk ditempatkan pada Dinas Pertanian maupun Dinas Perkebunan sebagai tenaga lapangan. Rencana untuk mendirikan SPMA yang semula akan didirikan di Anjungan Kabupaten Pontianak, sebenarnya sudah lama ada yaitu sejak tahun 1961. Akan tetapi atas nasehat Menteri Pertanian, waktu itu (Dr. Aziz Saleh), maksud itu sementara ditangguhkan berhubung masalah tenaga pengajar.⁹¹⁾

Selain telah mendirikan Sekolah Pembantu Perawat tahun 1959, pada tahun 1967 Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat juga berhasil mendirikan Sekolah Pengatur Rawat (Perawat) pada tahun 1967 di Pontianak, dan sebagai Direktur pertamanya ialah dr. Gandawidjaja. Tenaga-tenaga yang dihasilkan, selain dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Umum di mana Perawat dididik, juga disebarakan ke seluruh pelosok Kalimantan Barat.

91) -----, *Memorie Serah Terima Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat : J.C. Oovaang Oeray*, Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1966, op.cit. hal. 52.

3. Untuk memenuhi kekurangan tenaga dalam lapangan pengusahaan ikan di Kalimantan Barat, maka dengan Surat Keputusan Gubernur /KDH Tingkat I Kalimantan Barat No. 017/VII-A/71 tanggal 12-2-1971 telah didirikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Pontianak. Aktifitasnya sudah dimulai sejak bulan Maret 1971, dengan Direktur pertamanya Ir. Munif Kadir.⁹²⁾
4. Sedangkan guna menunjang lapangan industri kecil (rakyat) di daerah ini, pada tanggal 15 Januari 1968, Dinas Perindustrian Tingkat I Kalimantan Barat telah berhasil pula mendirikan Sekolah Teknologi Menengah Atas di Pontianak, dengan Kepala Sekolahnya yang pertama Drs. Muhaji Herman.

Sebagai gambaran menyeluruh tentang sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat maka di bawah ini dicantumkan Tabel tentang keadaan Sekolah di seluruh Daerah Kalimantan Barat pada akhir tahun 1980 dan Tabel Status Sekolah di seluruh Daerah Kalimantan Barat akhir 1980.

TABEL III
KEADAAN SEKOLAH DI SELURUH KALIMANTAN BARAT
PADA AKHIR TAHUN 1980

Nama Sekolah	Kodya Ptk.	Kab. Ptk.	Kab. Sam bas	Kab. Ke-ta-pang	Kab. Sang-gau	Kab. Sin-tang	Kab. Kap. Hulu	Jumlah
1. TK	39	19	15	12	5	6	4	100
2. SD	187	482	479	252	396	357	171	2324
3. SMP	31	39	53	20	24	17	24	208
4. STN	1	—	1	1	—	1	—	4
5. SMA/SMPP	16	8	8	2	4	4	1	43
6. SMEA	3	—	3	1	1	—	—	8
7. SPG	1	2	2	1	2	1	1	10
8. SGO	1	—	—	—	—	—	—	1

Sumber : Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Kalimantan Barat.

⁹²⁾ Hasil wawancara dengan D.Kistoro, Pegawai Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, tanggal 23 - 3 - 1981.

TABEL IV

STATUS SEKOLAH DI SELURUH KALIMANTAN
BARAT PADA AKHIR TAHUN 1980

Nama Sekolah	Negeri	Subsidi	Berbantuan	Swasta
1. TK	1	--	--	99
2. SD	1944	94	36	250
3. SMP	84	10	8	106
4. STN	3	1	--	--
5. SMA/SMPP	17	--	--	--
6. SMEA	7	--	--	25
7. SPG	8	1	--	1
8. SGO	1	--	--	--

Sumber : Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya tuntutan keperluan dan terdorong oleh rasa tanggungjawab yang besar, maka tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat bertekad untuk mendirikan suatu Universitas di daerah ini.

Universitas Tanjungpura yang lahir pada tanggal 20 Mei 1959, didirikan oleh para tokoh masyarakat Kalimantan Barat, antara lain :

1. dr. SOEDARSO (almarhum)
2. EDY KRESNO
3. J.C. OEVANG OERAY
4. WARIBAN (almarhum)
5. ISMAIL HAMZAH
6. IBRAHIM SALEH
7. MUZANI A. RANI
8. HASNOL KABRI
9. Mr. SURIPADA (almarhum)
10. H.M. MANSYUR
11. D. SOEKARDI

dengan nama "*Universitas Daja Nasional*" (UNDANAS) ; pimpinannya terdiri dari :

1. Dewan Kurator UNANAS (diketuai oleh dr. SOEDARSO) dan
2. Yayasan Daya Nasional (diketuai oleh EDY KRESNO); pada waktu didirikan baru meliputi 2 Fakultas, yaitu :

1. Fakultas Hukum dan
2. Fakultas Tata Niaga.

Dengan surat keputusan Menteri PTIP tanggal 16 Mei 1963 No. 53 tahun 1963, terhitung mulai tanggal 20 Mei 1963 Universitas ini berstatus "Negeri", dengan nama baru "Universitas Negeri Pontianak" (UNEP), meliputi 4 Fakultas, yakni :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik

pemimpin Universitas berbentuk Presidium, diketuai oleh KOLONEL SOEDARMO (PANGDAM XII/TJPR waktu itu).

Dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 14 September 1965 No. 278 tahun 1965 nama Universitas diganti menjadi "Universitas Dwikora".

Pada tahun itu didirikan Fakultas Sosial dan Potlitik, dan Presidium Universitas diketuai oleh KOLONEL dr. H. SOEGENG.

Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1967, berdasarkan Surat Keputusan Presiden tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967, sekali lagi Universitas ini mengalami perubahan nama menjadi "*Universitas Tanjungpura*" (UNTAN). Pimpinan Universitas dipegang oleh seorang Rektor, dan berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 21 Maret 1968 No. 39/M tahun 1969 diangkat sebagai Rektor yang pertama : LETKOL CKH MUHAMMAD ISJA, SH, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1966;

Pada tanggal 1 Januari 1969, berdasarkan Surat Keputusan DIR-JENPERTI tanggal 16 Desember 1967 No. 161 tahun 1967, IKIP Bandung Cabang Pontianak yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabungkan dengan Universitas Tanjungpura, sehingga dengan demikian Universitas ini meliputi 7 Fakultas :

1. Fakultas Hukum, (berafiliasi dengan UI),
2. Fakultas Ekonomi, (berafiliasi dengan UGM),
3. Fakultas Pertanian (berafiliasi dengan IPB),
4. Fakultas Teknik, (berafiliasi dengan ITB),
5. Fakultas Sosial dan Politik (berafiliasi dengan UGM)
6. Fakultas Keguruan (berafiliasi dengan KIP Bandung),
7. Fakultas Ilmu Pendidikan (berafiliasi dengan IKIP Yogyakarta).

Selain mengadakan afiliasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri tersebut di atas, Universitas Tanjungpura mengadakan afiliasi juga dengan PEMDA Kalimantan Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tanggal 29 Nopember 1971 No. 124/M tahun 1971, diangkat Rektor yang kedua : KOLONEL CKH MUHAMMAD ISJA, SH terhitung mulai tanggal 1 Desember 1970.⁹³⁾

Selanjutnya Kolonel CKH Muhammad Isja, SH sebelum berakhir masa jabatannya yang kedua, ia diangkat menjadi Atase Kebudayaan RI di Eropa Timur dan Rusia. Untuk menggantikan beliau diangkat Prof. Drs. Hinersah Wiratmadja sebagai Rektor dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 1973 tanggal 9 Agustus 1973.

Seperti halnya Kolonel CHK Muhammad Isja, SH demikian juga Prof. Drs. Hidersah Wiratmadja belum habis masa jabatannya beliau telah diangkat menjadi Rektor Universiats Pejajaran dan sebagai Pejabat Sementara Rektor diangkat Drs. Wan Usman MA yang semula menjabat sebagai Sekretaris Universitas.

Kemudian untuk menggantikan Drs. Usman MA sebagai Pejabat Sementara Rektor diangkatlah Ir. Soepartono Siswopranoto sebagai Pejabat Sementara Rektor. Dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 143/M Tahun 1978 tanggal 12 Juli 1978 maka diangkatlah Ir. Soepartono Siswopranoto sebagai Rektor definitif sampai sekarang.

Sementara itu Fakultas Keguruan telah membuka Program Diploma I (Satu) sejak tahun 1979/1980 dan tahun 1980/1981 ditambah dengan pembukaan Program Diploma 2 (Dua).

Universitas Tanjungpura sebagai satu-satunya Universiats Negeri yang ada di daerah ini, sudah beberapa tahun berakhir ini tidak dapat lagi menampung hasrat masyarakat untuk memasuki Fakultas-Fakultas yang ada.

Hal ini selain merupakan dorongan bagi Universiats untuk bekerja keras dan mengembangkannya, juga merupakan dorongan masyarakat/Pemerintah Daerah untuk membuka Perguruan Tinggi lainnya.

Uniresitas Tanjungpura yang usianya hampir mencapai 22 tahun ini, sampai dengan akhir tahun 1980 telah menghasilkan 397 orang Sarjana Lengkap dari ketujuh fakultasnya.

Untuk memperoleh kader-kader Pamong Praja/Pemerintah guna mempercepat pambangunan Daerah Kalimantan Barat, maka ada Kursus Kedinasan untuk menghasilkan tenaga Kepamongpraajaan, yaitu KDC. Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1961, Nomor Pend. 2/12/16-95 didirikanlah KDC Pontianak. Dengan demikian diharapkan Kalimantan Barat tidak lagi tergantung kepada daerah lain dalam pengadaan tenaga pada dinas Pemerintah. Sampai dengan ditutupnya KDC Pontianak pada tanggal 1 April 1975 (karena dibukanya

93) Brosur Dies Natalis ke XIII dan Hari Sarjana ke V, 1972, Universitas Tanjungpura Pontianak, hal. 1 - 2.

APDN Pontianak), maka dari empat angkatan yang pernah dididik, telah me namatkan 119 orang.⁹⁴⁾

Dalam rangka lebih meningkatkan lagi kader-kader Pemerintahan di daerah Kalimantan Barat, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan dihapuskannya KDC Pontianak yang telah ada, dibukalah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Pontianak dengan pembiayaan Pemerintah Daerah. APDN Pontianak berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur /KDH Kalimantan Barat tanggal 7 September 1965 No. 991/X/1965-C yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. 61/1965 tanggal 14 September 1965. Dalam rangka pelantikan Wakil Gubernur/KDH Kalimantan Barat, Menteri Dalam Negeri meresmikan pula berdirinya APDN Pontianak pada tanggal 19 September 1965.

Alumni APDN Pontianak bukan saja untuk mengisi jabatan-jabatan pada Kantor Pemda Tk.I dan Tk. II se Kalimantan Barat, tetapi juga diperbantukan kepada daerah lain yang sangat memerlukan, antara lain : Pemda Irian Jaya. Sedangkan untuk mendidik alumni ke jenjang yang lebih tinggi lagi sekaligus meningkatkan kualitas mereka, secara bertahap alumni APDN Pontianak dikirim ke Institiut Ilmu Pemerintahan Jakarta.

Sementara itu, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak yang telah dinegerikan pada tanggal 6 Agustus 1969, sejak tahun 1979 telah menempati gedung yang baru di Komplek Jalan Suprpto Pontianak.

DAFTAR RESPONDEN ATAU INFORMAN

- :
1. a. Nama : GUSTI ABDUL HAMID
 - b. Tanggal lahir/umur : Ngabang, 5 Juli 1924
 - c. Pekerjaan : Pengawas Bidang Pendidikan Dasar dan Guru pada Kanwil Dep.P. dan K Propinsi Kalimantan Barat.
 - d. Pendidikan : HIK Muhammadiyah Surakarta 1 tahun Normaalschool dan SPG di Pontianak.
 2. a. Nama : HR. MAHMUD SUSILO SUWIGNYO
 - b. Tempat/tanggal lahir : Kutoarjo (Jateng), 29 Oktober 1904
 - c. Pekerjaan : Perintis Kemerdekaan Kalimantan Barat
 - d. Pendidikan : SD V tahun, Kursus Telegraf
 - e. Alamat : Jl. Komodor Yos. Sudarso No. 159 C Pontianak.

94) ----, *Memorie Serah Terima Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat : J.C. Oevaang Oeray*, Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1966, op.cit. hal. 37.

- f. Hasil Karya : Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dan Kalimantan Barat.
3. a. Nama : H.SULAIMAN
 b. Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 27 Juli 1922
 c. Pekerjaan : Guru SD Islamiyah, Pontianak
 d. Pendidikan : Vervogschool 1937, Handelschool 1940
 PGA 1953
 e. Alamat : Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan.
4. a. Nama : DRS. SUDARTO
 b. Umur : 47 tahun
 c. Pekerjaan : Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Umum, merangkap Kasubbag. Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
 d. Pendidikan : Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah Budaya, IKIP Sanata Dharma, 1969.
5. a. Nama : DIMAN ZAINAL
 b. Tempat/tgl. lahir : Singkawang, 1 Januari 1914
 c. Pekerjaan : Pensiunan Guru
 d. Pendidikan : Volksschool tahun 1925, Inlandschool 1928, Magang Guru pada Inlandschool selama 2 tahun.
 e. Alamat : Kampung Condong Luar, Singkawang.
6. a. Nama : JACOBUS SAMAN
 b. Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 25 Juli 1910
 c. Pekerjaan : Pensiunan Penilik Sekolah Kabupaten Sambas dan Landak (Ngabang)
 d. Pendidikan : Normaalschool Manado, 1929-1933
 e. Alamat : Kampung Nyarumkop, Singkawang
7. a. Nama : M. TAHIR
 b. Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 9 Juli 1922
 c. Pekerjaan : Pensiunan Penilik Sekolah
 d. Alamat : Gang Tiung Kandang II No. 20
 e. Hasil Karya : Pelajaran Ilmu Bumi untuk Kalimantan Barat.
8. a. Nama : HIFNI IMRAN
 b. Tempat, tanggal lahir : Sambas, ± 70 tahun
 c. Pekerjaan : Ketua Legiun Veteran RI Kecamatan Sambas.

- d. Pendidikan : Assultaniyah, HIS
e. Alamat : Kampung Dagang, Sambas
9. a. Nama : MUNAWAR KALAHAN
b. Tempat, tanggal lahir : Sambas, tahun 1935
c. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Tk. I Kalimantan Barat.
10. a. Nama : CHATIB SYARBAINY
b. Tempat, tanggal lahir : Batu Sangkar, 3 Maret 1918
c. Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatulah, Pontianak
d. Pendidikan : Kuliyatul, Mu'alimin Islam (KMI) Padang, berijazah tahun 1939.
11. a. Nama : J. J. LESIL
b. Umur : 56 tahun
c. Pekerjaan : Purnawirawan ABRI/Ketua Komisi Pendidikan Gereja Protestan Indonesia Barat-Siloam, Pontianak
d. Pendidikan : Sarjana Muda Hukum
e. Alamat : Gereja Protestan Indonesia Barat SILOAM, Pontianak.
12. a. Nama : SUSTER KATHARINA
b. Umur : 32 tahun
c. Pekerjaan : Staf Pendidikan Perawat RSU Sei Jawi Pontianak
d. Pendidikan : Akademi Perawat
e. Alamat : Susteran RSU Sei Jawi Pontianak
13. a. Nama : Dr. HADARI NAWAWI
b. Tanggal lahir/umur : 1941, di Pemangkat
c. Pekerjaan : Dosen FIP Universiatas Tanjungpura dan Kepala Dinas P.D. dan K Propinsi Kalimantan Barat.
d. Pendidikan : Dotor IKIP Jakarta.
14. a. Nama : ABDULLAH HADDAD
b. Umur : 54 tahun
c. Pekerjaan : Staf Bagian Pengajaran Universitas Tanjungpura, Pontianak.
d. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
15. a. Nama : Drs. SAMZA
b. Tanggal Lahir/tempat : 7 September 1927, Sambas

- c. Pekerjaan : Dosen Fakultas Keguruan, Universitas Tanjungpura Pontianak
- d. Pendidikan : Sarjana Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris, IKIP Bandung.
16. a. Nama : Dokter ALBERT SUTJIADI
- b. Umur : 33 tahun
- c. Pekerjaan : Gembala (Pendeta) Sidang GKKB (Gereja Kristen Kalimantan Barat) Pontianak dan Dokter
- d. Pendidikan : Dokter dan Theologi
- e. Alamat : GKKB Jalan Gajah Mada Pontianak
17. a. Nama : Drs. HERONIMUS BUMBUN OFM.
- b. Umur : 43 tahun
- c. Pekerjaan : Uskup Agung Pontianak
- d. Pendidikan : Sekolah Imam (Seminari Agung) dan Theologi di Roma (Vatikan)
- e. Alamat :
18. a. Nama : SYAMSUDDIN
- b. Umur : 51 tahun
- c. Pekerjaan : Pensiunan Penilik Sekolah Kabupaten Sambas.
- d. Pendidikan :
19. a. Nama : D. KISTORO, SH
- b. Umur : 5 Juli 1947 (34 tahun)
- c. Pekerjaan : Pegawai Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Barat
- d. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura tahun 1981.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU-BUKU

1. Ahok, Pasifikus, Drs. et.al. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Barat*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat, 1979/1980.
2. Boelaars, Huub, Ofm.Cap.et.al. *Situasi Sekolah-Sekolah Katolik Propinsi Kalimantan Barat, 1976*, Jilid I Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Atma Jaya, Jakarta, 1978.
3. Bumbun OFM Cap. Hironymus, Drs. (Uskup Agung Pontianak), *Archdiocese of Pontianak Kalimantan Barat*, Keuskupan Agung Pontianak, Kalimantan Barat 1978.
4. de Groot J.J.M. *Het Kongsuwezen in West Borneo*, Den Haag 1880.
5. Djumhur I dan Danasuparta, Drs. H. *Sejarah Pendidikan*, Penerbit C.V. Ilmu, Bandung, Cetakan ke-7, 1976.
6. Hadari Nawawi, Drs. *Analisa Data Dalam Eksperimen Bidang Sosial*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, 1977.
7. Lontaan, J.U., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Edisi I Pontianak, 1975.
8. Mar'a, Drs. Moh.et.al. *Adat Istiadat Kalimantan Barat (Adat dan Upacara Perkawinan)*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, 1978/1979.
9. Pringgodigdo, A.K., SH. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, 1967.
10. Sartono Kartodirdjo, Dr.et.al. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1977
11. Soedarto, Drs.et.al. *Sejarah Daerah Kalimantan Barat 1900 – 1941*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pontianak, 1978/1979.
12. Soekmono, Drs. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jilid II, Penerbit Nasional Trikarya—Jakarta, Cetakan ke-4.
13. Susanto Tirtoprodjo, Drs,SH, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1965.

14. Sutari Imam Bernadib, Dra. *Pengantar Sejarah Pendidikan*, Jilid I, Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta, 1977.
15. Tamrin Gani, *Partisipasi Orang Islam Kota Sambas Dalam Usaha Peningkatan Madrasah Tarbiyatul-Islam Sambas (Kalimantan Barat)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI Jakarta, 1979.
16. Van den Berg, H.J. et.al. *Dari Panggung Pariwisata Sejarah Dunia*, Jilid I, J.B. Wolters, Jakarta, Groningen, Cetakan Kedua, 1951.
17. -----, *De Broeders van Huijbergen een halve eeuw Werkzaam in Indonesia, 1920-1970* Pontianak.
18. -----, *Guide Book Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, 1974-1975*, Sekretariat FIP. Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1974.
19. -----, *Kenangan 75 tahun Mandirinya Gereja Katholik di Kalimantan Barat (1905 - 1980)*, Panitia Perayaan 75 tahun Hadirnya Gereja Katholik di Kalimantan Barat, Seksi Dokumentasi, Pontianak, 1980.
20. -----, *Memorie Serah Terima Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat J.C. Oevang Oeray*, Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1966
21. -----, *Sejarah Gereja Katholik di Indonesia*, Kursus Kader Katholik, Jakarta, 1971.
22. -----, *Sejarah Gereja Katholik Indonesia*, Jilid 3a, Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, abad ke - 20, Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, Ende, Flores, 1974.
23. -----, *Tanjungpura Berjuang*, Sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak.
24. U.A. Hamid Makhmud, *Gerakan Kemerdekaan di Kalimantan Barat*, (Ceramah di Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak 10 - 8 - 1974).
25. -----, *Buku Pedoman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soel-tan M. Tsafioeddin, Singkawang*, Tahun 1980/1981.

II. BROSUR

1. Brosur Dies Natalis Universitas Tanjungpura di Pontianak 1972.
2. Brosur Catatan Singkat Sejarah Pembangunan Perguruan Islamiyah . 50 tahun (1926 – 1976).

III. SURAT KABAR

1. Harian Akcaya, Selasa, 2 Desember 1980.

---oo0oo---

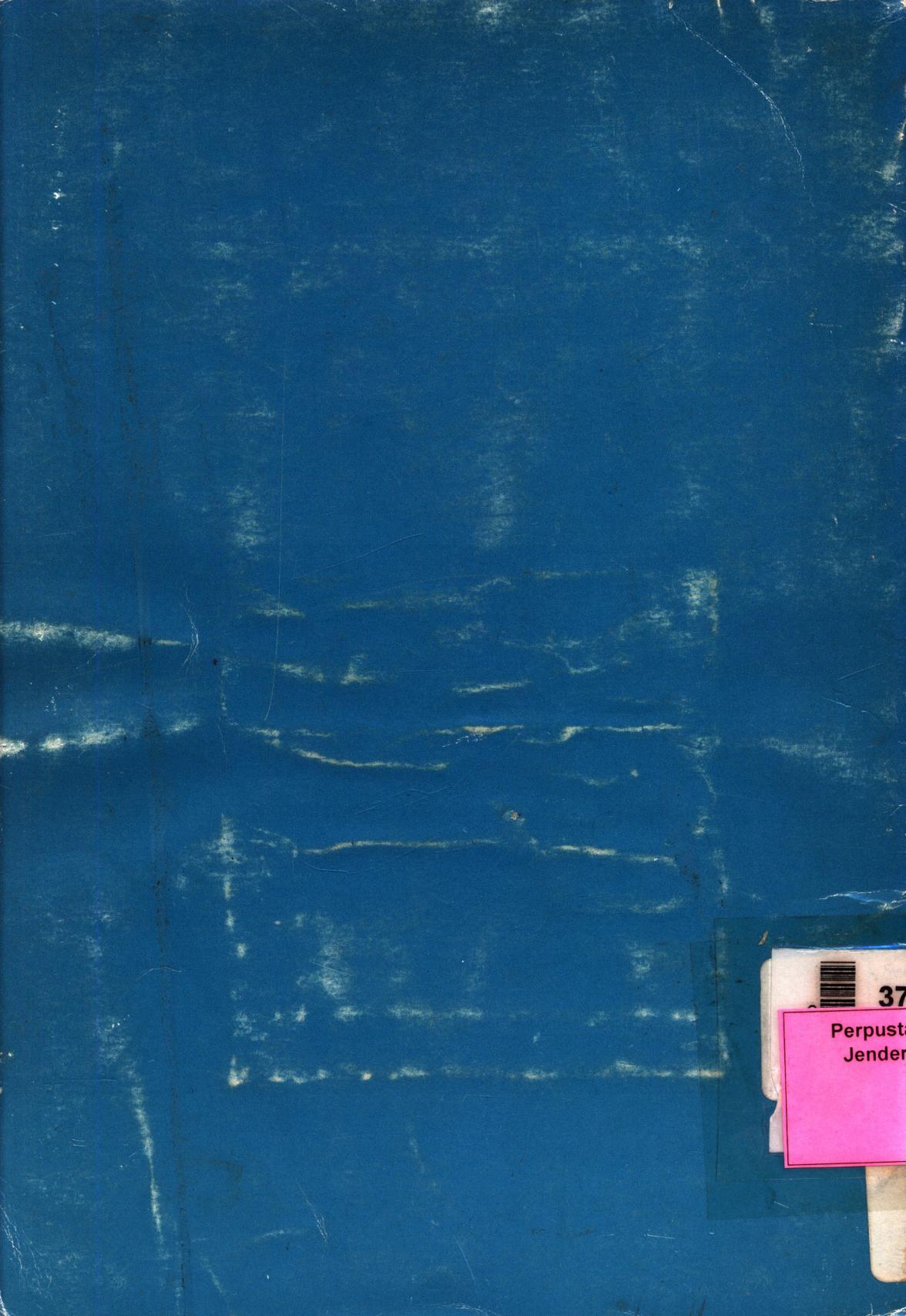
PETA DAERAH KALIMANTAN BARAT

Skala 1 : 1.500.000



- +++++ Batas Negara
- - - - - Batas Propinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- ~~~~~ Sungai
- Ibukota Propinsi
- Ibukota Kabupaten





37

Perpustakaan
Jender